

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempo



Gambar 4.1 Logo Tempo

Tempo.co portal berita ternama dari Indonesia dan salah satu pelopor media daring di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1995. Pada awalnya Tempo.co bernama Tempointeraktif. Majalah Tempo pertama kali diterbitkan pada tahun 1971, namun sempat dihentikan dua kali selama masa Orde Baru. Setelah era reformasi, majalah ini kembali terbit di bawah manajemen PT Tempo Inti Media, yang kemudian menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2001 (Tempo.co, 2022).

Tempo.co media daring yang dikelola oleh PT Tempo Inti Media Tbk. Tempo.co menyajikan berita dan artikel dalam beragam kategori, seperti nasional, metro, bisnis, teknologi, olahraga, internasional, gaya hidup, hingga seni dan budaya. Tempo.co Media Group juga menerbitkan media cetak seperti Majalah Tempo dan Koran Tempo, yang terkenal dengan liputan investigatif serta analisis yang mendalam. Kantor pusat Tempo.co terletak di Gedung Tempo, Jakarta, dengan Alamat lengkap di Jl. Palmerah Barat No. 8.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Tempo.co kembali hadir pada tahun 2008 dengan tampilan baru dan menyajikan berita berkualitas melalui platform digital. Media ini memanfaatkan internet untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara efektif. Tempo.co menerapkan standar jurnalisme yang tinggi, baik dalam proses peliputan maupun penulisan berita yang tajam, cerdas, dan berimbang. Tempo.co memiliki visi untuk menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Dalam kebijakan redaksionalnya, Tempo.co terus berkomitmen menjunjung tinggi

standar jurnanisme terbaik dalam setiap pemberitaan. Berita yang disajikan diupayakan melalui proses peliputan yang mendalam dan ditulis dengan gaya yang tajam, cerdas, serta tetap mudah dipahami dan mengandung unsur jenaka (Tempo.co, 2023).

Gambaran umum objek penelitian ini dengan menggunakan beberapa berita Tempo.co yang terpilih sesuai dengan kriteria pemberitaan yakni mengenai penolakan RUU TNI. Peneliti memilih 3 berita yang dimuat oleh Tempo.co pada bulan Maret 2025. Dari berita tersebut akan menghasilkan prefread reding lalu peneliti melakukan wawancara terhdap informan dari generasi X, Y dan Z untuk mengetahui posisi pemaknaan terhadap prefread reading.

4.1.1 Latar Belakang Informan

1. Generasi X

Tabel 4.1 Tabel latar belakang informan generasi X

Informan	Nama	Elpi Sri Elfiliyah
1	Usia	51
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Domisili	Tangerang Selatan
2	Nama	Martumpal Sitompul
	Usia	54
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Wakil kepala Sekolah
	Domisili	Tangerang Selatan
3	Nama	Handoko Triwuryanto
	Usia	51
	Pendidikan	Strata 2
	Pekerjaan	Karyawan Swasta
	Domisili	Tangerang Selatan

Sumber. Olahan Peneliti

Informan pertama dari genari X adalah seorang perempuan bernama Elpi Sri Elfiliyah yang berusia 51 tahun. Ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di jenjang Strata 1 pada Fakultas Pendidikan Pancasila dengan konsentrasi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

(PKN). Saat ini, Ibu Elfi berdomisili di kawasan Cempaka Putih, Kampung Utan, yang terletak di wilayah Tangerang Selatan. Ia berasal dari latar belakang etnis Jawa, yang turut memengaruhi cara pandangya terhadap berbagai isu sosial dan budaya. Dengan pengalaman hidup dan latar pendidikan yang dimilikinya, Ibu Elfi memberikan perspektif yang cukup kaya dalam wawancara ini.

Informan kedua yang berasal dari generasi X adalah seorang laki-laki bernama Martumpal Sitompul yang saat ini berusia 54 tahun. Ia telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada jenjang Strata 1 (S1). Saat ini, beliau tinggal di kawasan Pamulang 2, yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Martumpal berasal dari Sumatera dan memiliki latar belakang etnis Batak, yang dikenal dengan karakteristik budaya yang kuat dan kental. Pengalaman hidup serta latar belakang budayanya memberikan kontribusi penting dalam memahami sudut pandangya terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Informan ketiga dalam wawancara ini adalah seorang laki-laki bernama Handoko Triwuryanto yang berasal dari kalangan generasi X dan kini berusia 51 tahun. Ia merupakan lulusan Magister (S2) Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat ini, beliau menetap di kawasan Bintaro, tepatnya di Kampung Peladen, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Meskipun lahir dan besar di Jakarta, latar belakang keluarganya berasal dari suku Jawa, yang membentuk identitas budaya dalam kehidupannya.

2. Generasi Y

Tabel 4.2 Tabel latar belakang informan generasi Y

Informan	Nama	Mujiyati
1	Usia	43
	Pendidikan	Strata 2
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Domisili	Tangerang Selatan
2	Nama	Zamaludin
	Usia	35
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Karyawan Swasta

	Domisili	Tangerang Selatan
3	Nama	Santi Rahayu
	Usia	39
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Mahasiswa S2
	Domisili	Tangerang Selatan

Sumber. Olahan Peneliti

Informan keempat bernama Mujiyati, seorang perempuan yang saat ini berusia 43 tahun. Ia telah menempuh pendidikan hingga jenjang Magister (S2) di bidang Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini, Ibu Muji tinggal di kawasan Bulak 1, RT 4 RW 2, nomor 78, yang terletak di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ia berasal dari suku Betawi, yang merupakan penduduk asli Jakarta dengan budaya khas yang masih dijaga hingga kini. Latar belakang pendidikan dan budaya yang dimilikinya menjadikan pandangannya relevan dan beragam dalam konteks wawancara ini

Informan kelima bernama Zamaludin, seorang laki-laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 2 Januari 1990. Ia telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan saat ini sedang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Zamaludin tinggal di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah padat penduduk dengan latar belakang masyarakat yang beragam. Meskipun lahir dan besar di Tangerang, ia berasal dari suku Jawa yang turut membentuk nilai-nilai serta pandangan hidupnya. Dengan latar pendidikan dan budaya tersebut, Zamaludin memberikan sudut pandang yang menarik dalam wawancara ini.

Informan keenam berasal dari generasi Y dan bernama Santi Rahayu. Ia adalah seorang perempuan berusia 39 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1). Saat ini, Santi tinggal di kawasan Pondok Karya, Tangerang Selatan, yang merupakan lingkungan tempat tinggalnya sejak beberapa tahun terakhir. Ia berasal dari suku Betawi, yang memiliki budaya khas Jakarta. Dengan latar belakang pendidikan dan budaya tersebut, Santi memberikan perspektif yang menarik dalam studi ini.

3. Informan 1 Generasi Z

Tabel 4.3 Tabel latar belakang informan generasi Z

Informan	Nama	Andika Wahyu Saputra
1	Usia	26
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Karyawan Swasta
	Domisili	Tangerang Selatan
2	Nama	Yeni Aryanti
	Usia	29
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Guru Bahasa Indonesia
3	Domisili	Jakarta Barat
	Nama	Ajeng Utami
	Usia	26
	Pendidikan	Strata 1
	Pekerjaan	Pedagang
	Domisili	Jakarta Selatan

Sumber. Olahan Peneliti

Informan ketujuh berasal dari generasi Z dan bernama Andika Wahyu Saputra. Ia adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dengan jurusan Bimbingan Konseling (BK). Saat ini, Andika tinggal di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, tempat ia menetap setelah lahir di kota yang sama. Berasal dari suku Betawi, Andika memiliki akar budaya yang kuat dan pengalaman hidup di lingkungan Tangerang yang membentuk pandangannya.

Informan bernama Yeni Aryanti adalah seorang perempuan berusia 29 tahun yang bekerja sebagai guru. Ia telah menamatkan pendidikan Strata 1 dengan gelar Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini, Yeni tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, tempat ia menetap dan menjalani aktivitas sehari-harinya. Meskipun tinggal di Jakarta, ia berasal dari daerah Jawa Tengah, sehingga memiliki latar belakang budaya yang khas dari wilayah tersebut.

Informan bernama Ajeng Utami adalah seorang perempuan berusia 26 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1). Saat ini, Ajeng tinggal di kawasan Jakarta Selatan. Ia memilih untuk tetap menetap di lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan yang familiar, Ajeng memiliki pandangan yang kuat mengenai kehidupan di daerah tersebut.

4.2 Hasil Penelitian dan Analisis

4.2.1 Hasil Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co

1. Pembingkai Berita Berjudul “Tolak RUU TNI, Suara Ibu Indonesia Serukan Perempuan di Seluruh Indonesia Ikut Turun ke Jalan”

Tabel 4.4 Analisis *Framing* Robert Entman Pemberitaan RUU TNI pada Tempo.co

Elemen <i>Framing</i>		Hasil Pengamatan
Define problems (Pendefinisian Masalah)		Dalam berita ini, Tempo.co mendefinisikan masalah RUU TNI sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat sipil, yang tercermin dari aksi para perempuan dalam Suara Ibu Indonesia di depan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 28 Maret 2025.
Diagnose causes (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)		Berdasarkan pendefinisian masalah di atas, Tempo.co menyebutkan sumber penyebab masalah kekhawatiran masyarakat bahwa pengesahan RUU TNI dapat mengulang kembali sejarah militeristik dan dwifungsi TNI pada tahun 1998, serta mengancam ruang-ruang masyarakat sipil yang berpotensi diisi kembali oleh peran militer.
Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral)		Dalam berita tersebut, Tempo.co memuat penilaian moral terkait penyebab masalah, yakni proses pembuatan hukum dilakukan secara diam-diam tanpa mempertimbangkan pandangan masyarakat.
Treatment recommendation (Menekankan Penyelesaian)		Dalam pembingkai pemberitaan RUU TNI, Tempo.co menawarkan dua rekomendasi utama, yakni meminta pemerintah untuk membatalkan RUU TNI dan menyerukan aparat menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa.

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam berita ini, Tempo.co menggambarkan RUU TNI sebagai sumber kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil, yang tampak melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok perempuan dari Suara Ibu

Indonesia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat, 28 Maret 2025. Mengacu pada penggambaran tersebut, Tempo.co mengidentifikasi akar dari kekhawatiran publik, yakni potensi RUU TNI untuk membuka kembali praktik militerisme dan dwifungsi TNI seperti yang terjadi sebelum reformasi 1998, serta kemungkinan masuknya militer ke dalam ruang-ruang sipil. Hal ini tercermin dari kutipan dalam berita: “Dia mengatakan kembalinya dwifungsi TNI dikhawatirkan akan merenggut ruang-ruang yang seharusnya diisi oleh masyarakat sipil.” Juga disebutkan, “Sebagaimana diketahui, RUU TNI yang disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025 menuai kritik keras dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat... turun ke jalan... Namun aksi tersebut mendapat respons represif dari aparat...” Serta pernyataan: “Sulistiyowati menyinggung peran perempuan dalam sejarah perjuangan 1998... ‘Semuanya berkolaborasi melawan rakyatnya sendiri, bahkan menciptakan hukum secara diam-diam untuk merepresi kita semua.’”

Tempo.co juga memuat penilaian moral atas penyebab masalah ini, terutama terkait dengan proses legislasi yang dianggap tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik. Hal tersebut tercermin dalam kutipan: “Semuanya berkolaborasi melawan rakyatnya sendiri, bahkan menciptakan hukum secara diam-diam untuk merepresi kita semua.” Juga: “Kekhawatiran kami adalah rezim ini, melalui aparatnya, semakin tidak peduli terhadap suara kami dengan melakukan kekerasan.”

Dalam berita, Tempo.co menyampaikan dua rekomendasi, yakni menyerukan agar pemerintah membatalkan pengesahan RUU TNI serta meminta aparat keamanan menghentikan tindak kekerasan terhadap para mahasiswa. Ini terlihat dari pernyataan: “Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan Revisi Undang-Undang TNI dan menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa.” Juga diperkuat oleh: “Dia pun mendorong ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk ikut turun ke jalan atau mendukung anak-anak muda yang turun ke jalan.”

Secara keseluruhan, Tempo.co membingkai persoalan RUU TNI sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan capaian reformasi.

Permasalahannya bukan hanya terletak pada isi revisi undang-undang itu sendiri, tetapi juga pada proses legislasi yang tertutup dan sikap represif dari negara terhadap warga. Tempo.co melihat tindakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak sipil, dan karena itu menyuarakan tuntutan untuk membatalkan RUU tersebut serta menghentikan kekerasan sebagai langkah penyelesaian.

2. Pembingkai Berita Berjudul “Koalisi Dosen Tolak Revisi UU TNI: Berpotensi Langgar HAM hingga Kebebasan Akademik”

Tabel 4.5 Analisis *Framing* Robert Entman Pemberitaan RUU TNI pada Tempo.co

Elemen <i>Framing</i>		Hasil Pengamatan
Define (Pendefinisian Masalah)	problems	Dalam berita ini, Tempo.co mendefinisikan masalah RUU TNI sebagai bentuk penolakan dari koalisi dosen yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sipil terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Diagnose (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)	causes	Berdasarkan pendefinisian masalah di atas, Tempo.co mengidentifikasi kekhawatiran bahwa revisi UU TNI berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan membatasi kebebasan akademik. Revisi tersebut dinilai memberi kewenangan kepada TNI untuk melakukan sweeping terhadap buku-buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, serta membubarkan diskusi kampus yang dianggap mengancam keamanan nasional. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan impunitas dan serangan sistematis terhadap insan akademik, memperburuk situasi kebebasan akademik di Indonesia. Selain itu, revisi ini juga dipandang melemahkan profesionalisme militer dan berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti pada masa Orde Baru.
Make moral (Membuat Moral)	judgement Keputusan	Dalam berita tersebut, Tempo.co memuat penilaian moral terkait penyebab masalah, yakni bahwa revisi UU TNI yang tengah dibahas di DPR dinilai inkonstitusional karena melanggar hak asasi manusia dan mengancam kebebasan akademik. Tempo juga menyoroti bahwa impunitas TNI dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap memburuknya situasi kebebasan akademik di Indonesia.
Treatment recommendation (Menekankan Penyelesaian)		-

Sumber. Olahan Peneliti

Dalam berita ini, Tempo.co menggambarkan RUU TNI sebagai sumber kekhawatiran publik dari kalangan dosen yang tergabung dalam beberapa organisasi sipil, seperti organisasi Constitutional and

Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKa), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK). Penolakan oleh koalisi dosen ini, adanya kekhawatiran RUU TNI tersebut melanggar Hak Asasi Manusia hingga kebebasan akademik, kekhawatiran tersebut mengacu pada RUU TNI dapat memberi kewenangan kepada TNI untuk melakukan sweeping terhadap buku-buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, serta membubarkan diskusi kampus yang dianggap mengancam keamanan nasional. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan impunitas dan serangan sistematis terhadap insan akademik, memperburuk situasi kebebasan akademik di Indonesia, hal ini seperti dalam kutipan “Dampak impunitas juga menjadikan serangan yang sistematis terhadap insan akademik, melalui sweeping buku-buku kiri, serta berbagai tindakan represi lainnya menjadikan situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan,” juga “dapat membubarkan diskusi di kampus jika dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional,”. Selain itu, revisi ini juga dipandang melemahkan profesionalisme militer dan berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti pada masa Orde Baru.

Tempo.co juga memuat penilaian moral atas penyebab masalah ini, terutama terkait dengan RUU TNI yang dibahas oleh DPR dinilai oleh koalisi dosen dinilai inkonstitusional karena melanggar hak asasi manusia dan mengancam kebebasan akademik. Selain itu Tempo.co menyoroti bahwa impunitas TNI dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap memburuknya situasi kebebasan akademik di Indonesia. Hal ini seperti dalam kutipan “Dampak impunitas juga menjadikan serangan yang sistematis terhadap insan akademik”. Namun pada berita ini tempo tidak memiliki atau menyampaikan treatment recommendation atau menekankan penyelesaian

Secara keseluruhan, Tempo.co membingkai RUU TNI sebagai isu yang menimbulkan kekhawatiran besar, khususnya di kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Dalam pemberitaannya, Tempo.co menyoroti bahwa revisi undang-undang ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia,

tetapi juga kebebasan akademik, karena membuka peluang bagi TNI untuk melakukan sweeping buku dan membubarkan diskusi di kampus. Selain itu, proses legislasi yang tertutup dan tidak melibatkan publik dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Dalam berita ini Tempo.co memuat penilaian moral RUU TNI yang dibahas oleh DPR dinilai oleh koalisi dosen dinilai inkonstitusional karena melanggar hak asasi manusia dan mengancam kebebasan akademik dan impunitas TNI dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap memburuknya situasi kebebasan akademik di Indonesia

3. Pembingkai Berita Berjudul “Anak Bung Hatta, Sumarsih, hingga Pegiat Demokrasi Bacakan Petisi Tolak RUU TNI”

Tabel 4.6 Analisis *Framing* Robert Entman Pemberitaan RUU TNI pada Tempo.co

Elemen <i>Framing</i>		Hasil Pengamatan
Define (Pendefinisian Masalah)	problems	Dalam berita ini, Tempo.co mendefinisikan masalah RUU TNI sebagai bentuk penolakan dari sejumlah tokoh akademisi, pegiat demokrasi, dan aktivis HAM terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Diagnose (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)	causes	Berdasarkan pendefinisian masalah di atas, Tempo.co menyebutkan sumber penyebab masalah terletak pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI yang dinilai bermasalah karena mengandung pasal-pasal yang berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Salah satu isu utama yang disorot adalah perluasan peran militer aktif di jabatan sipil, seperti di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dinilai mengancam prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan.
Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral)	moral judgement	Dalam berita tersebut, Tempo.co memuat penilaian moral terkait penyebab masalah, yakni bahwa agenda revisi UU TNI dinilai tidak memiliki urgensi untuk mendorong transformasi TNI menjadi institusi yang lebih profesional. Sebaliknya, revisi ini justru dianggap melemahkan profesionalisme militer, karena mendorong keterlibatan TNI dalam fungsi-fungsi non-pertahanan, seperti menempati jabatan sipil. Tempo juga menyoroti bahwa perluasan tugas TNI, termasuk dalam penanganan narkoba, dianggap keliru dan berbahaya bagi negara hukum, karena seharusnya penanganan isu tersebut berada dalam ranah kesehatan dan penegakan hukum yang proporsional, bukan dijadikan bagian dari agenda militeristik.
Treatment recommendation (Menekankan Penyelesaian)		Dalam pembingkai pemberitaan RUU TNI, Tempo.co menawarkan dua rekomendasi utama. Pertama, pemerintah dan DPR seharusnya mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional untuk menjamin

prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Kedua, desakan kepada pemerintah dan DPR untuk fokus pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), meningkatkan adaptabilitas TNI terhadap ancaman eksternal, memperbaiki kesejahteraan prajurit, serta memperhatikan keseimbangan gender dalam struktur organisasi TNI.

Sumber. Olahan Peneliti

Dalam berita ini, Tempo.co menggambarkan RUU TNI sebagai kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI seperti zaman orde baru. Yang tercermin dalam aksi membacakan petisi tolak RUU TNI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025. Aksi ini diikuti oleh tokoh akademisi, pegiat demokrasi, dan aktivis HAM, hal ini sebagai bentuk penolakan. Tempo menuliskan pada berita ini penyebab penolakan dilakukan karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI yang dinilai bermasalah karena mengandung pasal-pasal yang berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia, hal ini seperti kutipan “Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia,” lalu disebabkan adanya perluasan peran militer aktif ke jabatan sipil seperti di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dinilai mengancam prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan.

Tempo.co juga memuat dua penilaian moral atas penyebab masalah ini, yang pertama bahwa agenda revisi UU TNI dinilai tidak memiliki urgensi untuk mendorong transformasi TNI menjadi institusi yang lebih profesional. Sebaliknya, revisi ini justru dianggap melemahkan profesionalisme militer, karena mendorong keterlibatan TNI dalam fungsi-fungsi non-pertahanan, seperti menempati jabatan sipil, seperti dalam kutipan “Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.” Yang kedua penilaian moral

perluasan tugas TNI, termasuk dalam penanganan narkoba, dianggap keliru dan berbahaya bagi negara hukum, karena seharusnya penanganan isu tersebut berada dalam ranah kesehatan dan penegakan hukum yang proporsional, bukan dijadikan bagian dari agenda militeristik.

Dalam berita, Tempo.co menyampaikan dua rekomendasi, yakni menyerukan pemerintah dan DPR seharusnya mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Lalu desakan kepada pemerintah dan DPR untuk fokus pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), meningkatkan adaptabilitas TNI terhadap ancaman eksternal, memperbaiki kesejahteraan prajurit, serta memperhatikan keseimbangan gender dalam struktur organisasi TNI.

Secara keseluruhan, Tempo.co membingkai polemik RUU TNI sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang ditandai dengan kekhawatiran publik terhadap kembalinya dwifungsi militer seperti pada masa Orde Baru. Pemberitaan ini menyoroti penolakan dari kalangan akademisi, pegiat demokrasi, dan aktivis HAM terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RUU tersebut, terutama yang membuka peluang perluasan peran militer di jabatan sipil. Tempo.co juga menampilkan penilaian moral bahwa revisi ini tidak mendorong profesionalisme militer, melainkan justru melemahkannya, serta menunjukkan kekeliruan dalam perluasan tugas TNI ke ranah non-pertahanan. Di sisi lain, media ini menyampaikan rekomendasi penyelesaian yang mencakup reformasi peradilan militer dan fokus pada modernisasi serta kesejahteraan TNI. Dengan demikian, Tempo.co menegaskan bahwa penguatan militer seharusnya tidak mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

4. Hasil Tiga Pembingkai Berita

Tabel 4.7 Analisis *Framing* Robert Entman Pemberitaan RUU TNI pada Tempo.co

Elemen <i>Framing</i>		Hasil Pengamatan
Define (Pendefinisian Masalah)	problems	Tempo.co mendefinisikan masalah RUU TNI sebagai bentuk kekhawatiran dan penolakan yang meluas dari masyarakat sipil, yang tercermin melalui aksi-aksi protes yang dilakukan oleh kelompok perempuan, koalisi dosen, akademisi, pegiat demokrasi, dan aktivis HAM. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.
Diagnose (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)	causes	Berdasarkan pendefinisian masalah di atas, Tempo.co menyebutkan bahwa sumber penyebab masalah RUU TNI adalah isi revisi undang-undang dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dinilai bermasalah. RUU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme seperti pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Selain itu, RUU TNI mengancam ruang masyarakat sipil, dengan memberi peluang bagi militer untuk menempati jabatan-jabatan sipil strategis, seperti di Kejaksaan Agung dan kementerian. RUU TNI juga berisiko melanggar hak asasi manusia dan membatasi kebebasan akademik, dengan memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan <i>sweeping</i> buku dan membubarkan diskusi yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau prinsip keamanan nasional. RUU TNI juga dianggap dapat melemahkan profesionalisme militer, karena TNI justru diarahkan menjalankan fungsi-fungsi non-pertahanan yang seharusnya berada di ranah sipil.
Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral)	judgement	Tempo.co memuat penilaian moral terkait penyebab masalah RUU TNI dengan menyoroti sejumlah aspek yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Pertama, Tempo mengkritik proses legislasi yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik, yang menunjukkan pengabaian terhadap aspirasi masyarakat. Kedua, revisi UU TNI dinilai inkonstitusional karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dan membatasi kebebasan akademik, terutama melalui kewenangan TNI dalam membubarkan diskusi dan menyita buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, Tempo menilai bahwa agenda revisi ini tidak memiliki urgensi dalam memperkuat profesionalisme militer. Sebaliknya, revisi tersebut justru mendorong keterlibatan TNI dalam fungsi-fungsi non-pertahanan, seperti menempati jabatan sipil dan menangani isu narkoba—hal yang dinilai berbahaya karena menggeser pendekatan dari hukum dan kesehatan ke arah militeristik. Dengan demikian, penilaian moral Tempo.co mencerminkan keprihatinan terhadap pelemahan demokrasi, supremasi sipil, dan nilai-nilai konstitusional dalam proses revisi UU TNI.

<i>Treatment recommendation (Menekankan Penyelesaian)</i>	Dalam pembingkai pemberitaan RUU TNI, Tempo.co menawarkan sejumlah rekomendasi yang berfokus pada perlindungan demokrasi dan reformasi institusional. Pertama, Tempo menyerukan agar pemerintah dan DPR membatalkan RUU TNI karena dinilai bermasalah secara substansi dan proses. Kedua, Tempo mendorong aparat untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap RUU tersebut. Selain itu, Tempo merekomendasikan agar agenda reformasi diarahkan pada revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai langkah untuk memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tempo juga menekankan pentingnya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan respons TNI terhadap ancaman eksternal, serta perlunya perhatian pada keseimbangan gender dalam struktur organisasi militer.
--	---

Sumber. Olahan Peneliti

Dalam berita yang menjadi analisis, Tempo.co mendefinisikan RUU TNI sebagai kekhawatiran dan penolakan yang meluas dari masyarakat sipil, yang tercermin melalui adanya aksi-aksi protes yang dilakukan oleh kelompok perempuan, koalisi dosen, akademisi, pegiat demokrasi, dan aktivis HAM. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

Tempo.co dalam ketiga pemberitaan yang menjadi analisis menjelaskan penyebab dari kekhawatiran dan penolakan disebabkan isi revisi undang-undang dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dinilai bermasalah, RUU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme seperti pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Selain itu, RUU TNI mengancam ruang masyarakat sipil, dengan memberi peluang bagi militer untuk menempati jabatan-jabatan sipil strategis, seperti di Kejaksaan Agung dan kementerian. RUU TNI juga berisiko melanggar hak asasi manusia dan membatasi kebebasan akademik, dengan memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan sweeping buku dan membubarkan diskusi yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau prinsip keamanan nasional. RUU TNI juga dianggap dapat melemahkan profesionalisme militer, karena TNI justru diarahkan

menjalankan fungsi-fungsi non-pertahanan yang seharusnya berada di ranah sipil.

Tempo.co juga memuat penilaian moral atas penyebab masalah ini dari ketiga berita yang menjadi analisa. Tempo.co memuat penilaian mencerminkan keprihatinan terhadap pelemahan demokrasi, supremasi sipil, dan nilai-nilai konstitusional dalam proses revisi UU TNI. Karena pertama Pertama, Tempo mengkritik proses legislasi yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik, yang menunjukkan pengabaian terhadap aspirasi masyarakat. Kedua, revisi UU TNI dinilai inkonstitusional karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dan membatasi kebebasan akademik, terutama melalui kewenangan TNI dalam membubarkan diskusi dan menyita buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, Tempo menilai bahwa agenda revisi ini tidak memiliki urgensi dalam memperkuat profesionalisme militer. Sebaliknya, revisi tersebut justru mendorong keterlibatan TNI dalam fungsi-fungsi non-pertahanan, seperti menempati jabatan sipil dan menangani isu narkoba—hal yang dinilai berbahaya karena menggeser pendekatan dari hukum dan kesehatan ke arah militeristik.

Dalam ketiga berita, Tempo.co yang menjadi analisis menyampaikan beberapa rekomendasi untuk menawarkan sejumlah rekomendasi yang berfokus pada perlindungan demokrasi dan reformasi institusional, yakni menyerukan Pertama, Tempo menyerukan agar pemerintah dan DPR membatalkan RUU TNI karena dinilai bermasalah secara substansi dan proses. Kedua, Tempo mendorong aparat untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap RUU tersebut. Selain itu, Tempo merekomendasikan agar agenda reformasi diarahkan pada revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai langkah untuk memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tempo juga menekankan pentingnya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan respons TNI terhadap ancaman eksternal,

serta perlunya perhatian pada keseimbangan gender dalam struktur organisasi militer.

4.2.2 Pemaknaan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co

Pemaknaan pembaca pemingkakan berita “Tolak RUU TNI, Suara Ibu Indonesia Serukan Perempuan di Seluruh Indonesia Ikut Turun ke Jalan”, “Koalisi Dosen Tolak Revisi UU TNI: Berpotensi Langgar HAM hingga Kebebasan Akademik”, “Anak Bung Hatta, Sumarsih, hingga Pegiat Demokrasi Bacakan Petisi Tolak RUU TNI” dilakukan oleh tiga generasi yaitu X, Y dan Z, dengan masing masing generasi tiga orang informan. Tiga orang informan dari setiap generasi tersebut dipilih sesuai kriteria yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah generasi X,Y dan Z yang telah membaca berita Tempo.co yang membaca berita “Tolak RUU TNI, Suara Ibu Indonesia Serukan Perempuan di Seluruh Indonesia Ikut Turun ke Jalan”, “Koalisi Dosen Tolak Revisi UU TNI: Berpotensi Langgar HAM hingga Kebebasan Akademik”, “Anak Bung Hatta, Sumarsih, hingga Pegiat Demokrasi Bacakan Petisi Tolak RUU TNI”. Preferred reading atau makna yang ingin disampaikan dari ketiga berita Tempo tersebut adalah diinginkan oleh Tempo terhadap demokrasi untuk dilakukannya pencabutan RUU TNI, serta dilakukan pembahasan Undang Undang yang lebih urgensi. Dengan menolak revisi UU TNI, Tempo tidak hanya mengkritik kebijakan tertentu, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai dasar seperti kebebasan, hak asasi manusia, akademis, dan pembatasan kekuasaan militer dalam ruang sipil.

1. Pemaknaan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co oleh Generasi X

- a. Intensitas Pengguna Media Generasi X Tabel pada bagian ini, menjelaskan mengenai intensitas informan membaca berita RUU TNI di Tempo maupun di media lainnya. Ketiga informan menjelaskan pilihannya terhadap media berita yang digunakan. Para informan memiliki pilihan yang beragam terhadap sumber atau portal berita yang sering mereka akses. Pemilihan media ini menunjukkan kebiasaan konsumsi informasi yang

dipengaruhi oleh aksesibilitas, kenyamanan, dan kepercayaan terhadap sumber informasi tersebut.

Informan 1 menyebutkan bahwa ia sering menggunakan portal berita Tempo serta platform video YouTube sebagai sumber informasi:

"Tempo sama YouTube."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Informan 1 tidak hanya mengandalkan media berbasis teks seperti portal berita daring, tetapi juga memanfaatkan media audiovisual untuk mendapatkan informasi terkini.

Sementara itu, Informan 2 mengungkapkan bahwa ia paling sering menggunakan Facebook untuk mengakses informasi:

"Kalau saya sih paling sering Facebook. Kalau Facebook itu hampir tiap hari pasti saya buka."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa media sosial masih menjadi salah satu sumber utama bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh informasi, meskipun informasi di dalamnya tidak selalu berasal dari portal berita resmi.

Adapun Informan 3 menyebutkan bahwa ia sering mengakses Kompas TV:

"Kompas TV kalau saya."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pilihan Informan 3 menunjukkan preferensi terhadap media televisi yang juga hadir dalam format digital, yaitu Kompas TV, yang dikenal sebagai salah satu media arus utama di Indonesia.

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan alasan mereka memilih media tertentu. Alasan para informan dalam memilih media sebagai sumber informasi menunjukkan berbagai pertimbangan, mulai dari keakuratan

informasi, kemudahan akses, hingga nilai-nilai keberimbangan dalam penyajian berita.

Informan 1 menyatakan bahwa ia memilih media seperti Tempo dan YouTube karena dinilai memiliki kredibilitas tinggi serta menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya:

"Karena lebih akurat, lebih up-to-date dan dapat dipercaya, jadi bukan berita yang hoax."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kepercayaan terhadap sumber berita sebagai faktor utama dalam memilih media, terutama di tengah maraknya penyebaran hoaks.

Sementara itu, Informan 2 mengungkapkan bahwa kepraktisan dan kemudahan akses menjadi alasan utama ia memilih portal-portal berita daring dibandingkan media televisi konvensional:

"Kalau saya kan sekarang yang paling praktis kan menggunakan portal-portal itu. Kalau TV sekarang udah ketinggalan. Sebenarnya kalau nonton TV kan udah malah ribet sekarang ya. Kalau ini kan sambil duduk, sambil tiduran juga bisa. Makanya kita milih yang portal-portal yang ada di internet itu."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi digital turut memengaruhi cara masyarakat mengonsumsi informasi.

Adapun Informan 3 menyoroti aspek keberimbangan dan objektivitas dalam penyajian berita sebagai alasan utama memilih Kompas TV:

"Maksudnya ya keberpihakannya ya, kepada agar masyarakat mendapat informasi yang sesuai dengan faktanya gitu. Terus dia tidak beropini ketika mengundang narasumber, dia akan mengundang narasumber lain yang pro atau yang kontra di satu sesi acara gitu ya. Jadi ada balancingnya disitu."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari kutipan ini tampak bahwa Informan 3 menilai pentingnya keberimbangan narasumber dan penyajian informasi faktual sebagai indikator kualitas media.

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan frekuensi dalam membaca atau mengakses berita. Tingkat frekuensi dalam mengakses berita oleh para informan menunjukkan bahwa konsumsi informasi menjadi bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga informan memiliki kebiasaan yang konsisten dalam mengakses berita, meskipun medianya berbeda-beda.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia hampir setiap hari mengakses berita, terutama di waktu istirahat kerja. Ia menggunakan berbagai saluran seperti televisi dan YouTube untuk mendapatkan informasi:

"Sering, hampir tiap hari di jam-jam istirahat. Kalau gak ada kegiatan, kerjaan selesai di waktu istirahat, pasti lihat TV, nonton TV, berita di TV, atau buka channel YouTube."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Kebiasaan ini mencerminkan bahwa media menjadi sarana utama bagi Informan 1 dalam mengisi waktu luang dan tetap mengikuti perkembangan isu terkini. Informan 2 menyatakan bahwa ia mengakses Facebook hampir setiap hari, sementara portal berita seperti Tempo atau Tribun dibuka hanya sesekali:

"Kalau Facebook, hampir tiap hari. Tapi kalau Tempo, ya kadang. Tempo, Tribun. Tapi yang paling sering, ya pasti buka Facebook."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun ada akses ke media berita formal, media sosial tetap menjadi sumber utama karena kemudahan dan kebiasaannya yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Informan 3 menekankan bahwa ia tidak menggunakan portal berita dalam bentuk website, melainkan lebih memilih televisi. Ia menyatakan bahwa hampir setiap hari menonton berbagai kanal berita, termasuk Kompas TV yang menurutnya netral dan informatif:

"Saya ulangi ya, bukan portal tetapi televisi ya. Portal kan ada di website itu kan. Jadi setiap hari, karena saya senang berita, saya kan melihat beberapa channel berita, mulai dari MetroTV, iNews, dan saya menganggap bahwa portal kita Kompas di KompasTV itu lebih netral ya... Kalau seberapa sering, hampir setiap hari. Setiap hari kalau saya di rumah, kalau butuh berita ya saya memutar channel KompasTV itu."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan topik berita yang sering dikonsumsi. Preferensi topik berita yang dikonsumsi oleh para informan mencerminkan ketertarikan pribadi serta kepedulian terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang. Masing-masing informan memiliki fokus perhatian yang berbeda, meskipun terdapat pola umum berupa minat terhadap isu politik dan peristiwa aktual.

Informan 1 mengungkapkan bahwa ia paling sering mengikuti perkembangan politik di Indonesia, meskipun juga sesekali mengakses konten lain seperti masakan, perhiasan, gosip, dan artis:

"Yang sering dibuka itu tentang politik yang sedang aktual, kemudian masakan, perhiasan, gosip, artis. Tapi yang sering dibuka tentang perkembangan politik di Indonesia."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki ketertarikan terhadap hiburan dan gaya hidup, topik politik tetap menjadi prioritas utama bagi Informan 1 dalam mengakses berita.

Informan 2 juga menyatakan bahwa berita yang sering ia konsumsi berkaitan dengan kejadian-kejadian di masyarakat dan pemerintahan, terutama yang tersebar melalui Facebook maupun portal berita seperti Tempo:

"Yang sering saya baca kalau di Facebook kan itu biasanya ya ada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan kan banyak. Apalagi sekarang yang kejadian itu banyak kan menggunakan Facebook itu sebagai media untuk mengkampanyekan diri kalau di pemerintahan ya. Tapi kalau di Tempo, kebanyakan

kalau di Tempo itu yang bersifat yang di pemerintah, kejadian-kejadian yang ada di pemerintahan."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa Informan 2 tertarik pada berita-berita sosial-politik, terutama yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan dan aktivitas politik.

Sementara itu, Informan 3 menekankan minatnya terhadap berita-berita terkini, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai reformasi dan arah demokrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari generasi 1998, Informan 3 memiliki kedekatan emosional terhadap isu-isu reformasi dan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi:

"Kalau saya sih interest berita-berita terkini aja, karena saya masih 98 ya, saya juga memperjuangkan berdiri dari reformasi, jadi topik-topik seperti di fyp itu sangat menarik perhatian saya. Karena sebagai mahasiswa 97-98, saya juga nggak ingin arah reformasi itu melenceng dari tujuan semula, dimana kita pengen benar-benar balik ke demokrasi Pancasila yang mensejahterakan rakyat."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa konsumsi berita oleh Informan 3 tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki muatan nilai dan sejarah pribadi yang kuat. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan respon terkait keterlibatan mereka pada pemberitaan RUU TNI Ketika ditanya mengenai keterlibatan mereka dalam mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), seluruh informan menyatakan bahwa mereka pernah atau sedang mengikuti perkembangan isu tersebut, meskipun dengan tingkat perhatian yang berbeda-beda.

Informan 1 menyampaikan bahwa ia mengetahui isu revisi UU TNI melalui berbagai saluran, baik televisi maupun platform digital seperti YouTube:

"Iya, di beberapa stasiun TV pernah lihat, dan di YouTube pernah baca juga."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Informan 1 cukup terpapar dengan pemberitaan terkait revisi tersebut melalui berbagai media, meskipun tidak dijelaskan seberapa dalam ia mengikuti isi atau substansi dari wacana revisi itu.

Informan 2 juga mengaku mengikuti pemberitaan mengenai revisi UU TNI, namun hanya secara sekilas dan tidak secara mendalam. Ia cenderung melihat informasi tersebut sambil lalu saat menonton televisi:

"Mengikuti sih, tapi tidak begitu fokus, hanya sekilas-sekilas saja lewat, ya.. paling nonton TV."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun isu tersebut sampai ke Informan 2, perhatian dan keterlibatannya dalam memahami isu tersebut masih terbatas.

Sementara itu, Informan 3 menyatakan secara eksplisit bahwa ia mengikuti pemberitaan revisi UU TNI, yang ia peroleh terutama dari TV nasional, khususnya saat berada di rumah orangtuanya:

"Iya. Saya ikuti itu melalui berita-berita yang ada di... Jujur aja, kalau di rumah orangtua kan masih suka nonton televisi nasional gitu ya. Lewat-lewat TV, TV digital. Jadi berita mengenai revisi tersebut saya dapati dari berita-berita di TV nasional."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menunjukkan bahwa media televisi masih menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi politik, terutama dalam lingkungan rumah tangga yang tetap mengandalkan media konvensional. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan portal berita yang sering mereka gunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI. Para informan memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih portal berita untuk mengikuti isu revisi Undang-Undang TNI. Meskipun semuanya pernah mengakses informasi terkait, frekuensi dan kedalaman aksesnya berbeda-beda, tergantung pada media dan waktu yang tersedia.

Informan 1 menyebutkan bahwa ia menggunakan berbagai media, baik televisi maupun daring, untuk mengikuti perkembangan isu tersebut:

"INews, TV One, Tempo, Kompas, dan di beberapa channel YouTube."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa Informan 1 bersumber pada kombinasi antara media arus utama televisi, portal berita daring, dan platform digital seperti YouTube, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

Informan 2 menyebutkan beberapa portal berita daring seperti Kompas.com dan Tempo, namun mengakui bahwa akses terhadap isu revisi UU TNI hanya dilakukan sesekali:

"Kalau portalnya sih, ya ada Kompas.com, ada Tempo, tapi ya... tidak begitu sering lah namanya kita kerjakan. Paling sekilas-sekilas, ada juga di Facebook, kan gitu."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Informan 2 tidak secara aktif mencari informasi mendalam terkait revisi UU TNI, namun tetap mendapatkan paparan informasi melalui media daring maupun media sosial seperti Facebook.

Informan 3 dengan tegas menyatakan bahwa ia mengikuti pemberitaan tersebut melalui Kompas TV, yang menurutnya menyajikan informasi secara mendalam dan lengkap dengan narasumber:

"Kalau saya sering lihatnya di Kompas TV. Kompas TV itu kan kalau berita-berita yang sedang ini ramai dikupas ya, jadi detail sampai ada narasumbernya itu yang saya ikuti portal beritanya di Kompas TV."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 3 cenderung memilih media yang menyajikan pembahasan mendalam dan berimbang, seperti yang disediakan oleh Kompas TV.

Tabel 4.8 Ringkasan Pemahaman Terhadap Intensitas Penggunaan Media.

Deskripsi	Elpi (I-1)	Martumpal (I-2)	Handoko (I-3)
Portal Berita yang Sering Digunakan	Tempo dan Youtube	Facebook	Kompas Tv
Alasan Memilih Media Tertentu	Kredibilitas tinggi serta menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya	Kepraktisan dan kemudahan akses	Keberimbangan narasumber dan penyajian informasi faktual sebagai indikator kualitas media
Frekuensi Membaca atau Mengakses Berita	Setiap hari mengakses berita, terutama di waktu istirahat kerja.	Facebook hampir setiap hari, sementara portal berita seperti Tempo atau Tribun dibuka hanya sesekali	Setiap hari menonton tayangan berita pada satasiun televisi Kompas tv
Topik Berita yang Sering Dikonsumsi	Perkembangan politik di Indonesia, masakan, perhiasan, gosip, dan artis	Berkaitan dengan kejadian-kejadian di masyarakat dan pemerintahan	Berita-berita terkini, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai reformasi dan arah demokrasi di Indonesia
Respons terhadap Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI	Mengetahui isu revisi UU TNI	Mengikuti pemberitaan mengenai revisi UU TNI, namun sekilas dan tidak secara mendalam.	Menyatakan mengikuti pemberitaan revisi UU TNI,
Portal Berita yang Digunakan untuk Mengikuti Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI	INews, TV One, Tempo, Kompas, dan YouTube	Kompas.com, Tempo, dan Facebook	Kompas TV

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa ketiga informan dari generasi X rutin untuk mengakses berita, tetapi dengan frekuensi dan kedalaman yang berbeda. Menurut Reza et al. (2024) menyebutkan meski lahir dimasa pradigital Generasi X tetap mampu mengadopsi teknologi baru, meski dengan pendekatan yang berbeda dari generasi lebih muda. Hal ini ditujukan dengan generasi X, dapat mengakses berita setiap hari dan mendalam. Informan 1 dan 3 dari generasi X

mengakses berita hampir setiap hari dan dengan cukup mendalam. Informan 2 mengakses media sosial setiap hari tetapi berita dari portal daring hanya sesekali, lebih menggunakan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa Generasi X mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, meski dengan preferensi media dan intensitas akses yang beragam.

Mudrikah (2020) menjelaskan karakteristik Generasi X dalam memanfaatkan teknologi modern, salah satu karakteristik tersebut adalah adaptif terhadap media baru, yang berarti generasi X mampu beradaptasi dan menggunakan media baru, seperti portal berita dan media sosial. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan, Informan 1 menggabungkan portal berita daring (Tempo) dan YouTube. Informan 2 lebih mengandalkan Facebook, mencerminkan peran dominan media sosial sebagai sumber informasi. Informan 3 lebih memilih media televisi digital (Kompas TV), yang dianggap lebih kredibel dan netral. Melalui pernyataan para informan tersebut, yang dimana para informan dari generasi X dapat menggunakan serta beradaptasi dengan baik dengan media baru.

Motivasi di balik pemilihan media sangat bervariasi. Kredibilitas dan keakuratan menjadi alasan utama bagi Informan 1, kemudahan akses dan kepraktisan menjadi pertimbangan utama bagi Informan 2, keberimbangan dan objektivitas berita menjadi pertimbangan utama bagi Informan 3. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Alamsyah et al. (2023) yang menjelaskan, Generasi X cenderung lebih berhati-hati dalam memilih sumber informasi, dan memverifikasi kredibilitas media. Motivasi ini menunjukkan bahwa preferensi media pada Generasi X dipengaruhi oleh kebutuhan akan informasi yang dapat dipercaya, mudah diakses, serta disajikan secara seimbang.

Dari ketiga informan menyatakan perbedaan minat, informan 1 tertarik pada perkembangan politik di Indonesia, informan 2 tertarik pada topik kejadian di masyarakat dan pemerintah dan informan 3 lebih minat kepada berita terkini terutama terhadap topik yang berkaitan dengan nilai-nilai reformasi dan arah demokrasi. Perbedaan minat ini menunjukkan bahwa preferensi topik pemberitaan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan kepedulian masing-masing informan.

Ketiga informan menyatakan mengikuti pemberitaan terkait isu revisi UU TNI. Ketiga informan mengikuti pemberitaan RUU TNI, melalui portal berita berbeda, informan 1 mengikuti melalui berbagai media, seperti televisi dan juga daring, informan 2 mengikuti melalui beberapa portal berita daring seperti Kompas.com dan Tempo, dan informan ketiga melalui stasiun televisi KompasTV.

b. Pemahaman Generasi X tentang Revisi Undang-Undang TNI

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai Selanjutnya ketiga informan menjelaskan informasi yang didapatkan olehnya setelah membaca berita RUU TNI. Dari wawancara, para informan menunjukkan pemahaman umum terhadap substansi perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI, terutama mengenai perluasan kewenangan, keterlibatan di jabatan sipil, dan penambahan usia pensiun. Meskipun tidak semuanya mendalami secara teknis, masing-masing mampu mengidentifikasi isu utama dari revisi tersebut.

Informan 1 menyampaikan cukup detail beberapa poin penting dalam revisi tersebut, termasuk aspek keamanan siber dan institusi sipil yang dapat dijabat oleh personel TNI:

"Ada perluasan wewenang, kemudian perluasan jabatan TNI di lingkup sipil, kemudian ada penambahan usia pensiun yang lumayan banyak sampai 62 tahun. Ada penambahan lembaga dan dinas yang bisa diduduki oleh TNI, kemudian tentang keamanan cyber juga bisa dipegang atau diatasi oleh TNI. Jadi di situ ada perluasan peminatan TNI."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa Informan 1 menangkap substansi utama revisi dengan baik, mencakup perubahan struktural dan fungsi militer dalam ranah sipil.

Informan 2 juga memahami poin-poin penting revisi UU TNI, meskipun dengan penyampaian yang lebih reflektif dan bernuansa kekhawatiran masyarakat:

"Kalau secara singkat sih, yang saya dengar ataupun saya lihat di media-media masa itu perubahannya TNI itu ada penambahan

keterlibatan di instansi pemerintah ya benar? ... Sekarang malah di eksekutif kan banyak terlibat, nah itu. Jadi, mungkin masyarakat khawatir nanti dengan adanya keterlibatan itu, TNI itu semakin gimana ya... tidak bisa diberikan aspirasi dari masyarakat... Ya, itu mungkin kalau sekilas yang saya ikuti gitu."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 2 memahami adanya perluasan peran TNI di luar militer, dan melihat potensi dampaknya terhadap kehidupan demokratis dan ruang partisipasi masyarakat.

Informan 3 juga mengonfirmasi pemahamannya terhadap inti revisi, khususnya dalam konteks keterlibatan TNI dalam kebijakan publik dan jabatan pemerintahan:

"Nah kalau yang saya tahu, menurut revisi Undang-Undang akan ada perluasan kewenangan TNI ya terhadap kebijakan-kebijakan publik atau jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, menurut saya."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini memperkuat temuan bahwa ketiga informan, meskipun dari sumber yang berbeda-beda, memperoleh informasi serupa terkait pokok perubahan dalam revisi tersebut. Selanjutnya pemahaman informan tentang RUU TNI. Ketiga informan menjelaskan pemahaman secara singkat mengenai isu Revisi Undang-Undang TNI. Ketika diminta menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI, para informan menunjukkan pemahaman yang beragam, mencerminkan kombinasi antara pengetahuan substantif, pandangan kritis, dan kekhawatiran terhadap implikasi sosial-politik revisi tersebut. Secara umum, terdapat pemahaman bahwa revisi ini membawa penyesuaian peran TNI di era modern, perluasan kewenangan, dan kontroversi dalam proses penyusunannya.

Informan 1 menekankan bahwa revisi ini berkaitan dengan modernisasi tugas TNI, termasuk dalam menghadapi tantangan baru seperti keamanan siber dan geopolitik global:

"Sebenarnya isu revisi itu, di situ ada penyesuaian tugas TNI ke yang lebih modern lagi. Karena sekarang tingkat teknologi sudah semakin canggih, sehingga TNI perlu menyesuaikan tugasnya di era modern termasuk dalam hal cyber... ada penambahan tugas militer selain perang... seperti penambahan lembaga-lembaganya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Dari penjelasan ini terlihat bahwa Informan 1 memiliki pemahaman substansial terkait esensi revisi, yaitu penyesuaian peran TNI di luar perang serta penguatan peran strategisnya dalam bidang teknologi dan kelembagaan.

Sementara itu, Informan 2 menyoroti aspek prosedural dan transparansi publik, khususnya terkait lokasi perumusan RUU yang dinilai janggal karena tidak dilakukan di gedung DPR seperti biasa:

"Kalau perumusan RUU TNI itu kan dilaksanakan di, kalau nggak salah bukan di Senayan, di hotel ya, jadi sepertinya menimbulkan pertanyaan... ada kesan tergesa-gesa atau ngumpet gitu lah."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menandakan bahwa Informan 2 memiliki kecurigaan terhadap proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Informan 3 menyoroti isu bentrokan kepentingan antara sipil dan militer, terutama terkait perebutan jabatan strategis dalam pemerintahan:

"Isunya itu ada bentrokan kepentingan ya antara masyarakat sipil dan TNI... ada kekhawatiran apabila jabatan-jabatan strategis yang harusnya dipercayakan kepada sipil ternyata dialihkan ke TNI... jadi memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian tugas di situ."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa Informan 3 memahami isu revisi UU TNI sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pemahamannya mengenai Pasal-Pasal Revisi Undang-Undang TNI. Ketika diminta menjelaskan

pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI, seluruh informan mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti nomor pasal yang direvisi, meskipun memahami secara umum substansi perubahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses dan pemahaman publik terhadap dokumen hukum secara teknis, meskipun mereka tetap mengikuti isu secara substantif melalui media.

Informan 1 dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak menghafal pasal-pasal yang direvisi, tetapi mampu menjelaskan beberapa inti perubahan yang mencolok:

"Enggak hafal sih, saya tidak hafal. Pasal-pasalnya tidak hafal yang mengalami revisi, tapi jelas disitu banyak revisi-revisi... ada perluasan jabatan TNI ke lembaga-lembaga sipil, ada penambahan usia pensiun, terus ada TNI juga bisa menangani kejahatan cyber."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 1 memahami konteks perubahan secara substansial, tetapi tidak memiliki pengetahuan teknis terhadap struktur pasal dalam UU.

Informan 2 juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menyebutkan pasal secara spesifik karena belum pernah melihat atau membandingkan secara langsung naskah UU lama dan hasil revisinya:

"Kalau itu mah saya tidak bisa ya, paling secara umum saja... Kita harus sebandingkan antara yang lama dengan yang baru. Terus terang saya belum pernah lihat yang lamanya, terus yang barunya kemana, terus dibandingkan. Itu saya belum bisa jawab."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan keterbatasan literasi hukum, meskipun Informan 2 menyadari bahwa kajian yang lebih mendalam memerlukan pembacaan naskah resmi yang komparatif.

Informan 3 mencoba mengaitkan perubahan pasal dengan substansi kewenangan TNI di lembaga sipil, meskipun tidak menyebutkan nomor pasal tertentu:

"Nah kalau yang menurut saya baca itu, hm... pasal-pasal yang berubah itu seperti... ada beberapa lembaga yang sebelumnya kewenangannya itu diberikan kepada masyarakat sipil... seperti kejaksaan agung gitu ya, tentunya sebaiknya diberikan kepada masyarakat sipil, jangan diberikan kepada TNI."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Meski tidak eksplisit, pernyataan ini mengacu pada pasal-pasal yang memungkinkan personel TNI aktif menempati jabatan sipil, yang menjadi salah satu kontroversi dalam revisi UU TNI. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan sikap mereka terhadap RUU TNI. Ketiga informan memberikan pandangan yang relatif beragam dan nuansa terhadap revisi Undang-Undang TNI. Meskipun ada yang menyatakan secara langsung mendukung, ada pula yang menyampaikan dukungan bersyarat, serta pandangan kritis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap supremasi sipil.

Informan 1 secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap revisi tersebut, dengan alasan bahwa TNI perlu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang lebih kompleks, tidak hanya terbatas pada perang fisik:

"Setuju, karena melihat perkembangan zaman sekarang teknologi semakin canggih... Artinya tidak hanya tugas militer mengangkat senjata saja, tetapi TNI bisa dipekerjakan, bisa diaktifkan di sektor-sektor atau lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya sih setuju terhadap revisi Undang-Undang TNI."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap modernisasi fungsi TNI, termasuk pelibatan di sektor-sektor non-militer.

Informan 2 juga menyatakan setuju secara prinsipil, dengan catatan bahwa revisi harus membawa manfaat bagi rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu:

"Pada prinsipnya sih saya setuju-setuju aja ya. Yang namanya revisi itu kan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya."

Asalkan... revisinya itu revisi yang positif, yang itu demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sikap ini menunjukkan bentuk dukungan yang bersyarat, yaitu jika revisi tersebut dilakukan secara objektif dan berpihak pada kepentingan publik. Sementara itu, Informan 3 menyatakan sikap kritis dan ambivalen, dengan alasan kekhawatiran terhadap potensi dominasi militer atas jabatan publik. Ia membedakan antara jabatan yang wajar diduduki oleh militer dan yang seharusnya tetap di tangan sipil:

"Nah pertanyaan setuju atau setuju, secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju apabila jabatan-jabatan publik yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat sipil tapi diambil oleh TNI. Tapi kalau misalnya jabatan-jabatan yang memerlukan strategi, struktur, atau kompetensi dari TNI itu saya setuju. Jadi ada hal yang setuju, ada hal yang tidak setuju disitu ya."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mengungkapkan adanya sikap kritis selektif, yang menimbang risiko historis dan politik terhadap keseimbangan sipil-militer, mengingat pengalaman reformasi tahun 1998. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan sikap seharusnya yang diberikan oleh Masyarakat dan pemerintah terkait RUU TNI. Terkait dengan bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI, para informan memberikan pandangan yang mencerminkan beragam pendekatan: dari penerimaan pasif, pengawalan aktif, hingga pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Informan 1 menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya menerima keputusan pemerintah, karena pemerintah sudah dipilih secara sah melalui mekanisme demokrasi. Baginya, sikap terbaik adalah mengikuti arah kebijakan pemerintah:

"Kalau menurut pendapat saya sih seharusnya, namanya pemerintah kan sudah dipilih melalui demokrasi, pemilu yang sah dan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah yaudah kita

ikutin aja, gak usah nolak, gitu... seharusnya masyarakat menerima terhadap perubahan itu."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan sikap pasif-reseptif, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam mengambil keputusan, tanpa tuntutan partisipasi lebih lanjut dari masyarakat.

Berbeda dari itu, Informan 2 mengajak masyarakat untuk bersikap positif tetapi tetap kritis, dengan menyalurkan aspirasi secara konstruktif, terutama jika revisi tersebut menyangkut kepentingan rakyat:

"Sebagai masyarakat kita harus bersikap positif lah, namanya perubahan... cuma kita sebagai rakyat Indonesia tetap mengawal bagaimana isi dari revisi Undang-Undang tersebut. Bisa disampaikan lewat DPR, aspirasi kita, sepanjang itu masih mengutamakan kepentingan rakyat."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sikap ini menunjukkan bentuk dukungan aktif dan bertanggung jawab, di mana masyarakat tetap memberi ruang pada pemerintah untuk bertindak, namun tidak melepaskan fungsi pengawasan publik.

Informan 3 menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterbukaan pemerintah dalam menyosialisasikan isi revisi UU TNI kepada masyarakat.

Ia mendorong adanya dialog publik melalui berbagai jalur komunikasi yang dipercaya:

"Menurut saya sih harus ada partisipasi aktif ya dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Untuk melakukan diskusi publik atau sosialisasi melalui berbagai kanal ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menekankan pembentukan ruang deliberatif, agar proses revisi tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitim secara sosial dengan melibatkan pemahaman publik.

Tabel 4.9 Ringkasan Pemahaman tentang Revisi Undang-Undang TNI

Deskripsi	Elpi (I-1)	Martumpal (I-2)	Handoko (I-3)
Informasi Baru yang Diperoleh Terkait Revisi Undang-Undang TNI	Dapat menyampaikan cukup detail terkait RUU TNI	Dapat memahami poin-poin penting revisi UU TNI,	Dapat memahami poin poin penting terhadap RUU TNI
Pemahaman Singkat Informan tentang Isu Revisi Undang-Undang TNI	Memiliki pemahaman terkait RUU TNI	Memilik pemahana terkait isu RUU TNI	Memiliki pemahaman terkait RUU TNI
Permasalahan yang Muncul Terkait Revisi Undang-Undang TNI	Dapat menjelaskan masalah yang timbul terkait isu RUU TNI	Dapat menjelaskan masalah yang timbul terkait isu RUU TNI	Dapat menjelaskan masalah yang timbul terkait isu RUU TNI
Pemahaman Terhadap Pasal-Pasal Revisi Undang-Undang TNI	Tidak dapat menyebutkan pasal-pasal yang di revisi namun dapat menjelaskan	Tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan pasal-pasal yang di revisi	Tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan pasal-pasal yang di revisi
Sikap Terhadap Revisi Undang-Undang TNI	Menyatakan persetujuannya terhadap revisi tersebut	menyatakan setuju secara prinsipil, dengan revisi tersebut	menyatakan sikap setuju dalam beberap hal terikait revisi tersebut
Sikap yang Seharusnya Diberikan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI	Menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya menerima keputusan pemerintah	mengajak masyarakat untuk bersikap positif tetapi tetap kritis,	Meminta masyarakat aktif dan pemerintah melakukan diskusi dan sosialisasi

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa ketiga informan tingkat pemahaman mereka terhadap isu tersebut bervariasi. Informan 1 memahami poin-poin teknis secara cukup detail, Informan 2 menunjukkan pemahaman umum

disertai kekhawatiran, sedangkan Informan 3 lebih menyoroti isu perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil. Variasi ini dapat dipahami mengingat Generasi X, menurut Putra (2016), yang menjadi latar belakang ketiga informan, tumbuh di masa awal globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Era tersebut membentuk pola pikir mereka serta memengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap dan menafsirkan informasi di tengah dunia yang semakin dinamis dan kompleks.

Ketiga informan dari generasi X menunjukkan dapat menjelaskan pemahaman yang penting terkait RUU TNI, dengan menyebutkan terjadinya kewenangan TNI, pelibatan TNI dalam jabatan sipil, penambahan usia pensiun, dan Keterlibatan dalam keamanan siber. Mudrikah (2020) menjelaskan karakteristik Generasi X dalam memanfaatkan teknologi modern, salah satunya adalah kritis dan selektif yaitu Generasi X biasanya bersikap kritis dan berhati-hati saat menyampaikan pendapat, karena khawatir pendapat mereka bisa menyinggung orang lain. Sikap ini menunjukkan adanya kekhawatiran emosional terhadap reaksi sosial yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan kecenderungan mereka untuk memahami isu secara mendalam sebelum mengambil sikap.

Namun dari ketiga informan tidak dapat menyebutkan pasal-pasal yang direvisi. Ketiga informan menyoroti permasalahan yang terjadi saat adanya RUU TNI, informan 1 menyoroti pembahasan RUU TNI yang terburu-buru dan minimnya pelibatan publik, informan 2 menyoroti kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru dan informan 3 menyoroti tidak adanya waktu yang cukup untuk rakyat memahami isi revisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman informan terhadap isu cukup baik, mereka lebih fokus pada dampak dan proses politik dibanding aspek legal formal. Ketidaktahuan terhadap pasal-pasal spesifik dapat mencerminkan keterbatasan akses informasi yang mudah dipahami oleh publik.

Para informan menunjukkan sikap yang beragam terhadap revisi UU TNI dan peran masyarakat maupun pemerintah dalam menyikapinya. Informan 1 mendukung penuh revisi sebagai bentuk adaptasi modern, sementara Informan 2 memberikan dukungan bersyarat selama revisi tidak digunakan untuk kepentingan

elite tertentu. Informan 3 bersikap kritis selektif: menolak dominasi TNI dalam jabatan sipil, tetapi terbuka terhadap pelibatan TNI di sektor strategis yang relevan. Perbedaan sikap ini juga tercermin dalam pandangan mereka terhadap peran masyarakat. Informan 1 cenderung pasrah terhadap keputusan pemerintah, Informan 2 mendorong pengawasan serta penyaluran aspirasi melalui jalur formal, dan Informan 3 menekankan pentingnya partisipasi aktif, sosialisasi terbuka, dan diskusi publik.

c. Pemahaman Generasi X tentang TNI pada Era Orde Baru

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai pemahaman informan mengenai TNI masa orde baru. Ketiga informan menjelaskan pengalaman mengalami masa orde baru, mereka menyatakan bahwa mereka pernah mengalami masa Orde Baru, yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pengalaman tersebut menjadi konteks penting dalam memahami pandangan mereka terhadap isu-isu militerisme dan demokrasi, termasuk dalam menyikapi revisi Undang-Undang TNI. Informan 1 menjawab singkat dan tegas bahwa ia pernah mengalami masa tersebut:

"Iya saya pernah."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan bahwa ia lahir pada masa Orde Baru, sehingga otomatis menjadi bagian dari generasi yang mengalami pemerintahan saat itu:

"Karena saya lahir pada masa Orde Baru, pastinya pernah."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 menjawab dengan nada yakin dan mantap:

"Tentu saja saya pernah mengalami masa Orde Baru."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya, ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap militerisme di masa orde baru, Para informan secara umum menggambarkan masa Orde Baru sebagai era di mana militer memiliki dominasi kuat dalam pemerintahan dan kehidupan sosial-politik, sehingga membatasi kebebasan sipil dan mempersempit ruang demokrasi. Pengalaman pribadi dan pengamatan mereka menunjukkan bahwa militerisme saat itu bukan hanya struktur kekuasaan, tetapi juga budaya ketakutan yang memengaruhi masyarakat luas.

Informan 1 menyampaikan bahwa militerisme Orde Baru ditandai oleh keberadaan Daerah Operasi Militer (DOM) dan kontrol militer terhadap daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuasaan negara. Ia mencontohkan Aceh dengan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM):

"Militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru itu banyak sekali. Ada DOM, daerah operasi militer... pemerintah menyisir daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuatan notroiter pada waktu itu... militer memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan... sehingga militer mendominasi pemerintahan di Indonesia."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan struktur kekuasaan militer yang represif, di mana militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga menjadi alat politik untuk mempertahankan rezim.

Informan 2 menekankan ketakutan masyarakat terhadap militer, terutama akibat pelaksanaan dwifungsi ABRI, yang menjadikan militer bukan hanya alat keamanan, tetapi juga bagian dari struktur pemerintahan sipil:

"Militer sangat ditakuti pada masa Orde Baru sehingga kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat kurang maksimal. Karena keterlibatan TNI dalam unsur pemerintahan sebagai dwifungsi ABRI."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa militerisme bukan hanya masalah struktural, tetapi juga menekan hak-hak sipil masyarakat, seperti kebebasan berpendapat dan berserikat.

Informan 3 mengisahkan pengalaman pribadi tentang bagaimana kebebasan berekspresi dan berserikat sangat terbatas. Ia menggambarkan suasana represif di mana orang-orang yang vokal dapat "lenyap", dan bahkan guru diarahkan memilih kandidat tertentu dalam pemilu:

"Yang saya alami di zaman Orde Baru, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan ide-ide itu tidak bisa dilakukan... kekuatan militer itu besar untuk mempengaruhi keamanan... bahkan saya kan anak guru ya, guru aja digiring pada saat pemilu harus memilih calon tertentu... karena dicek."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa militerisme Orde Baru telah mempengaruhi hingga ke level individu dan keluarga, menciptakan iklim ketakutan yang mengekang kebebasan politik warga negara. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap dwifungsi ABRI pada masa orde baru. Para informan sepakat bahwa dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru merupakan salah satu ciri utama dari dominasi militer dalam sistem pemerintahan saat itu. Meskipun ada yang melihatnya sebagai bentuk kebutuhan stabilitas pada masa itu, mayoritas menyoroti dampaknya terhadap pembatasan kebebasan sipil, penyalahgunaan kekuasaan, dan berkurangnya peran sipil dalam pemerintahan.

Informan 1 menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, ABRI tidak hanya berfungsi sebagai aparat pertahanan dan keamanan, tetapi juga mengisi berbagai posisi di sektor sipil, seperti dosen, dokter, hingga kontraktor. Ia memandang dwifungsi ini sebagai bagian dari strategi Trilogi Pembangunan yang menekankan tertib sosial sebagai prasyarat pembangunan:

"Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru... ABRI juga memegang jabatan-jabatan sipil. Tapi menurut saya, karena memang situasi pada saat itu dibutuhkan kemiliteran, jadi cocok... yang pertama adalah tertib dulu, nah untuk menertibkan situasi pada saat itu dibutuhkan militer."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang menerima dwifungsi sebagai kebutuhan zaman, terutama dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Sebaliknya, Informan 2 menyoroti dampak negatif dwifungsi ABRI terhadap kebebasan sipil, khususnya karena banyak posisi pemerintahan penting seperti gubernur diisi oleh militer, yang cenderung membawa pendekatan koersif:

"Jelas memang dwifungsi itu kenapa ditolak kemarin, karena... kita kurang bebas berpendapat... misalnya gubernur dari TNI, itu kan pasti masih ada keterkaitannya dengan lembaga dia sebelumnya... dia lebih menggunakan strategi TNI daripada sipil."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari sudut pandang ini, dwifungsi dianggap mengaburkan batas antara militer dan sipil, dan menciptakan sistem pemerintahan yang represif dan tidak inklusif terhadap aspirasi masyarakat.

Informan 3 memberikan pandangan yang reflektif dan kritis, dengan menyoroti bagaimana dwifungsi berjalan secara tersirat, meskipun tidak selalu tertulis secara formal dalam kebijakan. Ia menilai bahwa sistem komando militer menyebabkan instruksi kekuasaan berjalan efektif secara struktural, namun sulit diawasi:

"Praktik dwifungsi... ada yang menyalahgunakan walaupun itu tidak tersurat ya, tersirat... karena militer itu kan dia struktural dan modelnya perintah... walaupun tidak ada instruksi surat SK, itu tetap berlangsung... bisa mendelegasikan kekuasaan."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana struktur militer yang hirarkis dan tertutup memungkinkan praktik kekuasaan tanpa akuntabilitas publik, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Selanjutnya Ketiga informan memaknai masa Orde Baru secara berbeda. Informan 1 melihatnya sebagai masa yang aman, tertib, dan terkendali dibandingkan kondisi sekarang. Informan 2 menyoroti keterbatasan kebebasan

berpendapat dan menilai era reformasi lebih baik dalam hal ekspresi. Sementara itu, informan 3 memandang Orde Baru sebagai masa yang mencekam karena ketimpangan sosial dan dominasi kekuasaan oleh segelintir elite.

Informan 1 Orde Baru sebagai masa yang aman dan tertib, Informan memandang masa Orde Baru secara positif karena kondisi sosial dianggap lebih aman, tertib, dan terkendali dibandingkan dengan masa kini. Ia membandingkan kondisi kriminalitas masa lalu dan masa kini, serta menilai bahwa pengawasan negara terhadap penampilan fisik menjadi simbol ketertiban. Tidak ada pengalaman langsung akan represi, dan justru merasakan stabilitas keamanan sebagai hal utama.

“Melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI, kalau menurut saya sih aman-aman saja, oke-oke saja, karena justru menurut saya yang hidup di masa Orde Baru dibandingkan dengan kondisi sekarang itu lebih aman zaman dulu. Jaman dulu itu enggak ada begal, tidak ada kriminalisme. Jaman dulu itu lebih baik, menurut saya jaman sekarang dengan jaman dulu lebih aman, jaman dulu lebih tertib, lebih terkendali jaman dulu. Jaman dulu tidak ada pemuda yang bertato rambut gondrong pakai anting, itu tidak ada. Sampai ke hal fisik saja diperhatikan, apalagi ke keamanan-keamanan tentang penculikan-penculikan yang jaman sekarang organ tubuh didual, gitu-gitu. Dulu itu lebih takut ke, lebih seramnya alam, kayak genderuwo, setan, seperti itu, daripada takut ke manusia. Kalau sekarang kan lebih takut ke manusia, kejahatan, daripada yang jaman dulu yang masih seram, hutan-hutan seperti itu. Jadi menurut saya, saya melewati jaman Orde Baru sih baik-baik saja. Justru jaman dulu itu lebih terkendali, lebih tertib, lebih aman dibandingkan jaman sekarang.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Informan 2 Orde Baru sebagai masa pembatasan kebebasan berpendapat. Meskipun tidak mengalami kekerasan langsung, informan menilai Orde Baru sebagai periode yang membatasi ekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Ia menyadari adanya rasa takut terhadap ketidaksepahaman yang bisa berujung pada intimidasi atau penghilangan. Dibandingkan sekarang, informan melihat kondisi kebebasan di era reformasi jauh lebih baik dan terbuka.

"Yang kita tahu kayak banyak orang bilang menyeramkan, banyak orang bilang dikit-dikit ntar orang hilang gitu. Itu loh kalau pengalaman saya ya Orde Baru itu ya sedikit kebebasan kita untuk berpendapat itu ya apa namanya dibatasi, terbatas gitu. Beda dengan sekarang. Kalau dulu apa-apa sedikit kan langsung dikatakan tidak sepaham lah apalah kan gitu. Kalau sekarang coba dibandingkan dengan sekarang, sekarang itu kita udah termasuk bebas banget gitu. Udah sekarang itu lebih bagus daripada berbandingkan Orde Baru. Itu dalam hal menyampaikan pendapat ya. Ya kalau dalam hal lainnya mungkin diperluka perbaikan. "

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 Orde Baru sebagai masa ketimpangan sosial dan kekhawatiran masa depan Informan memaknai Orde Baru sebagai masa yang mencekam, terutama karena kekuasaan ekonomi dan politik yang tersentral pada elite dan kerabat penguasa. Ia merasa khawatir tentang masa depan karena sistem yang oligarkis dan timpang. Ketimpangan distribusi kesejahteraan membuat masyarakat biasa merasa tidak punya peluang besar dalam hidup.

"Jadi zaman order baru ketika saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah ya, walaupun setara perkembangan tingkatan pendidikan tentunya semakin tahu gitu, oh seperti apa sih situasi kesejahteraan masyarakat, sistem politik seperti apa, saya merasakan memang ada sedikit mencekam ya, mencekam dalam arti sekolah kan nanti kalau saya lulus kuliah sudah besar, kondisinya mau seperti apa, ada kekhawatiran gitu, karena memang pembagian kue kesejahteraan itu hampir kita sebutnya monopoli oligarki gitu ya, kekuasanya ya ke tangan-tangan penguasa itu aja gitu kan, sehingga masyarakat yang tidak dekat dengan kekuasaan mempunyai kekhawatiran untuk nanti kalau sudah misalnya kerja saya jadi apa gitu kan, karena hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan ekonomi lebih besar dibanding jumlah penduduk Indonesia, walaupun sampai sekarang juga masih sih, tapi dulu itu lebih kentara lagi seperti itu, kita tahu banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai hanya oleh kerabatnya, anaknya gitu diberikan kepada itu ."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Tabel 4.10 Ringkasan Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

Deskripsi	Elpi (I-1)	Martumpal (I-2)	Handoko (I-3)
Pengalaman Mengalami Masa Orde Baru	Pernah mengalami	Pernah mengalami	Pernah mengalami
Pandangan Terhadap Militarisme di Masa Orde Baru	Menyatakan militerisme ditandai oleh keberadaan Daerah Operasi Militer (DOM) dan kontrol militer terhadap daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuasaan negara.	Menyatakan militerisme menekankan ketakutan masyarakat terhadap militer	Menyatakan militerisme bagaimana kebebasan berekspresi dan berserikat sangat terbatas
Pandangan terhadap Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru	menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, TNI juga mengisi berbagai posisi di sektor sipil	menyoroti dampak negatif dwifungsi ABRI terhadap kebebasan sipil	Menjelaskan dwifungsi TNI berjalan secara tersirat
Pengalam melewatinya zaman orde baru	Merasa masa Orde Baru lebih aman dan tertib dibandingkan sekarang,	Menganggap Orde Baru membatasi kebebasan berpendapat.	Melihat Orde Baru sebagai masa yang mencekam

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa ketiga orang Informan menjelaskan mengalami secara langsung masa Orde Baru dan menjadikannya sebagai pengalaman historis yang membentuk kesadaran politik mereka. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Generasi X merupakan individu yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980, atau berusia 45–60 tahun pada tahun 2025. Pengalaman hidup di masa pemerintahan yang otoriter membuat mereka lebih sensitif terhadap isu-isu militerisme dan demokrasi. Hal ini turut memengaruhi cara mereka memaknai revisi RUU TNI yang dinilai berpotensi mengancam nilai-nilai reformasi.

Generasi X merasakan era 1970-an yang penuh gejolak dan 1980-an yang penuh ketidakpastian, yang terjadi selama masa kanak-kanak dan remaja mereka (Alamsyah et al., 2023). Di Indoensia, Generasi X dimulai ketika peralihan dari

Orde Lama ke Orde Baru, ditandai oleh peristiwa G30S/PKI dan penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto. Dengan hal tersebut informan generasi X dapat menjelaskan terkait pelaksanaan Militerisme dan dwifungsi TNI yang terjadi pada masa itu. Informan 1 menjelaskan bahwa militerisme ditandai oleh keberadaan Daerah Operasi Militer (DOM) dan kontrol militer terhadap daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuasaan negara. Informan 2 menjelaskan militerisme yang terjadi ketakutan masyarakat terhadap militer, terutama akibat pelaksanaan dwifungsi ABRI, yang menjadikan militer bukan hanya alat keamanan, tetapi juga bagian dari struktur pemerintahan sipil. Informan 3 menjelaskan militerisme dengan mengisahkan pengalaman pribadi tentang bagaimana kebebasan berekspresi dan berserikat sangat terbatas. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman hidup ini memberi kontribusi besar terhadap sikap kritis mereka terhadap revisi RUU TNI. Mereka cenderung menilai kebijakan militer melalui lensa historis yang dipenuhi trauma dan kewaspadaan terhadap kekuasaan absolut.

Sementara itu informan generasi X menjelaskan dwifungsi TNI yang terjadi pada masa orde baru, informan 1 menjelaskan bahwa TNI mengisi ruang-ruang sipil dengan tujuan Trilogi Pembangunan, informan 2 menjelaskan dwifungsi TNI yang terjadi pada masa orde baru dengan menyatakan hilangnya kebebasan sipil dan informan 3 menjelaskan dwifungsi TNI yang terjadi pada masa itu tersirat bagaimana struktur militer yang hirarkis dan tertutup memungkinkan praktik kekuasaan tanpa akuntabilitas publik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa para informan masih mengingat jelas peran ganda TNI di masa lalu. Pengalaman tersebut membuat mereka lebih waspada terhadap kebijakan yang memberi TNI peran di luar bidang pertahanan.

Generasi X mengalami masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Pemerintahan ini menekankan stabilitas nasional dan pembangunan melalui GBHN dan REPELITA, namun dijalankan dengan gaya pemerintahan otoriter militeristik. Pada masa itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi, pemilu hanya diikuti oleh dua partai dan satu golongan dengan kemenangan mutlak selalu diraih oleh Golkar, serta jabatan strategis dikuasai oleh elite penguasa. Bahkan, seluruh aparatur sipil negara

diwajibkan mengenakan atribut Golkar sebagai bentuk dukungan politik yang dipaksakan (Shahreza, 2017). Pengalaman hidup dalam konteks politik semacam ini membentuk memori dan penilaian yang berbeda-beda di kalangan Generasi X. Hal ini terlihat dari sikap ketiga informan terhadap masa Orde Baru. Informan 1 merasa masa tersebut lebih aman dan tertib dibandingkan dengan kondisi saat ini, terutama karena rendahnya angka kriminalitas dan adanya kontrol sosial yang kuat. Sebaliknya, Informan 2 menganggap Orde Baru sebagai era yang mengekang kebebasan berpendapat dan menilai bahwa situasi saat ini lebih demokratis dan terbuka. Sementara itu, Informan 3 menggambarkan Orde Baru sebagai masa yang mencekam karena adanya ketimpangan sosial dan dominasi kekuasaan oleh kalangan tertentu. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bagaimana latar belakang sosial dan pengalaman hidup selama masa Orde Baru membentuk cara informan memaknai stabilitas, kebebasan, dan kekuasaan dalam konteks kontemporer.

d. Posisi Pemaknaan Generasi X

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai pemaknaan pembingkaiannya pemberitaan revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co. Ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap kekhawatiran publik atas pembahasan Revisi UU TNI. Para informan Ketika ditanya apakah mereka setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik—seperti yang diberitakan oleh Tempo.co—para informan memberikan pandangan yang beragam. Jawaban mereka mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap proses legislasi, pengalaman masa lalu, serta persepsi terhadap peran militer di ranah sipil.

Informan 1 menyatakan tidak setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI perlu menimbulkan kekhawatiran publik. Ia justru menilai bahwa masyarakat seharusnya menunggu implementasinya terlebih dahulu sebelum bersikap, dan menyarankan untuk melihat sisi positif dari peran militer:

"Tidak lah, seharusnya publik jangan merasa panik, khawatir, kan belum diterapkan... kita lihatnya jangan yang negatifnya... TNI itu kan kedisiplinnya tinggi, kinerjanya lebih... Jadi menurut saya kekhawatiran publik sebenarnya tidak harus khawatir dulu, tapi diterapkan dulu, lihat hasilnya bagaimana."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan pendekatan pro-stabilitas dan cenderung menilai penguatan peran militer sebagai solusi ketertiban sosial, terutama dibandingkan kelemahan birokrasi sipil.

Informan 2, sebaliknya, menyatakan sangat setuju bahwa kekhawatiran publik itu beralasan. Ia menyoroti aspek prosedural dan transparansi dalam proses pembahasan revisi UU yang dianggap janggal dan tidak biasa:

"Setuju banget. Menjadi sumber kekhawatiran. Kenapa? Tadi dari segi pelaksanaannya kita kan kurang transparan... Kenapa mesti di hotel?... terkesan seperti tergesa-gesa. Akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menekankan bahwa kurangnya akuntabilitas dan proses terbuka menjadi pemicu utama keresahan masyarakat, bukan semata isi revisi itu sendiri.

Informan 3 juga menyatakan tidak setuju bahwa pembahasan itu seharusnya menimbulkan kekhawatiran, karena justru menganggapnya sebagai langkah penting untuk evaluasi dan keterbukaan publik:

"Kalau saya tidak setuju sih. Justru pembahasan itu penting ya, penting untuk dilakukan sehingga seluruh masyarakat bisa tahu hal-hal apa yang menjadi concern atau menjadi perhatian, kemudian apa yang harus diperbaiki dari Undang-Undang TNI tersebut."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari sudut pandang ini, keterlibatan publik dalam proses pembahasan merupakan hal yang positif dan sehat dalam demokrasi, selama dilakukan secara inklusif. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap urgensi Revisi Undang-Undang TNI. Ketiga informan menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa revisi UU TNI tidak memiliki urgensi. Justru, menurut mereka, perubahan tersebut dipandang

mendesak dan relevan dengan perkembangan situasi politik, ekonomi, keamanan global, dan tantangan zaman. Meskipun mereka menyetujui bahwa revisi itu penting, masing-masing tetap memberikan catatan tentang cara dan arah revisi tersebut dijalankan.

Informan 1 menilai bahwa kondisi sosial-politik dan ekonomi Indonesia saat ini membuat revisi UU TNI mendesak. Ia memandang bahwa peran TNI perlu diperluas untuk menjaga stabilitas dalam negeri di tengah isu-isu yang memicu keresahan publik:

"Urgensi, menurut saya. Karena Indonesia itu, apalagi sekarang yang dinamika politik kita sedang kacau balau... Indonesia juga utangnya di atas Rp8.000 triliun... jadi sudah, ya urgent... kekuatan TNI sudah waktunya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga, ke dinas-dinas, untuk melindungi sipil."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menekankan bahwa urgensi revisi tidak hanya dilihat dari sudut kelembagaan, tetapi juga dari kebutuhan untuk merespons kompleksitas nasional dan global saat ini.

Informan 2 juga menyetujui adanya urgensi revisi, dengan alasan bahwa undang-undang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk peran baru TNI di era teknologi dan geopolitik:

"Saya setuju bahwa revisi itu perlu urgensi... karena undang-undang itu harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman... TNI sekarang kerjanya bukan hanya untuk perang kan... tapi tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan institusi."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Di sini, Informan 2 menekankan pentingnya revisi yang berorientasi pada rakyat, bukan sekadar memperkuat kekuasaan institusi militer.

Informan 3 pun menyatakan bahwa ia tidak setuju jika dikatakan revisi tidak memiliki urgensi. Menurutnya, kebutuhan revisi memang ada, namun harus diimbangi dengan ruang partisipasi publik yang cukup:

"Kalau urgensi sih, iya memiliki. Jadi saya tidak setuju ya kalau dibilang pembahasan itu tidak memiliki urgensi... hanya tinggal mekanisme dan jeda waktunya aja yang perlu diberikan... urgensinya ya perlu, perlu cepat."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa substansi revisi bisa dianggap penting, tetapi prosesnya tetap harus demokratis, inklusif, dan transparan. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap usulan pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer). Para informan Ketika ditanya apakah setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas atau merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer seperti yang disampaikan dalam pemberitaan Tempo.co, seluruh informan tidak setuju, dengan berbagai alasan. Mereka menilai bahwa belum ada urgensi untuk merevisi undang-undang tersebut saat ini, karena sistem yang ada dinilai masih relevan atau lebih baik diprioritaskan pada revisi UU TNI terlebih dahulu.

Informan 1 menolak usulan pembahasan UU 31/1997 karena menurutnya peradilan militer sudah berjalan ideal. Ia menekankan bahwa usia undang-undang yang baru sekitar 27 tahun belum cukup lama untuk dinilai perlu direvisi:

"Tidak usah. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 kan tentang peradilan militer... Menurut saya undang-undang ini tidak harus dibahas atau direvisi. Karena baru berjalan selama 27 tahun... peradilan militer menurut saya sudah cukup ideal."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan keyakinan terhadap stabilitas dan efektivitas sistem peradilan militer saat ini, serta anggapan bahwa belum ada perubahan konteks yang cukup mendesak.

Informan 2 juga tidak setuju jika pembahasan UU Peradilan Militer dianggap prioritas saat ini. Ia lebih mengkhawatirkan keterlibatan militer dalam sektor sipil, dan menganggap revisi peradilan militer tidak akan banyak mengubah dinamika tersebut:

"Kalau misalnya revisi ini dilaksanakan kan tetap ada propam peradilan militer. Jadi TNI itu tinggal bisa ya, semena-mena sebenarnya... Yang saya takutkan itu tadi, jangan terlalu banyak keterlibatan di sipil."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran utama bukan pada mekanisme peradilan internal TNI, melainkan pada potensi ekspansi peran militer ke ranah sipil.

Informan 3 memberikan argumen yang lebih konseptual, bahwa UU Peradilan Militer bersifat spesifik, dan belum mendesak untuk dibahas sebelum UU TNI sebagai induknya ditangani terlebih dahulu:

"Kalau ditanya setuju atau tidak pemerintah sebaiknya membahas itu, urgensinya... peradilan militer itu belum urgen menurut saya... kalau kita mau membahas, baratnya bagian yang umum dulu baru yang spesifik."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa dari perspektif kebijakan, pembahasan sebaiknya difokuskan dulu pada UU TNI yang lebih luas cakupannya, sebelum masuk ke ranah teknis dan internal seperti peradilan militer.

Ketika ditanya apakah mereka setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik, sebagaimana dikemukakan dalam pemberitaan Tempo.co, dua dari tiga informan menyatakan tidak setuju, sementara satu informan menyatakan setuju. Perbedaan ini menunjukkan adanya beragam persepsi tentang sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan bagaimana akses terhadap informasi serta ruang publik dipandang dalam konteks demokrasi saat ini. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan RUU TNI dapat mengancam partisipasi publik. Informan 1 menyatakan tidak setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik. Ia menekankan bahwa konstitusi masih menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, baik melalui demonstrasi maupun jalur formal:

"Tidak... publik masih boleh mengemukakan pendapat, bebas... apakah lewat demonstrasi yang aman, atau melalui sarana lain, seperti anggota Dewan... dalam UUD 45, pasal 28 ada jaminan kebebasan... jadi tidak mengancam partisipasi publik."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menekankan bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat untuk menjamin partisipasi masyarakat, dan selama kanal itu terbuka, maka revisi undang-undang tidak secara otomatis dianggap sebagai ancaman.

Informan 2, sebaliknya, menyatakan setuju bahwa revisi ini dapat mengancam partisipasi publik, terutama karena prosesnya dianggap tidak transparan dan tertutup dari keterlibatan masyarakat:

"Setuju... Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Orang ngumpet-ngumpet... Sidangnya di hotel, kalau nggak salah... dibatasi untuk pengunjung... Berarti kan sudah mengancam partisipasi publik."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Ia menyoroti minimnya akses publik terhadap proses legislasi, terutama karena sidang tidak dilakukan secara terbuka dan informatif, sehingga publik tidak diberi ruang untuk memantau dan mengawal proses.

Informan 3 juga menyatakan tidak setuju, dengan alasan bahwa di era digital, partisipasi publik justru semakin luas melalui media sosial dan kebebasan pers:

"Tidak, tidak setuju... partisipasi publik sekarang sudah banyak kanal-kanal sosial media... kekuatan media sosial dan pers itu sekarang sudah hampir seimbang... masyarakat bisa menyuarakan haknya."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menekankan bahwa teknologi dan media digital telah memperkuat suara masyarakat, bahkan di luar mekanisme formal seperti sidang terbuka atau demonstrasi fisik. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap ancaman Revisi UU TNI terhadap

kebebasan akademik. Para informan Ketika diminta pendapatnya mengenai pernyataan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam kebebasan akademik, tanggapan informan menunjukkan keragaman persepsi. Dua informan tidak setuju dengan anggapan tersebut dan satu informan setuju, dengan dasar kekhawatiran terhadap potensi masuknya nilai-nilai otoriter ke dalam ranah hukum dan pendidikan.

Informan 1 menyatakan tidak setuju, dan menilai bahwa meskipun TNI akan memiliki peran dalam lembaga-lembaga sipil, hal tersebut tidak akan membatasi kebebasan berekspresi, termasuk di lingkungan kampus:

"Tidak, para mahasiswa walaupun TNI berada di beberapa dinas... tetapi dinas itu memang membutuhkan militer... gak akan mengancam kebebasan akademik mahasiswa... seminar, diskusi, dengar pendapat itu masih boleh... akademik sih masih bebas untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menyiratkan keyakinan bahwa selama tidak ada pembatasan fisik atau langsung terhadap aktivitas akademik, maka tidak ada ancaman terhadap kebebasan berpikir dan berbicara di kalangan civitas akademika.

Informan 2 juga tidak setuju, dengan alasan bahwa belum ada bukti konkret bahwa mahasiswa mengalami pembungkaman karena menyuarakan pendapatnya, termasuk melalui aksi demonstrasi:

"Kalau saya pribadi tidak setuju... sampai saat ini saya belum melihat bahwa mahasiswa itu dilarang demo... belum terlihat mahasiswa itu gara-gara ikut demo jadi tidak lulus... sepanjang itu tidak terjadi, saya tidak setuju bahwa itu mengancam akademik."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 2 mengambil pendekatan berbasis realitas empiris—selama belum terjadi pelanggaran nyata, maka ancaman belum bisa diklaim ada.

Sementara itu, Informan 3 menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam kebebasan akademik, terutama jika TNI ditempatkan dalam posisi strategis di lembaga-lembaga hukum dan

pemerintahan. Ia menilai bahwa nilai-nilai militer yang cenderung otoriter bisa memengaruhi cara negara menghadapi perbedaan pendapat di ruang publik, termasuk kampus:

"Saya cenderung setuju ya... kalau misalnya kewenangan seperti pelaksanaan agung diserahkan ke TNI... akan ada unsur-unsur otoriter dari paham-paham militer... yang menurut saya akan sedikit banyak mengurangi kebebasan akademik."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan kepekaan terhadap struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap ruang berpikir kritis, terutama dalam konteks kebebasan akademik yang bersandar pada independensi dan keterbukaan. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pengabaian prinsip demokrasi dalam Revisi UU TNI. Para informan ketika ditanya apakah setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI, dua dari tiga informan menyatakan setuju, sementara satu informan menyatakan tidak sepenuhnya setuju, meski tetap mengakui adanya kelemahan dalam proses.

Informan 1 secara eksplisit menyatakan setuju bahwa prinsip demokrasi terabaikan dalam proses revisi tersebut. Ia menyoroti ketiadaan forum dengar pendapat dan keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, serta akademisi:

"Saya mengakui ada sedikit... terkesan tergesa-gesa, kemudian tidak ada dengar pendapat dengan tokoh-tokoh... dari para pemuda, kaum akademisi, mahasiswa itu gak ada... saya setuju, karena dalam proses perumusan revisi undang-undang dasar ini... kurang mendapatkan masukan dari pihak-pihak lain."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menggarisbawahi minimnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi, yang bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif.

Informan 2 juga menyatakan setuju, dan menyoroti fakta bahwa sidang pembahasan tidak dilakukan di ruang parlemen yang seharusnya terbuka untuk umum. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk penutupan akses terhadap partisipasi masyarakat:

"Kalau saya setuju. Karena sidangnya saja ya sudah tidak di tempat... sidangnya sudah semacam disembunyikan... artinya tidak menerima aspirasi lagi dari masyarakat... akhirnya aspirasi RUU itu diabaikan."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan kecurigaan terhadap niat dan transparansi pemerintah, yang dipandang telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi prosedural.

Sementara itu, Informan 3 memberikan pandangan yang lebih moderat. Ia tidak sepenuhnya setuju bahwa pemerintah mengabaikan prinsip demokrasi, namun mengakui bahwa waktu yang sempit dalam pembahasan membuat publik kehilangan kesempatan untuk memahami dan memberikan masukan secara optimal:

"Kalau dibilang mengabaikan, enggak. Cuma... kenapa revisi itu disahkan dalam waktu yang sangat dekat... mungkin perlu diberikan waktu lebih untuk masyarakat... bisa memberi masukan, saran, koreksi."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Informan 3, masalahnya bukan pada niat pemerintah, tetapi pada keterbatasan ruang waktu partisipasi publik yang perlu dibenahi. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap potensi kembalinya militerisme seperti masa orde baru. Ketika diminta pendapat mengenai pernyataan bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan militerisme ala Orde Baru, tanggapan informan terbagi menjadi tiga kategori: optimis dengan pengawasan publik, khawatir namun belum menyimpulkan, dan menolak kemungkinan itu terjadi karena perbedaan zaman.

Informan 1 menyatakan tidak setuju, namun tetap menyampaikan harapan agar hal itu tidak terjadi. Ia percaya bahwa peran masyarakat yang lebih kritis dan teknologi yang terbuka akan mampu mencegah bangkitnya militerisme seperti masa lalu:

"Semoga tidak... karena sekarang masyarakat lebih cerdas, memantau, mengawasi... didukung teknologi yang canggih... netizen sudah cepat akan bergerak mengontrol, mengawasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh TNI."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa kontrol sosial oleh publik menjadi tameng utama terhadap potensi militerisme, berbeda dengan masa Orde Baru yang otoriter dan tertutup.

Informan 2 mengambil posisi ambivalen. Ia tidak menyatakan setuju maupun tidak, namun mengakui adanya kekhawatiran bahwa praktik dwifungsi ABRI bisa kembali jika proses revisi tidak diawasi dengan baik:

"Dibilang setuju juga nggak. Dibilang enggak setuju juga nggak. Karena kita kan belum melihat. Cuma khawatir... dwifungsi ABRI itu akan kembali lagi... apalagi nanti kalau sudah terlaksana."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Ini mencerminkan sikap waspada terhadap pola kekuasaan yang mirip masa lalu, tetapi belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa militerisme pasti akan kembali.

Informan 3 menyatakan tidak setuju bahwa revisi akan mengembalikan militerisme. Ia menilai bahwa perbedaan situasi politik dan sosial saat ini membuat kemungkinan kembalinya sistem otoriter militer seperti Orde Baru sangat kecil:

"Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi, karena zamannya sudah beda... kemungkinan untuk mengembalikan seperti zaman Orde Baru... tidak akan seperti itu menurut saya."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa konteks demokrasi modern dan sistem politik saat ini telah berubah secara mendasar, sehingga tidak relevan membandingkannya secara langsung dengan Orde Baru. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap potensi kembalinya dwifungsi TNI melalui Revisi UU. Tanggapan para informan memperlihatkan keragaman sikap, mulai dari penolakan terhadap adanya potensi dwifungsi yang kembali, hingga kekhawatiran akan dominasi militer di ranah-ranah sipil tertentu. Ketiganya memberikan pandangan berdasarkan pemahaman terhadap jenis instansi sipil yang disebutkan dalam revisi UU TNI, serta peran pengawasan demokratis dalam konteks saat ini.

Informan 1 menyatakan tidak setuju bahwa revisi UU TNI akan mengembalikan praktik dwifungsi seperti masa Orde Baru. Ia menyebut bahwa penempatan TNI di jabatan sipil terbatas pada lembaga-lembaga strategis yang memang beririsan dengan pertahanan dan keamanan nasional:

"Tidak sih... dinas tambahan setelah revisi saya nilai semuanya memang sudah sesuai... misalnya Kementerian Kelautan, SAR, BNPT, Mahkamah Agung... ini memang bidangnya Tentara Nasional Indonesia... menjaga kedaulatan laut Indonesia... jadi tidak akan mengembalikan praktik dwifungsi ABRI."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa penempatan prajurit TNI aktif bersifat fungsional, bukan politis atau ideologis, selama masih sesuai dengan tugas pokok TNI di sektor pertahanan.

Informan 2 menyampaikan sikap hati-hati dan kritis, dengan menyatakan bahwa walaupun keterlibatan TNI bisa bermanfaat, tetapi jika berlebihan, itu akan mengurangi transparansi publik dan menimbulkan kekhawatiran:

"Bagus kalau menurut saya. Tapi jangan terlalu banyak... Kalau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sudah dipegang TNI, takutnya nanti masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi jadi tidak transparan."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan kekhawatiran akan ketidakseimbangan kekuasaan, jika sektor-sektor yudisial dan hukum terlalu didominasi oleh unsur militer, yang secara historis pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Informan 3 menyatakan bahwa indikasi ke arah dwifungsi memang ada, tetapi ia tetap yakin bahwa kondisi demokrasi dan pengawasan saat ini akan mencegah kembalinya kekuasaan militer secara penuh seperti dulu:

"Ada indikasi seperti itu. Tapi sekali lagi, dengan media, dengan pengawasan lembaga-lembaga politik... tidak akan menjadikan itu balik ke fungsi aktif seperti sebelum tahun 1997-1998."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan sikap waspada, namun percaya bahwa mekanisme kontrol publik dan demokrasi saat ini sudah cukup kuat untuk mencegah kemunduran ke model kekuasaan dwifungsi ala Orde Baru.

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum. Ketika diminta menanggapi pernyataan bahwa revisi UU TNI menjadikan TNI sulit disentuh secara hukum, tanggapan para informan terbagi dalam dua kategori besar: penolakan terhadap klaim tersebut, dan kekhawatiran akan potensi arah ke sana, terutama bila militer terlalu dominan di institusi hukum sipil.

Informan 1 menyatakan tidak setuju. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana semua warga negara, termasuk prajurit TNI, harus tunduk pada supremasi hukum tanpa hak istimewa:

"Tidak, tidak. Negara Indonesia... negara hukum... siapapun harus menjunjung tinggi hukum... walaupun dia militer, itu tidak punya hak imunitas... siapapun yang bersalah pasti dikenakan hukuman."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menekankan keyakinan terhadap sistem hukum nasional, dan menolak anggapan bahwa institusi militer mendapat perlakuan khusus atau kebal hukum.

Informan 2, sebaliknya, mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika TNI menduduki posisi-posisi penting di institusi hukum seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, maka ada potensi praktik impunitas seperti pada masa Orde Baru bisa terulang:

"Kalau Mahkamah Agung sudah dipegang, Kejaksaan Agung juga dipegang... takutnya nanti kembali seperti zaman dulu bahwa TNI itu tidak bisa disentuh secara hukum. Itu kekhawatiran saja sih sebenarnya."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bukan sistem hukum yang dipermasalahkan, tetapi struktur kekuasaan di dalam institusi penegakan hukum yang bisa terganggu oleh keterlibatan militer secara aktif.

Informan 3 juga mengakui adanya kekhawatiran, terutama setelah mempelajari lembaga-lembaga yang akan diperluas kewenangannya melalui revisi UU TNI. Ia tidak secara tegas menyatakan TNI kebal hukum, namun menekankan adanya potensi ketidakseimbangan:

"Itu kekhawatiran sih. Setelah saya pelajari... ada kekhawatiran seperti itu."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan sikap waspada, bukan menolak secara mutlak, namun menyarankan perlunya pengawasan publik agar tidak terjadi kecenderungan menuju impunitas. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pencabutan Revisi UU TNI, Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan pencabutan revisi UU TNI, tanggapan para informan terbagi menjadi tiga kategori: menolak pencabutan dan mendukung implementasi terlebih dahulu, mendukung evaluasi dan penyesuaian selektif, dan mendukung pencabutan karena kekhawatiran terhadap akumulasi kekuasaan TNI.

Informan 1 menyatakan tidak setuju dengan pencabutan. Ia berpendapat bahwa karena revisi sudah sah secara prosedural, maka sebaiknya

diimplementasikan terlebih dahulu, baru kemudian dievaluasi berdasarkan dampak nyatanya di masyarakat:

"Tidak setuju. Suatu rancangan Undang-Undang... apalagi sudah dibahas dan sudah disahkan, itu tidak bisa dicabut... laksanakan dulu, baru dievaluasi. Kalau ternyata banyak mudorotnya, merugikan masyarakat, baru dicabut."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini mencerminkan kepercayaan pada prosedur hukum formal, serta pendekatan evaluatif berdasarkan pengalaman implementasi, bukan berdasarkan dugaan atau kekhawatiran semata.

Informan 2, berbeda dari yang lain, menyatakan setuju dengan pencabutan, karena menilai bahwa revisi memberi TNI wewenang yang terlalu luas dan membatasi peluang sipil dalam jabatan publik:

"Saya setuju banget kalau dicabut... soalnya melihat wewenang itu sudah terlalu banyak... sekarang ada 16 instansi... berarti sipil itu semakin susah masuknya. Nah itu yang saya khawatirkan."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan sikap kritis terhadap dampak struktur kekuasaan, khususnya dalam mengancam prinsip supremasi sipil dan potensi dominasi militer di ranah sipil.

Informan 3 menyatakan tidak mendukung pencabutan secara penuh, namun mendorong adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap kewenangan TNI agar tetap sejalan dengan kebutuhan sipil dan prinsip demokrasi:

"Kalau pencabutan saya tidak setuju... lebih ke penyesuaian, evaluasi... agar keduanya bisa berjalan seiring... mungkin dikaji ulang lagi aja... apa yang bisa dipegang TNI dan apa yang harus jadi kewenangan masyarakat sipil."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini mencerminkan posisi moderat, yakni mendukung revisi secara prinsip, namun mendorong pengkajian ulang secara selektif dan berbasis dialog multisektor. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan

pandangan terhadap tindakan kekerasan aparat terhadap demonstrasi mahasiswa. Ketiga informan menyatakan sikap setuju bahwa tindakan kekerasan oleh aparat terhadap mahasiswa dalam aksi demonstrasi harus dihentikan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan persuasif, pengawalan damai, dan penghormatan terhadap hak berekspresi sebagai bagian dari demokrasi.

Informan 1 menyatakan bahwa aparat, khususnya kepolisian, tidak seharusnya menggunakan kekerasan. Ia menegaskan peran polisi adalah mengamankan situasi, bukan menyerang mahasiswa, serta menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik:

“Seharusnya tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap para demonstran... polisi seharusnya mengawal dan mengamankan... keamanan situasi, bukan mengamankan mahasiswanya. Demo itu harus berjalan tertib dan damai.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Informan 2 menyampaikan penolakan keras terhadap segala bentuk kekerasan oleh aparat. Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak dalam negara demokrasi, dan seharusnya dihargai:

“Saya setuju banget. Tidak boleh ada kekerasan terhadap yang demo... demokrasi kan siapa juga bisa bersuara... bahkan kita bersyukur mahasiswa masih ada yang mau menyuarakan.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap kebebasan berekspresi dan aspirasi mahasiswa, serta penolakan terhadap pendekatan represif negara.

Informan 3 juga menyampaikan dukungan terhadap penghentian kekerasan, dengan menyebut bahwa kekerasan bukan solusi dalam demokrasi, apalagi terhadap kelompok yang menyuarakan aspirasi secara terbuka:

“Iya setuju, karena gimana pun aksi kekerasan itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa menjadi solusi... untuk memaksakan suatu keputusan dalam pemerintahan.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Tabel 4.11 Ringkasan Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co

Deskripsi	Elpi (I-1)	Martumpal (I-2)	Handoko (I-3)
Pandangan terhadap Kekhawatiran Publik atas Pembahasan Revisi UU TNI	tidak setuju	setuju	tidak setuju
Pandangan terhadap Urgensi Revisi Undang-Undang TNI	tidak setuju tidak adanya urgensi	tidak setuju tidak adanya urgensi	Setuju
Pandangan Terhadap Usulan Pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer)	tidak setuju	tidak setuju	tidak setuju
Pandangan RUU TNI dapat mengancam partisipasi publik	tidak setuju	Setuju	sangat setuju
Pandangan terhadap Ancaman Revisi UU terhadap Kebebasan Akademik	tidak setuju	tidak setuju	setuju
Pandangan terhadap Pengabaian Prinsip Demokrasi dalam Revisi UU TNI	setuju	setuju	tidak setuju sepenuhnya
Pandangan terhadap Potensi Kembalinya Militerisme seperti Masa Orde Baru	tidak setuju	tidak setuju menyatakan setuju maupun tidak	tidak setuju

Pandangan terhadap Potensi Kembalinya Dwifungsi TNI melalui Revisi UU	tidak setuju	menyampaikan sikap hati-hati dan kritis,	Menyatakan setuju dan tidak setuju
Pandangan terhadap TNI sebagai Institusi yang Sulit Disentuh Secara Hukum	tidak setuju.	mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika TNI menduduki posisi-posisi penting di institusi hukum seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, maka ada potensi praktik impunitas seperti pada masa Orde Baru bisa terulang	mengakui adanya kekhawatiran, terutama setelah mempelajari lembaga-lembaga yang akan diperluas kewenangannya melalui revisi UU TNI.
Pandangan terhadap Pencabutan Revisi UU TNI	tidak setuju	setuju	tidak mendukung pencabutan
Pandangan terhadap Tindakan Kekerasan Aparat terhadap Demonstrasi Mahasiswa	menyatakan bahwa aparat, khususnya kepolisian, tidak seharusnya menggunakan kekerasan	menyampaikan penolakan keras terhadap segala bentuk kekerasan oleh aparat	menyampaikan dukungan terhadap penghentian kekerasan, dengan menyebut bahwa kekerasan bukan dalam demokrasi

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki tanggapan beragam terkait narasi Tempo.co yang menekankan kekhawatiran publik terhadap revisi UU TNI. Informan 1 menolak narasi tersebut, menganggap publik sebaiknya menunggu implementasi terlebih dahulu dan tidak bersikap paranoid. Informan 2 sangat setuju bahwa pemberitaan Tempo.co merefleksikan keresahan nyata karena proses revisi tidak transparan. Informan 3 tidak melihat pembahasan sebagai sumber kekhawatiran, melainkan justru membuka ruang evaluasi publik. Seluruh informan mengakui bahwa revisi memiliki urgensi, tetapi ketiga informan menekankan kepada beberapa aspek, informan 1 menekankan revisi sah dilakukan untuk merespons situasi nasional dan global, informan 2

menekankan bahwa revisi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan informan 3 menekankan harus tetap memperhatikan ruang partisipasi publik.

Selanjutnya ketiga informan memiliki padangan bahwa mereka tidak setuju jika UU Peradilan Militer dibahas sekarang. Informan 1 dan 3 merasa RUU peradilan militer tidak cukup mendesak. Sedangkan informan 2 merasa fokus seharusnya pada potensi ekspansi TNI ke ranah sipil, bukan internalisasi hukum militer. Terkait tanggapan informan terhadap narasi Tempo.co yang menekankan partisipasi publik yang terancam Informan 2 sepakat bahwa partisipasi publik terancam, melihat minimnya akses dan transparansi. Informan 1 dan 3 tidak setuju, meyakini bahwa kanal aspirasi publik masih terbuka, terutama lewat media sosial.

Selanjutnya ketiga informan melakukan pernyataan terkait RUU TNI mengancam akademik, Informan 3 yang mengakui potensi ancaman, jika nilai-nilai otoriter militer masuk ke lembaga-lembaga sipil penting. Informan 1 & 2 tidak melihat dampak langsung terhadap kebebasan akademik. Para informan memberikan pernyataan terkait hilangnya prinsip demokrasi saat perumusan RUU TNI. Dua dari tiga yaitu informan 1 dan 2, setuju bahwa prinsip demokrasi diabaikan karena proses yang tertutup dan terburu-buru. Sedangkan satu informan yaitu informan 3 menilai niatnya tidak buruk, namun waktu dan prosesnya tidak ideal. Terkait dapat kembalinya militerisme dan dwifungsi TNI seperti masa orde baru, Informan 2 dan 3 mengakui adanya indikasi atau kekhawatiran terhadap arah kembali ke dwifungsi dan militerisme. Informan 1 percaya masyarakat sekarang lebih cerdas dan mampu mengawasi, sehingga militerisme ala Orde Baru tidak akan terulang.

Selanjutnya terkait RUU TNI menjeadikan TNI sebagai institusi yang sulit di sentuh secara hukum, ketiga informan menyatakan, informan 1 menolak impunitas TNI karena semua tunduk pada hukum. Informan 2 dan 3: Ada kekhawatiran mengenai impunitas TNI, terutama jika TNI mulai menguasai lembaga penegak hukum sipil. Terkait pernyataan tentang pencabutan RUU TNI, informan 1 menolak pencabutan; revisi perlu diimplementasikan dulu. Informan 2 setuju dicabut, karena revisi mempersempit ruang sipil. Informan 3 mendorong penyesuaian, bukan pencabutan total. Ketiga informan menyetujui bahwa harus

diberhentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa .

2. Pemaknaan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co oleh Generasi Y

a. Intensitas Pengguna Media Generasi Y

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai intensitas informan menggunakan media untuk RUU TNI di Tempo maupun di media lainnya. Ketiga informan menjelaskan pilihannya terhadap media berita yang digunakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat keragaman dalam pemilihan portal berita yang digunakan oleh informan. Informan 1 lebih sering menggunakan Detik.com terutama melalui ponsel karena kecepatan penyampaian beritanya. Ia juga mengakses berita dari beberapa saluran televisi berita seperti MetroTV, CNN, INews, dan TVOne. Hal ini diungkapkan oleh Informan 1:

“Kalau dari HP, karena memang adanya detik ya, biasanya detik. Tapi kalau TV, layar kaca itu yang sering saya buka, yang empat tadi sih. Yang INews, MetroTV, TV One, sama satu lagi CNN.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 lebih sering menggunakan detik.com karena berita yang dinilai cepat dibandingkan berita lainnya

“Lebih sering detik.com yang tadi saya sampaikan bahwa beritanya lebih cepat dibandingkan portal berita yang lain.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 lebih sering membaca berita dari Merdeka dan Tribun News, karena kedua portal tersebut dianggap lebih menarik dan rutin dibaca:

“Merdeka sih kayanya. Antara Merdeka dan Tribun sih. Berita itu emang selalu bacanya di Merdeka dan Tribun.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan alasan mereka memilih portal berita tertentu. Alasan pemilihan portal berita oleh para informan juga bervariasi. Informan 1 merasa bahwa beberapa portal berita tertentu lebih terpercaya dibandingkan lainnya, terutama yang memiliki latar belakang sebagai saluran berita di televisi:

“Menurut saya sih portal berita yang tadi disebutkan itu lebih terpercaya ya. Jadi kan kalau kita, kita nih sebagai netizen gitu ya, kalau ngeliat TV-TV kan mereka udah punya warna masing-masing ya. Kayak Indosiar berarti dia sama sinetronnya, kemudian TransTV sama film actionnya. Nah, kalau yang berita itu ya kayak MetroTV, CNN, INews, TVOne, itu aja sih. Sisanya mah ya receh-receh gitu aja menurut saya.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menekankan kecepatan dan kedalaman informasi sebagai alasan memilih portal tertentu. Detik.com dipilih karena cepat dalam memberikan informasi, sedangkan Tempo dipilih karena liputan beritanya dianggap lebih lengkap dan mendalam. Kompas juga dinilai sejalan dengan Tempo dalam hal kedalaman isi berita:

“Saya merasa portal berita tersebut memiliki beberapa keunggulan, seperti detik yang cepat updet, saya menggunakan Tempo karena pemberitaanya jauh lebih lengkap yah.. dia benar benar menyajikan berita yang dikupas tuntas, dan untuk kompas saya memilihnya karena sama dengan Tempo.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Sementara Informan 3 lebih fleksibel dan tidak terikat pada portal tertentu. Ia lebih mengutamakan isi dan ketertarikan terhadap topik:

“Tergantung dari topiknya, kalau itu menarik mau itu Merdeka, mau itu tribun, aku sih enggak masalah. Lebih ke info update aja.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan frekuensi membaca berita melalui portal berita. Berdasarkan hasil wawancara, intensitas membaca berita melalui portal online berbeda-beda tergantung situasi dan kebutuhan masing-masing informan.

Informan 1 menjelaskan bahwa frekuensinya tergantung pada tempat dan kondisi saat berita besar terjadi. Saat berada di luar, ia akan mengakses berita melalui ponsel dan membuka Detik.com, sedangkan di rumah ia lebih memilih menonton berita dari kanal televisi seperti MetroTV, iNews, dan TVOne:

“Sebenarnya kalau ada berita besar yang pertama kali saya buka, ya antara itu ya. Misalnya ada demo besar, kalau saya lagi ada di luar, ya yang saya buka HP dari DETIK berarti kan. Tapi kalau misalnya saya lagi ada di rumah, yang saya buka TV. TV-nya ya METROTV, atau iNews, atau TV ONE juga bagus juga sih menurut saya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menunjukkan bahwa ia cukup aktif membaca berita, khususnya dari Detik.com, yang menurutnya memiliki keunggulan dalam hal kecepatan update berita. Ia menyebut hampir setiap beberapa detik ada pembaruan berita, terutama topik-topik politik, olahraga, dan isu-isu terkini seperti RUU TNI. Sementara itu, Kompas lebih jarang diakses karena ia lebih memilih mengakses konten Kompas melalui Instagram:

“Baik, untuk portal berita yang paling sering saya buka yaitu dari detik.com. Yang mana berita ini memang setiap hampir beberapa detik selalu update berita juga terbaru. Khususnya berita tentang politik, olahraga, dan pengembangan ekonomi saat ini. Serta khususnya tentang RUU TNI yang mungkin sekarang sih memang sudah mulai berkurang. Berita-berita tersebut sudah tidak lagi muncul di detik.com. Kemudian juga untuk Kompas juga mungkin tidak terlalu sering ya. Karena Kompas sudah memiliki media sosial yaitu Instagram. Jadi saya lebih sering membukanya melalui Instagram.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 mengaku tidak terlalu sering membaca berita melalui portal tertentu. Ia lebih bergantung pada rekomendasi dari Google saat membuka

aplikasi tersebut. Pilihannya pada Merdeka atau Tribun biasanya bersifat situasional tergantung berita yang muncul di halaman awal Google:

“Sebenarnya kalau dibilang sering gak terlalu sering ya, tergantung. Kalau aku tuh baca berita tergantung pada saat lagi buka Google. Biasanya kalau Google kan ada tuh yang bacaan info-info. Cuma pas banget untuk RUU TNI itu aku bukanya di Merdeka. Jadi bukan berarti sering di Merdeka, enggak juga sih. Sebenarnya kadang-kadang ada lagi tuh di Tribun ya. Pokoknya tergantung yang ada di Google. Kalau aku info apa, yaudah aku langsung klik.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan topik beritayang sering dibaca oleh mereka. Preferensi topik berita yang dibaca oleh para informan menunjukkan kecenderungan yang beragam, tergantung pada minat pribadi dan situasi aktual yang sedang terjadi.

Informan 1 tidak memiliki fokus khusus terhadap topik tertentu. Ia lebih memilih mengikuti berita yang sedang hangat atau viral. Topik-topik yang menarik perhatian biasanya adalah kejadian besar seperti bencana alam maupun isu-isu selebritas yang sedang ramai diberitakan:

“Yang lagi happening sih biasanya. Pokoknya ikutin yang ada aja gitu. Misalnya ada berita, ada bencana alam nih, itu yang saya buka. Termasuk misalnya ada dari artis pun misalnya ada apa nih, ada kejadian ini poligamen misalnya. Biasanya kan ada tuh, kalau di TV dia langsung tayang gitu. Biasanya ikutin aja sih, gitu aja. Jadi nggak punya target tertentu, nggak ada, mengalir aja.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 memiliki minat yang lebih fokus pada topik pemerintahan, olahraga, dan pendidikan. Ketiga bidang ini menjadi topik yang paling sering ia ikuti ketika membaca berita:

“Untuk topiknya saya lebih sering mengikuti pemerintahan, terus... olahraga dan pendidikan sih.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 juga menyebutkan tiga topik utama yang menjadi fokusnya, yakni kesehatan, perkembangan pemerintahan, dan pendidikan. Ia memilih topik-topik tersebut karena dianggap paling relevan dan menarik:

“Biasanya kalau aku terkait kesehatan, terus yang menarik ya, terus update soal perkembangan pemerintahan, terus yang ketiga itu biasanya update tentang perkembangan pendidikan. Tiga hal itu sih yang menarik.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan ketertarikan terhadap pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI. Pengetahuan dan keterlibatan informan terhadap pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang TNI bervariasi, dari yang mengikuti secara cukup aktif hingga yang hanya mengetahui secara sekilas.

Informan 1 menyatakan bahwa ia mengikuti isu tersebut meskipun tidak secara mendalam. Ia mendapat informasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, serta diskusi ringan bersama suaminya yang juga mengikuti perkembangan isu tersebut:

“Ya sih, saya mengikuti sedikit ya, dari tayangan yang berseliweran. Ketika saya menonton TV, kemudian dengar juga dari radio, kemudian ada juga sih pembahasan sedikit dengan suami saya, karena kebetulan suami saya juga suka update tentang masalah-masalah seperti ini.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 mengaku telah mengikuti pemberitaan revisi UU TNI sejak awal isu tersebut mulai ramai dibicarakan, terutama dari media sosial:

“Untuk berita tersebut, saya sudah ikuti dari mulai awal keramaian, desas-desus dari media sosial.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menunjukkan ketertarikan yang lebih rendah terhadap isu ini. Ia mengetahui secara garis besar, namun tidak secara aktif mengikuti perkembangan beritanya:

“Tidak terlalu sih, tapi tahu sedikit.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan portal berita yang digunakan untuk mengikuti pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI. Para informan ketika ditanya mengenai portal berita yang digunakan untuk mengikuti isu revisi Undang-Undang TNI, para informan menyebut beberapa sumber berita, baik media daring maupun elektronik.

Informan 1 mengandalkan portal berita yang mudah dijangkau dan sudah akrab digunakan sehari-hari. Ia menyebut Detik.com sebagai salah satu yang sering dibuka, disusul oleh Tempo, serta pemberitaan dari televisi seperti MetroTV dan iNews:

“Portalnya ya... oh saya sih media sih yang paling dekat sama saya sih media. Yang pertama media elektronik, kayak saya suka membaca dari Detik, kadang juga dari Tempo juga sesekali. Terus apa, berita dari Metro TV atau iNews. Dari itu aja sih.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyebut beberapa portal berita yang aktif ia akses terkait revisi UU TNI, seperti Detik.com, Tempo, dan Kompas. Ia bahkan mencatat bahwa tidak semua media swasta secara terbuka meliput isu ini:

“Untuk berita yang paling sering saya lihat, ada Detik.com, kemudian ada majalah Tempo yang saat ini juga masih rame sampai detik ini, kemudian ada Kompas, dari Kompas Media, bahkan dari televisi juga ada. Namun yang anehnya, tidak semua media swasta mau meliput hal tersebut.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 mengaku terakhir kali mengikuti isu revisi UU TNI melalui Merdeka.com:

“Terakhir saya buka itu Merdeka.com.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Tabel 4.12 Ringkasan Pemahaman Terhadap Intensitas Penggunaan Media.

Deskripsi		Mujiyati (I-1)	Zamaludin (I-2)	Santi (I-3)
Portal yang Sering Digunakan	Berita Paling	Detik.com	Detik.com	Merdeka dan Tribun News
Alasan Memilih Portal Tertentu	Berita	Karena kepercayaan portal berita	menekankan kecepatan dan kedalaman informasi	lebih fleksibel dan tidak terikat pada portal tertentu.
Frekuensi Membaca Berita Melalui Portal Berita	Berita Portal	menjelaskan tergantung pada tempat dan kondisi saat berita besar terjadi.	menunjukkan cukup aktif membaca berita,	mengaku tidak terlalu sering membaca berita melalui portal tertentu
Topik yang Sering Dibaca	Berita Sering	tidak memiliki fokus khusus terhadap topik tertentu	pemerintahan, olahraga, dan pendidikan	kesehatan, perkembangan pemerintahan, dan pendidikan
Ketertarikan terhadap Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI	Undang-	menyatakan mengikuti isu tersebut meskipun tidak secara mendalam	Menyatakan telah mengikuti	Mengikuti namun tidak mendalami
Portal Berita yang Digunakan untuk Mengikuti Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI	Undang-	Detik, Tempo, iNews, dan Metrotv	Detik.com, Tempo, dan Kompas.	Merdeka.com

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa ketiga informan Generasi Y memiliki preferensi yang beragam dalam memilih portal berita, dengan alasan yang berbeda-beda. Informan 1 dan 2 cenderung memilih Detik.com karena kecepatan update, dan informan 1 juga memilih televisi seperti MetroTV, CNN, iNews, dan TVOne karena dianggap kredibel. Informan 3 bersifat fleksibel, tidak terikat pada portal tertentu, dan lebih memilih berdasarkan topik yang menarik. Keragaman preferensi dalam memilih portal berita di kalangan informan Generasi Y tidak hanya mencerminkan perbedaan alasan dalam menentukan sumber informasi, tetapi juga berkaitan dengan frekuensi akses. Ketiga informan menjelaskan seberapa rutin mereka menggunakan portal berita: informan 1

menyatakan frekuensinya tergantung situasi dan lokasi, sedangkan portal yang dibuka pun menyesuaikan dengan tempat ia berada; informan 2 cukup aktif membaca berita melalui media Detik; dan informan 3 tidak terlalu sering, tergantung ada atau tidaknya rekomendasi berita menarik dari Google.

Dengan demikian, perbedaan preferensi terhadap portal berita di kalangan informan Generasi Y berkelindan dengan pola akses yang bervariasi serta minat topik yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi berita mereka dipengaruhi oleh kombinasi antara kebutuhan informasi, situasi akses, dan ketertarikan terhadap isu tertentu. Para informan memiliki minat topik yang beragam. Informan 1 mengikuti topik yang sedang viral, sedangkan informan 2 dan 3 lebih fokus pada isu pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Temuan ini sejalan dengan salah satu karakteristik Generasi Y yang diungkapkan oleh Nasution (2019), yakni keterlibatan aktif di media sosial dan gaya hidup yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selain itu, akses terhadap berbagai platform digital juga membuat Generasi Y lebih bebas dalam memilih sumber informasi. Kemudahan ini mendukung kebiasaan mereka dalam mencari berita yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pribadi.

Selanjutnya Informan menunjukkan tiga level keterlibatan dalam isu RUU TNI. Informan 2 aktif atau mengikuti dari awal, tahu proses dan implikasi sosial. Informan 1 pasif sadar, yakni tahu setelah ramai, sadar dampaknya. Informan 3 minim ketertarikan, yakni tahu sedikit, tidak mendalami. Untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI, para informan umumnya menyebutkan Detik, Tempo, Kompas, dan TV berita (MetroTV, iNews) sebagai media yang diandalkan untuk mengikuti isu RUU TNI. Hanya satu Informan 3 yang menyebut Merdeka.com sebagai sumber.

b. Pemahaman Generasi Y tentang Revisi Undang-Undang TNI

Selanjutnya pada bagian ini ketiga informan menjelaskan informasi baru yang diperoleh dari pemberitaan tentang Revisi Undang-Undang TNI. Setiap informan memperoleh informasi yang berbeda-beda setelah mengikuti pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang TNI. Hal ini menunjukkan variasi pemahaman dan fokus perhatian mereka terhadap isi revisi tersebut.

Informan 1 menyadari bahwa revisi UU TNI telah disahkan, meskipun ia baru mengetahuinya setelah melihat berita tentang aksi unjuk rasa masyarakat. Ia menyoroti bahwa penyebaran informasi melalui media sangat memengaruhi kesadaran publik akan isu tersebut:

“Yang saya dengar sih katanya itu ya sudah ketuk palu ya. Sebenarnya sudah ketuk palu revisinya sudah disahkan. Tapi ya kita baru ngehnya sudah disahkan gitu. Oh ternyata ada berita seperti itu. Ya tahunya itu karena ada berita banyak warga yang demo tentang masalah hasil keputusan ini, kenapa harus ada revisi gitu.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 mendapatkan informasi penting pada bulan Maret, yaitu bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut. Ia mencermati bahwa revisi ini tidak hanya berdampak pada institusi TNI, tetapi juga berimplikasi terhadap masyarakat umum, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa:

“Informasi yang terbaru saya dapat kebetulan di bulan Maret, bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, juga sudah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut, yang mana memang ada segi positifnya juga. Segi positifnya dalam arti, ini di sini tidak terfokus kepada TNI-nya, tapi juga kepada masyarakat khususnya yang mungkin masih merasa bahwa Undang-Undang tersebut akan merugikan banyak masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyebut bahwa ia mengetahui adanya perbedaan antara Undang-Undang TNI yang lama dan yang baru, salah satunya berkaitan dengan perubahan pada tugas pokok TNI:

“Ada perbedaan antara UU TNI lama sama UU TNI baru. Tiga perbedaannya itu... terkait dengan salah satunya tugas pokok TNI.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI. Mereka menjelaskan pemahaman informan

terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI. Para informan memiliki pemahaman yang beragam mengenai isi dan implikasi dari revisi Undang-Undang TNI. Secara umum, mereka mampu mengidentifikasi beberapa poin penting yang menjadi sorotan publik dalam isu ini.

Informan 1 memahami bahwa salah satu inti dari revisi ini adalah memberikan wewenang lebih besar kepada TNI untuk terlibat di ranah sipil, yang sebelumnya menjadi wilayah kewenangan sipil sepenuhnya. Ia menyamakan hal ini dengan konsep "dwifungsi", dan menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak revisi tersebut:

“Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya dari yang saya baca, saya lihat, saya dengar itu bahwa TNI memiliki... merevisi undang-undang itu memiliki dwifungsi ya, jadinya dia bisa berkuasa di ranah sipil ya, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya TNI itu hanya fokus ya udah membela negara, tapi dengan adanya undang-undang ini, dia bisa menduduki ranah-ranah... kayak ranah-ranah apa ya, yang harusnya diduduki oleh sipil. Ya itu yang saya tahu itu secara garis besar, sebenarnya ngaruh banget ya menurut saya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menjelaskan isu ini dengan cukup rinci, mengaitkannya dengan tiga poin utama: lemahnya pertahanan negara (khususnya di bidang siber), keterlibatan purnawirawan TNI dalam jabatan sipil tanpa proses pemilihan, serta batas usia pensiun yang dinilai sudah tidak relevan. Ia juga menyebut bahwa masyarakat sempat mengaitkan revisi ini dengan masa Dwifungsi ABRI di era Orde Baru:

“Untuk singkatnya mungkin, dari titik poin, ee... di mana yang tadinya masyarakat berpikir bahwa Undang-Undang revisi ini akan sama persis seperti dengan waktu Dwifungsi ABRI, zaman periodenya Soeharto tahun 1998 itu berlaku. Mungkin di sini Bapak Presiden Prabowo lebih menegaskan kepada lemahnya tingkat pertahanan negara kita, khususnya di bidang cyber... Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini pun masih ada pensiunan-pensiunan tentara yang mana bisa menjabat di kementerian, di dunia politik tanpa perlu pemilihan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah batas usia untuk pensiun tentara...”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 juga mengetahui secara umum tiga poin utama dalam revisi UU TNI, yaitu: perubahan pada tugas pokok TNI, usia pensiun, dan penempatan personel TNI:

“Hm... Kalau tidak salah, revisi TNI itu tiga hal yang harus diubah. Yang biasanya tadi saya bilang: tugas pokoknya TNI, usia pensiun, sama satu lagi itu penempatannya.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan permasalahan yang muncul terkait Revisi Undang-Undang TNI. Dalam pandangan para informan, revisi terhadap Undang-Undang TNI memunculkan sejumlah permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran, baik dari segi sejarah, demokrasi, maupun dampaknya terhadap kehidupan sipil.

Informan 1 menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi dominasi militer dalam ranah sipil. Ia mengaitkan revisi ini dengan pengalaman historis masa Orde Baru, di mana militer memiliki kekuasaan yang sangat luas dan seringkali tidak terkendali. Ia juga menyinggung trauma kolektif masyarakat akibat praktik-praktik represif seperti penghilangan orang secara paksa:

“Masalah yang muncul, kan dia akan menduduki, menjabat posisi yang strategis dalam ranah sipilkan. Itu berarti dia akan memiliki kekuasaan yang harusnya tidak memiliki kekuasaan atas itu, jadi punya kekuasaan atas itu. Yang ditakutkan adalah dia melakukan hal-hal yang tidak harusnya. Karena kan ini sejarah ya... Nah hal-hal seperti itu yang harusnya tidak terjadi lagi, kayak misalnya orang-orang tiba-tiba hilang, kan dulu pendemo-pendemo tiba-tiba menghilang seperti itu... sangat melukai lah gitu sangat melukai kita.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti dampak sosial dari revisi tersebut, yaitu meningkatnya aksi demonstrasi di jalan dan di media sosial. Ia menyatakan bahwa citra TNI mulai berubah di mata masyarakat karena adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum, yang kemudian dikaitkan dengan legitimasi dari revisi UU ini:

“Masalah yang paling krusial itu adalah makin banyaknya demo ya, demo di jalan kemudian bahkan di media sosial. Yang tadinya masyarakat mendukung penuh kekuatan TNI kini sudah mulai berkurang akibat banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan yang akhirnya menjadi kemiringan berita bahwa gara-gara undang-undang revisi ini tentara jadi semena-mena untuk menerapkan kedisiplinan terhadap masyarakat.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan bahwa revisi ini membuka potensi konflik dengan nilai-nilai demokrasi. Ia memprediksi bahwa pihak-pihak yang kontra terhadap TNI akan menilai revisi ini sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi, khususnya terkait kemungkinan tumpang tindih antara kekuasaan militer dan sipil:

“Pastinya banyak. Orang-orang yang kontra dengan TNI pasti akan mencari masalah lebih banyak lagi. Ee... Misalnya nilainya demokrasi, pasti akan adanya tumpang tindih ya. Menurut saya seperti itu sih. Yang akan pasti ditekan pasti demokrasi.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pemahaman terhadap pasal-pasal yang direvisi dalam Undang-Undang TNI. Pengetahuan informan mengenai pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang TNI bervariasi. Sebagian besar informan tidak dapat menyebutkan secara spesifik nomor pasal, meskipun ada yang mengenali isi atau substansinya secara umum.

Informan 1 mengaku tidak mengingat atau tidak hafal pasal-pasal yang direvisi, meskipun mengaku telah membaca atau mendengar sebagian isi revisi tersebut melalui media:

“Saya nggak tahu nih, nggak hafal saya. Maksudnya lihat, dengar tapi nggak ingat... nggak ingat ya, nggak hafal lah gitu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyebutkan beberapa pasal yang menurutnya mengalami revisi dan menjelaskan isinya secara substansial. Ia menyebut Pasal 3 yang berkaitan dengan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, Pasal 47 yang berkaitan dengan keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil,

dan penambahan 14 kementerian yang dapat diisi oleh personel TNI tanpa proses pemilihan:

“Untuk pasal mungkin yang paling saya sering baca yaitu dari Pasal Ketiga dari revisi Undang-Undang bahwa pegerukan TNI ini sebenarnya adalah fungsinya untuk sebagai kekuatan pertahanan negara, kekuatan militer yang mana didukung oleh administrasi negara. Untuk Pasal Tiga. Kemudian untuk Pasal yang 47, jabatan sipil atau warga biasa dan prajurit aktif tentara yang sebelumnya fokus hanya kepada tugas-tugas pertahanan negara, perang dan sebagainya namun saat ini mereka sudah bisa menjabat di kementerian ataupun di organisasi-organisasi pemerintahan tanpa melalui seleksi atau tanpa pemilihan. Dan yang terakhir adalah adanya 14 kementerian yang bisa mereka isi dari jabatan tentara tersebut.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyebut tiga pasal yang menurutnya mengalami revisi, yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53, meskipun tanpa menjelaskan isi masing-masing pasal secara rinci:

“Pasal 7, Pasal 47, Pasal 53.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan sikap terhadap Revisi Undang-Undang TNI. Tanggapan para informan terhadap revisi Undang-Undang TNI terbagi ke dalam tiga posisi utama: menolak, ragu-ragu atau melihat situasi, dan mendukung. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pertimbangan sejarah, serta harapan terhadap kondisi negara ke depan.

Informan 1 dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap revisi tersebut. Ia berpendapat bahwa TNI seharusnya tetap berada di ranah militer dan tidak mencampuri urusan sipil. Menurutnya, pelibatan TNI dalam ranah sipil berisiko mengganggu tatanan demokrasi dan pembagian peran dalam pemerintahan:

“Saya engga setuju. Jujur-jujur saya nggak setuju. Menurut saya ya udahlah TNI udah duduk di tempatnya, membela negara,

kepentingan negara, fokus ke sana aja. Tidak usah menduduki ranah-ranah sipil, sudah biar yang lain saja yang mengurus masalah sipil ini. TNI, Polri tidak usah.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan sikap netral dan bersyarat, tergantung pada implementasi revisi tersebut ke depan. Ia mengakui adanya potensi positif, terutama dalam bidang keamanan siber dan pemberantasan korupsi. Namun, ia juga mencemaskan kemungkinan terjadinya kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan:

“Setuju tidaknya sih tergantung dari penerapannya nanti secara nyata... Kalau segi dari pro-nya ya... dari segi militer memang kita tidak pernah berperang tapi... itu bagian dari menteri pertahanan yang harus bisa dipegang oleh salah satunya dari TNI. Mungkin seperti itu. Kalau kontranya ya semoga sih dari undang-undang ini tidak ada tindak kekerasan kepada para pelaku kejahatan khususnya di bidang cyber...”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan mendukung revisi UU TNI. Ia membandingkan situasi keamanan saat ini dengan masa Orde Baru yang menurutnya lebih stabil dan aman. Dukungan terhadap revisi UU ini muncul dari harapan agar kondisi seperti masa lalu bisa kembali terwujud, meskipun ia menyadari adanya sisi negatif dari pendekatan tersebut:

“Setuju. Karena saya pernah mengalami... saya milenial, tapi saya merasakan zaman Orde Baru dulu itu seperti apa dengan zaman sekarang... Selama seumur saya, saya merasa aman di negeri saya sendiri. Berbeda dengan ketika terjadinya masa transisi tahun sembilan lapan. Jadi saya berharap revisi UU ini benar-benar bisa seperti dulu, mudah-mudahan ya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan Sikap Ideal Masyarakat dan Pemerintah terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI. Ketika ditanya bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah menyikapi isu revisi Undang-Undang TNI, para informan memberikan masukan yang

menekankan pentingnya kepekaan, keterbukaan, dan kehati-hatian, baik dari sisi rakyat maupun negara.

Informan 1 menegaskan bahwa masyarakat harus peka terhadap isu ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dalam sistem demokrasi, harus mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak mengambil keputusan secara sepihak:

“Kalau menurut saya sih harusnya masyarakat peka ya dengan hal-hal seperti ini karena nanti yang merasakan dampaknya kan ya masyarakat sendiri. Terus kalau untuk pemerintah, harusnya bagaimana bersikap ya... mereka lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kan negara kita ini negara demokrasi, yang paling bertahta, yang paling berkuasa itu harusnya ya rakyat. Mereka juga nggak boleh ngambil keputusan sepihak kalau memang rakyatnya tidak merasa dirugikan. Harusnya sih bisa diperbaiki keputusannya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti perlunya kebijaksanaan dari masyarakat dalam menyaring informasi, khususnya dari media. Ia menyadari bahwa media bisa membentuk opini yang tidak selalu akurat, sehingga penting bagi masyarakat untuk tidak langsung terpengaruh isu-isu yang belum jelas faktanya. Ia sendiri mengaku bersikap cukup terbuka terhadap revisi tersebut jika dinilai memiliki tujuan memperkuat keamanan nasional:

“Baik, dari segi masyarakat, khususnya saya pribadi sebagai warga sipil, bahwa dengan adanya berita tersebut, mungkin ada yang pro dan kontra. Namun dalam hal ini, jangan sampai ada hal yang kita tidak tahu, tapi langsung mengikuti apa kata media, yang mana belum tentu kebenarannya itu sesuai dengan fakta... Saya pribadi juga ada sedikit mendukung juga sebenarnya dengan revisi ini, karena dari segi politik, memang saat ini memang sedang turun drastis akibat banyak sekali kejadian-kejadian yang memang sudah viral, khususnya di tingkat keamanan negara.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menegaskan pentingnya kesadaran kolektif (awareness) baik dari masyarakat maupun pemerintah. Menurutnya, setiap Rancangan

Undang-Undang (RUU) pasti berdampak luas, sehingga keterlibatan dan pemahaman semua pihak sangat diperlukan:

“Menurut saya harus lebih aware sih, karena pasti segala sesuatunya, RUU apapun pasti akan berdampak dengan seluruh lapisan masyarakat.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Tabel 4.13 Ringkasan Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

Deskripsi	Mujiyati (I-1)	Zamaludin (I-2)	Santi (I-3)
Informasi Baru yang Diperoleh dari Pemberitaan tentang Revisi Undang-Undang TNI	Mengetahu RUU TNI telah di sahkan dan adanya demo	RUU TNI telah di tanda tangani presiden	Terdapat perbedaan RUU TNI, Tiga perbedaannya itu terkait dengan salah satunya tugas pokok TNI
Pemahaman Informan terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI	Memahami inti dari revisi UU TNI,	Dapat menjelaskan isu RUU TNI dengan rinci mengaitkannya dengan tiga poin utama	Dapat memahami Isu RUU TNI, dengan mengetahui secara umum tiga poin utama dalam revisi UU TNI,
Permasalahan yang Muncul Terkait Revisi Undang-Undang TNI	Adanya ancaman dominasi militer dalam ranah sipil	Terjadinya kecaman secara nyata dan secara daring, lalu turunnya citra TNI	Ancaman membuka potensi konflik dengan nilai-nilai demokrasi.
Pemahaman terhadap Pasal-Pasal yang Direvisi dalam Undang-Undang TNI	Tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan, namun telah membaca RUU TNI	Dapat menyebutkan serta menjelaskan pasal yang mengalami RUU TNI	Dapat menyebut tiga pasal yang menurutnya mengalami revisi
Sikap Terhadap Revisi Undang-Undang TNI	menyatakan tidak setuju terhadap revisi tersebut	menyatakan sikap netral dan bersyarat,	menyatakan mendukung revisi
Sikap Ideal Masyarakat dan Pemerintah terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI	menegaskan bahwa masyarakat harus peka terhadap isu ini	menyoroti perlunya kebijaksanaan dari masyarakat dalam menyaring informasi, khususnya dari media	menegaskan pentingnya kesadaran kolektif (awareness) baik dari masyarakat maupun pemerintah

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa Setelah membaca berita RUU TNI, informan 1 menjelaskan mendapatkan pemberita UU TNI telah di sahkan meskipun ia baru mengetahuinya setelah melihat berita tentang aksi unjuk rasa masyarakat, informan 2 mengetahui proses legislasi dan dampak sosial dan informan 3 mengetahui any mengetahui perbedaan konten antara versi lama dan baru.

Ketiga orang Informan dapat menjelaskan isu terkait RUU TNI, terutama terkait perluasan peran TNI ke ranah sipil (konsep dwifungsi), keterlibatan purnawirawan tanpa proses pemilihan, perubahan batas usia pensiun, dan kebutuhan pertahanan siber. Informan generasi X dapat menjelaskan isu RUU TNI karena menurut Nasution (2019) salahsatu karakteristik dari generasi Y adalah pandangan yang terbuka terhadap isu-isu politik dan ekonomi, serta responsif terhadap perubahan lingkungan sosial di sekitar mereka. Kemampuan mereka memahami isu ini juga didukung oleh pengalaman hidup di masa transisi politik. Selain itu, kebiasaan mengikuti berita membuat mereka peka terhadap perkembangan kebijakan negara. Dikarena karakteristik tersebut juga, para informan generasi Y dapat menjelaskan permasalahan yang timbul karena RUU TNI tersebut, informan 1 menjelaskan munculnya kekhawatirannya terhadap potensi dominasi militer dalam ranah sipil, informan 2 menjelaskan kekhawatirannya terhadap potensi dominasi militer dalam ranah sipil, informan 3 menjelaskan bahwa revisi ini membuka potensi konflik dengan nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya terlait menyebutkan pasal-pasal UU TNI yang mengalami revisi hanya informan 3 yang menyebutkan pasal-pasal spesifik (Pasal 3, 47, dan penambahan 14 kementerian). Sebagian lainnya menyebutkan angka pasal tanpa penjelasan, atau hanya tahu substansi tanpa mengingat nomor pasal. Tingkat pemahaman terhadap isi revisi UU TNI yang berbeda-beda di antara para informan, termasuk dalam hal penyebutan pasal-pasal secara spesifik, tampaknya turut memengaruhi sikap mereka terhadap revisi tersebut serta pandangan mereka mengenai peran masyarakat dalam merespons isu ini. Sikap dan pandang informan Y didasari karakter para informan yang dapat dibentuk tergantung pada

lingkungan tempat tumbuh, serta latar belakang sosial dan ekonomi keluarga (Nasution, 2019). Ketiga informan menyatakan pernyataan berbeda terkait sikap terhadap RUU TNI, informan 1 dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap revisi tersebut, karena alasan demokrasi, pengalaman sejarah buruk, informan 2 menyatakan sikap netral dan bersyarat, tergantung pada implementasi revisi tersebut ke depan, dan informan 3 menyatakan mendukung revisi UU TNI dengan nostalgia terhadap keamanan masa Orde Baru. Ketiga informan menjelaskan sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat, informan 1 menegaskan bahwa masyarakat harus peka terhadap isu ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat, informan 2 menyatakan perlunya kebijaksanaan dari masyarakat dalam menyaring informasi, khususnya dari media, informan 3 kesadaran kolektif diperlukan untuk menilai dampak luas RUU terhadap kehidupan bernegara.

c. Pemahaman Generasi Y tentang TNI pada Era Orde Baru

Pada bagian ini ketiga informan menjelaskan pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru. Untuk ini mereka menjelaskan pengalaman mengalami Masa Orde Baru. Ketika ditanya apakah pernah mengalami masa Orde Baru, seluruh informan menyatakan bahwa mereka pernah hidup di era tersebut, meskipun sebagian besar mengalaminya saat masih kecil. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang TNI karena pengalaman historis ini memengaruhi pandangan mereka terhadap keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.

Informan 1 mengonfirmasi bahwa ia mengalami masa Orde Baru, dan hal tersebut memengaruhi pandangannya mengenai potensi dampak negatif jika militer kembali aktif di ranah sipil:

“Iya saya masih mengalaminya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyebut bahwa ia masih kecil saat masa tersebut, namun tetap merasakannya:

“Saya memang masih kecil tapi saya mengalaminya.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyampaikan hal serupa, yaitu mengalami masa Orde Baru meskipun saat itu masih anak-anak:

“Iyaa saya mengalami walau masih kecil.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan informan terhadap militerisme pada Masa Orde Baru. Ketika ditanya tentang militerisme pada masa Orde Baru, para informan memberikan beragam pandangan yang mencerminkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap dominasi militer di masa tersebut. Beberapa menilai militerisme sebagai bentuk kekuasaan yang represif, sementara yang lain justru merasa bahwa kehadiran militer memberikan rasa aman dan stabilitas.

Informan 1 menggambarkan militerisme Orde Baru sebagai otoriter dan menekan, terutama karena struktur militer yang sangat hierarkis dan kaku. Ia mengkritik keterlibatan militer dalam urusan sipil, dan menyebut bahwa pendekatan tersebut terasa tidak manusiawi:

“Kayaknya sih kuat banget ya, menurut saya. Jadi memang, kan kalau militer itu kan atasan bilang A, bawahan suka enggak suka, harus mengikuti ya. Mengikuti perintah atasan, walaupun itu keluarganya sendiri. Kalau menurut saya sih kejam. Apa ya, enggak tepat aja gitu. Boleh lah silakan pakai otoritasnya di bidang militer silakan. Tapi kalau dari militer ke yang kaitannya sama sipil, kayaknya bukan di tempatnya deh.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 memandang militerisme masa Orde Baru sebagai kurang tepat karena terlalu terlibat dalam politik, yang seharusnya bukan ranah militer. Ia menilai peran militer semestinya difokuskan pada penanganan ancaman terhadap keamanan negara:

“Militarisme pada masa Orde Baru ini sangat kurang efektif karena ikut serta dalam kegiatan politik. Kalau untuk kegiatan militer,

karena seharusnya militer ini fokus terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan pengaruh terhadap keamanan negara.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 memiliki pandangan yang lebih positif terhadap militerisme di era Orde Baru. Ia merasa bahwa kehadiran militer saat itu menciptakan rasa aman yang tinggi, bahkan menyebut bahwa tindak kejahatan seperti pencopetan hampir tidak ada. Ia juga menyebut keberadaan militer dalam fungsi-fungsi khusus seperti sniper sebagai bagian dari sistem keamanan yang efektif:

“Militerisme kalau saya sih antara dulu dengan sekarang menurut saya sih pertama ya... sistemnya mereka sama, cuma mungkin kalau dulu tuh ya karena di zaman Soeharto, zaman Orde Baru, dia benar-benar bikin aman. Mungkin tenaga-tenaga TNI itu difungsikan untuk seperti sniper segala macam menurut saya. Cuma kan kalau di zaman sekarang tidak ada kayak gitu. Menurut saya zaman Orde Baru tuh militerismenya tuh lebih aman aja sih... Pencopet tuh hampir tidak ada, tapi ibu merasa militerismenya justru malah bikin kita aman dan nyaman gitu daripada zaman sekarang. Menurut saya sih saya lebih pro ke Orde Baru ya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap dwifungsi ABRI/TNI pada Masa Orde Baru. Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yaitu peran militer dalam urusan pertahanan sekaligus politik/sipil, menjadi salah satu ciri khas kekuasaan pada masa Orde Baru. Para informan memiliki persepsi yang beragam terhadap praktik ini, mulai dari penolakan hingga penerimaan bersyarat.

Informan 1 menilai bahwa praktik dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru sangat kuat dan jelas terlihat, bahkan dianggap menyisakan luka sejarah yang masih membekas hingga kini. Ia secara tegas menolak penerapan kembali dwifungsi, karena pengalaman masa lalu menunjukkan dampak buruk dari kekuasaan militer yang terlalu dominan:

“Kental banget kalau menurut saya. Makanya saya berpendapat jangan ada lagi dwifungsi. Kalau zaman dulu tuh kental banget ya praktik itu tuh benar-benar kelihatan lah. Kelihatan praktiknya yang

tadinya ada terus besoknya enggak ada. Itu kan ada apa, sesuatu. Walaupun banyak media yang coba menutupi... Tapi kan tetap aja itu bagian sejarah kita yang menurut saya sih pasti terkenang terus lah.” (Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menilai bahwa dwifungsi ABRI mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang tercermin dari lamanya Soeharto menjabat sebagai presiden. Ia menyarankan agar peran militer tetap dibatasi agar tidak kembali digunakan untuk kepentingan kekuasaan:

“Dwifungsi yang terjadi memang sebagai contoh Pak Harto yang menjabat sampai kurang lebih 30 tahun. Yang ini seharusnya sudah bisa dilihat bahwa dwifungsi ABRI atau fungsi dari tentara ini sudah terlihat jelas yang seharusnya bisa kita hindari, bahwa fungsi TNI ataupun militer jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah.” (Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 memberikan pandangan yang lebih kompleks dan bersifat ambivalen. Ia melihat ada sisi positif dari dwifungsi, terutama dalam konteks keamanan dan karakter militer yang dianggap lebih berdisiplin daripada sipil. Meskipun menyadari adanya “keganjilan” dan potensi penyalahgunaan, ia tetap merasa bahwa dwifungsi memberikan rasa aman dan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan sistem sipil sepenuhnya:

“Kalau zaman Orde Baru karena TNI itu dilibatkan ya dari segala hal... ada beberapa dampak positif, ada dampak negatif... Saya merasakan ya dulu walaupun saya tau ya banyak keganjilan sebenarnya, tapi gak tau ya kalau saya lebih pro aja gitu dengan dwifungsi itu. Buat saya gak masalah... Saya melihatnya mereka kan beda ya orang sipil dengan militer, dia itu kan bener-bener digembleng ya sekeras mungkin... rasa cintanya ke tanah air lebih tinggi daripada pengusaha.” (Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pengalaman melewati Masa Orde Baru. Setiap informan memiliki pengalaman yang berbeda dalam menjalani masa Orde Baru. Faktor usia, latar belakang keluarga, serta konteks sosial-politik saat itu sangat memengaruhi persepsi dan pengalaman mereka.

Informan 1 mengaku menjalani masa Orde Baru sebagai anak sekolah yang hidup dalam perlindungan orang tua, sehingga tidak merasakan langsung tekanan politik atau sosial saat itu. Ia menggambarkan masa itu sebagai periode yang tertib dan penuh aturan dari keluarga, yang membuatnya merasa aman:

“Dulu kan waktu saya masih SMP itu masih belajar ya, tugasnya belajar. Terus emang kita itu sebagai anak ya memang paling takut sama orang tua gitu... Jadi karena orang tua melindungi ya kita aman-aman aja sih... Kalaupun misalnya aktivitas lain paling ngaji keluar tuh. Ngaji sisanya belajar udah nggak kemana-mana... Saya sih aman karena di bawah orang tua gitu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 merasakan bahwa sebagai warga biasa, ia tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat. Ia menyebut keterbatasan hukum sebagai penghalang untuk protes, meskipun mengetahui adanya kerusuhan dan penjarahan pada tahun 1998. Ia hanya bisa mengikuti situasi melalui media, tanpa keterlibatan langsung:

“Cara melewatinya memang kalau saya sektor pribadi tidak bisa melakukan protes seperti yang terjadi di lapangan... Sampai sempat terjadi tahun 1998 penjarahan di mana-mana, kemudian terjadinya kriminal... sekali lagi saya hanya bisa mengikuti perkembangan berita saja tidak bisa terjadi secara langsung karena memang kami dibatasi secara hukum.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menilai masa Orde Baru secara relatif positif, terutama dari aspek ketertiban dan kepemimpinan. Meskipun menyadari ada sisi negatif seperti utang negara dan kekuasaan otoriter, ia merasa negara lebih teratur dibandingkan sekarang, dan menyatakan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto:

“Biasa aja, yaudah kayak sehari-hari biasa. Iya malah saya kalau disuruh milih saya tidak milih di zaman sebelum '90 kalau saya disuruh milih... tapi kalau zaman dulu walaupun mungkin saya bilang ada sisi negatif dan positifnya, tapi zaman si Bapak S itu Orde

Baru tapi beliau itu benar-benar yang percaya... dia bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara kita... tidak ada yang bisa setegas beliau, tidak ada yang bisa... benar-benar yang bisa meng-keep semua.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Tabel 4.14 Ringkasan Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

Deskripsi	Mujiyati (I-1)	Zamaludin (I-2)	Santi (I-3)
Pengalaman Mengalami Masa Orde Baru	mengalami masa Orde Baru	Menyatakan merasakan	mengalami masa Orde Baru meskipun saat itu masih anak-anak
Pandangan Informan terhadap Militerisme pada Masa Orde Baru	militerisme Orde Baru sebagai otoriter dan menekan	militerisme masa Orde Baru sebagai kurang tepat karena terlalu terlibat dalam politik	militerisme di era Orde Baru saat itu menciptakan rasa aman yang tinggi,
Pandangan Terhadap Dwifungsi ABRI/TNI pada Masa Orde Baru	praktik dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru sangat kuat dan jelas terlihat	dwifungsi ABRI mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan	memberikan pandangan yang lebih kompleks dan bersifat ambivalen. Ia melihat ada sisi positif dari dwifungsi,
Pengalaman Melewati Masa Orde Baru	mengaku menjalani masa Orde Baru sebagai anak sekolah yang hidup dalam perlindungan orang tua	merasakan bahwa sebagai warga tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat.	menilai masa Orde Baru secara relatif positif, merasa negara lebih teratur dibandingkan sekarang

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa ketiga orang Informan menyatakan pernah hidup di masa Orde Baru, meskipun usia mereka saat itu masih kecil. Generasi Milenial, atau yang dikenal sebagai Generasi Y, adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1981 hingga 1999 (Nasution, 2019). Generasi ini dikenal sebagai kelompok yang menghargai perbedaan, lebih menyukai kerja sama dibanding menerima perintah, dan memiliki pendekatan yang pragmatis dalam menyelesaikan masalah. Meskipun pengalaman mereka terhadap Orde Baru tidak sedalam Generasi X, ingatan masa kecil tetap memberikan gambaran tentang suasana politik saat itu. Hal ini membentuk cara pandang mereka terhadap isu-isu militer dan demokrasi di masa kini.

Pandangan para informan terhadap militerisme dan dwifungsi TNI pada era Orde Baru menunjukkan perbedaan yang mencolok. Informan 1 dan 2 sama-sama memandang militerisme sebagai bentuk otoritarianisme yang tidak semestinya memasuki ranah sipil. Keduanya juga secara tegas menolak konsep dwifungsi TNI, yang mereka anggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menggerus nilai-nilai demokrasi dan mengaburkan batas antara peran militer dan sipil. Sebaliknya, Informan 3 justru memiliki pandangan yang lebih positif terhadap militerisme, melihatnya sebagai sumber keamanan, disiplin, dan keteraturan sosial. Pandangan serupa ditunjukkan terhadap dwifungsi TNI, yang diterima secara pragmatis oleh Informan 3 karena dianggap efektif dalam menjaga stabilitas, meskipun ia tetap menyadari potensi penyimpangan yang menyertainya. Perbedaan ini mengindikasikan adanya variasi dalam cara Generasi X memaknai warisan militeristik Orde Baru, yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta orientasi mereka terhadap stabilitas dan demokrasi. Pernyataan informan mengenai pengalaman mereka pada masa orde baru, Informan 1 merasa masa Orde Baru aman karena berada dalam pengawasan ketat orang tua, tanpa akses terhadap ruang publik. Informan 2 mengalami keterbatasan kebebasan berekspresi, hanya bisa mengikuti berita tanpa berpartisipasi. Informan 3 justru melihat masa itu sebagai masa tertib dan teratur, dan bahkan menyatakan kekaguman terhadap kepemimpinan Soeharto.

d. Posisi Pemaknaan Generasi Y

Pada bagian ini ketiga informan menjelaskan pemaknaan pembungkaman pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co. Informan menjelaskan tanggapan terhadap pernyataan Tempo.co bahwa Revisi UU TNI menimbulkan kekhawatiran publik. Para informan memiliki pandangan yang beragam terkait apakah pembahasan revisi Undang-Undang TNI benar-benar menjadi sumber kekhawatiran publik seperti diberitakan oleh Tempo.co. Pandangan mereka dipengaruhi oleh peran sosial masing-masing, persepsi terhadap institusi militer, dan kepercayaan terhadap mekanisme politik negara.

Informan 1 menyatakan setuju penuh bahwa revisi UU TNI memang memicu kekhawatiran publik. Ia menekankan kekhawatiran jangka

panjang terhadap dampaknya bagi kehidupan sipil, terutama anak-anaknya kelak. Sebagai seorang ibu, ia merasa bahwa revisi ini bukan hanya persoalan hari ini, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi generasi berikutnya:

“Setuju, saya setuju banget. Karena ya itu, dampaknya akan dirasakan oleh kita sebagai sipil akan terasa sekali. Dan mungkin kalau anak-anak kan belum, saya sebagai orang tua pasti akan berpikir ke anak-anak ya. Nanti anak-anak saya juga akan merasakan dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan... saya sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 memberikan pandangan yang lebih skeptis terhadap efektivitas protes publik, termasuk dalam isu revisi UU TNI. Ia menyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat bukan hal baru dan kerap diabaikan, sebab pada akhirnya pemerintah tetap menjalankan undang-undang sesuai kehendaknya. Ia menyiratkan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan:

“Kalau untuk pembahasan revisi sebenarnya bukan hanya Undang-Undang TNI saja ya, sebenarnya banyak undang-undang yang tiap tahun selalu disanggah oleh masyarakat. Namun nyatanya, faktanya tetap biasanya undang-undang tersebut akan dijalankan, karena sekali lagi masyarakat hanya bisa menyaksikan, menonton. Meskipun demo besar-besaran pun tetap kekuasaan saat ini masih dipegang oleh pemerintah.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan bahwa kekhawatiran itu bersifat relatif, tergantung pada posisi masing-masing individu terhadap TNI. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak merasa terganggu atau terancam oleh revisi ini, dan justru menilai hal tersebut hanya menjadi masalah bagi pihak-pihak yang memiliki posisi kontra terhadap militer:

“Bagi orang-orang yang kontra dengan TNI pastinya akan menjadi bumerang bagi mereka. Pastinya akan jadi masalah bagi mereka.

Tapi buat kami, buat saya pribadi gitu, saya tidak merasa akan jadi masalah.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap urgensi pembahasan Revisi UU TNI. Tanggapan informan terhadap pernyataan media bahwa revisi UU TNI tidak memiliki urgensi memperlihatkan perbedaan sudut pandang. Sebagian informan meyakini bahwa revisi ini sangat penting, sementara yang lain mempertanyakan kebutuhan mendesaknya dalam konteks situasi nasional saat ini.

Informan 1 dengan tegas tidak setuju jika revisi UU TNI dianggap tidak urgen. Ia melihat revisi ini memiliki dampak luas yang akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sipil, sehingga pembahasannya sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius:

“Saya tidak setuju. Ini urgen sekali menurut saya. Sangat penting sekali karena berpengaruh ke segala sisi kehidupan kita. Dari semuanya sih nanti juga akan bisa berpengaruh kemana-mana.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa secara situasional, urgensi revisi memang tidak terlalu mendesak, terutama karena Indonesia tidak sedang dalam kondisi darurat seperti perang atau konflik besar. Namun, ia juga memahami bahwa dari sisi pemerintah, revisi ini mungkin dianggap penting untuk menangani isu-isu seperti perang siber dan korupsi, di mana keterlibatan TNI dinilai membawa ketegasan:

“Kalau urgensi memang tidak ada ya karena tidak terlalu mendesak juga... karena kita juga tidak ada perang, tidak ada kegiatan yang sangat krusial di pemerintahan. Tapi yang memang sedang dibahas oleh presiden ini adalah bagaimana caranya memberantas cyber, perang cyber, kemudian gimana cara memberantas korupsi. Salah satunya adalah memberdayakan fungsi dari TNI ini, ya mungkin salah satunya adalah ketegasan yang mungkin diambil.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 meyakini bahwa revisi ini pasti memiliki urgensi, meskipun ia tidak dapat menyebutkan secara spesifik bentuk urgensinya:

“Pasti memiliki. Cuman saya gak tahu apa.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pembahasan UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Mayoritas informan setuju bahwa pemerintah seharusnya mengalihkan fokus dari revisi UU TNI yang kontroversial ke UU lain yang lebih substansial dan berdampak langsung pada akuntabilitas institusi militer, seperti UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Informan 1 secara tegas mendukung pembahasan UU Peradilan Militer. Ia menilai bahwa persoalan terkait disiplin, pelanggaran hukum, dan seleksi anggota TNI jauh lebih relevan untuk dibahas dibandingkan isu dwifungsi. Ia juga menekankan perlunya pengawasan dan pengetatan seleksi, mengingat anggota TNI memiliki akses terhadap senjata:

“Oh, Mahkamah Militer ya? Ya sih, saya mendingan. Mendingan itu daripada ngurusin hal yang sekarang dibahas ini tentang dwifungsi TNI, mendingan ya itu lah... bagaimana dengan anggotanya yang keluar jalur, mendingan itu yang diurus... Mereka kan punya legalitas untuk memegang senjata. Kan kenyataannya banyak kan kejadian yang mereka menyalahgunakan... Kenapa enggak itu aja yang dibahas, enggak usah masalah dwifungsi ini yang enggak ada untungnya buat kami rakyat.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan dukungan terhadap pembahasan UU lain, terutama yang berkaitan dengan pengawasan hukum terhadap TNI. Ia bahkan menyebut bahwa fokus pada UU lama yang dilupakan bisa jadi lebih penting dibanding isu-isu yang hanya menjadi pengalihan perhatian dari persoalan besar seperti korupsi:

“Iya memang, jadi enggak hanya fokus pada Undang-Undang TNI. Juga masih banyak undang-undang yang perlu kita bahas, revisi yang dulu-dulu sudah hilang beritanya dan sekarang muncul lagi

sebagai pengalihan isu-isu berita-berita yang sekarang sedang marak, yaitu salah satunya adalah tindak penangkapan korupsi.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 juga setuju pada prinsipnya, meskipun menyatakan bahwa jika ternyata revisi tersebut sudah diatur dalam kebijakan lain, maka ia memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, ia tetap menyiratkan bahwa pembahasan ulang terhadap UU 31 Tahun 1997 adalah hal yang baik:

“Baiknya sih begitu. Baiknya ya. Tapi kalau memang ternyata ada... kebijakan-kebijakan lain ya mungkin ya sudah lah. Daripada yang kayaknya sudah-sudah kan DPR sepertinya ngomong langsung ditepalkan. Tidak apa-apa lah selama itu untuk kepentingan, kalau saya mau.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap Revisi UU TNI dan ancaman terhadap partisipasi publik. Tanggapan informan terhadap isu apakah revisi UU TNI mengancam partisipasi publik, sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co, menunjukkan perbedaan pendapat. Beberapa informan mengkhawatirkan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan kepercayaan masyarakat, sementara yang lain menganggap hal tersebut bergantung pada sudut pandang masing-masing. Informan 1 menyatakan setuju penuh bahwa revisi UU TNI dapat mengancam partisipasi publik, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Ia menyebut bahwa kehadiran militer di ranah sipil berpotensi menimbulkan rasa takut yang membuat warga enggan menyampaikan pendapat secara terbuka:

“Iya, karena saya setuju. Karena kan akan ada rasa takut di sana. Jadi dengan adanya rasa takut, jadi tidak bebas berekspresi. Jadinya yang harusnya dia bisa berekspresi sebanyak-banyaknya, karena ada itu, takut. Jadi mundurkan.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga mengamini bahwa revisi ini bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap militer, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pemberitaan yang ia ikuti lebih banyak menunjukkan penolakan publik terhadap revisi tersebut:

“Untuk partisipasi publik, sebenarnya ya tadi ada yang pro dan kontra. Tapi kalau dari segi berita yang saya baca, lebih banyak kepada tidak mendukungnya Undang-Undang revisi ini. Dan pasti akan terjadi ketidakpercayaan, ya... kekurangannya kepercayaan kepada tentara kita yang tadi sudah dipangung-pangungkan, akhirnya mulai runtuh.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3, sebaliknya, tidak setuju dengan pernyataan bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik. Ia menilai bahwa hal itu tergantung pada sudut pandang individu, dan menurutnya secara pribadi tidak ada ancaman terhadap ruang partisipatif masyarakat:

“Tidak, menurut saya tidak. Tergantung sudut pandang sih, tapi menurut saya tidak.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap Revisi UU TNI dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Pandangan informan terkait apakah revisi Undang-Undang TNI dapat mengancam kebebasan akademik menunjukkan adanya perbedaan sikap. Sebagian informan setuju bahwa kebebasan akademik bisa terdampak, khususnya terhadap mahasiswa dan civitas akademika yang kerap menjadi aktor dalam menyuarakan kritik, sementara yang lain menilai kekhawatiran tersebut berlebihan.

Informan 1 menyatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan akademik sangat mungkin terjadi, terutama karena ekspresi akademik—baik berupa opini, tulisan, maupun kritik—dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan. Ia menyebut bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari dunia akademik, dapat menjadi sasaran pembatasan kebebasan berpendapat:

“Akademik ya? Bisa jadi sih. Karena dari yang namanya pendapat bisa diupayakan, bisa di... disuarakan bisa dari berbagai macam cara. Kan kalau misalnya mahasiswa, berarti dia dari akademik. Dari bicaranya, dari pendapatnya dalam bentuk tulisan, itu kan kaitannya sama akademik. Bisa jadi menurut saya.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyoroti potensi represi terhadap mahasiswa, yang selama ini menjadi pihak paling vokal dalam menyuarakan pendapat melalui forum akademik seperti orasi dan diskusi terbuka. Ia menyatakan bahwa adanya revisi UU TNI bisa menyebabkan dampak langsung terhadap ruang demokrasi di lingkungan kampus:

“Kebebasan akademik, kebetulan sebagian besar disini adalah mahasiswa yang paling sering melakukan orasi-orasi. Jika itu terjadi, kemungkinan besar kekerasan ataupun sikap disiplinnya tentara bisa diterapkan kepada mahasiswa. Yang tadinya mereka bisa bersuara, bisa jadi dengan adanya revisi undang-undang ini malah membuat mahasiswa sulit melakukan demokrasi. Melakukan pembukaan suara itu juga akan berdampak besar, khususnya di akademik.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3, sebaliknya, menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa revisi ini akan mengancam kebebasan akademik. Ia menganggap bahwa ketakutan tersebut lebih bersumber dari trauma masa lalu dan tidak mencerminkan situasi objektif saat ini. Ia lebih mendorong adanya dialog antara semua pihak:

“Tidak sih. Hm... Tidak setuju. Tapi, ya makanya tadi saya bilang. Orang-orang yang mungkin kontra, pasti ada kayak gini karena adanya ketakutan tersendiri... Menurut saya harusnya duduk bareng. Dan saya sih kayaknya gak akan mengancam kebebasan. Gak akan.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap dugaan pengabaian prinsip demokrasi oleh pemerintah dalam Revisi UU TNI. Tanggapan informan terhadap apakah pemerintah mengabaikan prinsip demokrasi dalam proses revisi UU TNI menggambarkan perbedaan

persepsi tentang transparansi, partisipasi publik, dan legitimasi proses legislasi.

Informan 1 menyatakan setuju dan merasa bahwa pemerintah tidak adil kepada rakyat. Ia menilai bahwa proses pengambilan keputusan cenderung tertutup dan tergesa-gesa, bahkan dilakukan tanpa mempertimbangkan penolakan publik. Ia merujuk pada praktik legislasi sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam, termasuk keputusan-keputusan yang diambil pada malam hari:

“Ya sudah beberapa kali ya menurut saya pemerintah tuh enggak adil sama rakyat. Yaitu banyak-banyak keputusan yang kita enggak berpihak sama hal itu tapi sudah diputuskan. Apalagi kan dari kasus-kasus sebelumnya... banyak ya yang diputuskannya tengah malam, yang kita tuh benar-benar gak setuju. Padahal udah benar-benar kita menyuarakan, yang lain juga dari pihak lain juga menyuarakan kita tidak setuju, tapi aja ketuk palu. Itu rasanya tuh gak adil aja.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 tidak sepenuhnya setuju bahwa prinsip demokrasi diabaikan. Ia menyatakan bahwa masih ada lembaga dan kementerian yang menunjukkan penolakan, meskipun tidak dominan. Ia melihat bahwa pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan presiden, dan proses masih berjalan secara formal:

“Kalau dibilang diabaikan, sepertinya mungkin tidak ya. Karena ada beberapa instansi atau kementerian yang juga menolak revisi undang-undang ini. Tapi ya tidak banyak untuk bisa mendukung bahwa undang-undang ini bisa disahkan atau tidak. Tinggal kita lihat bagaimana dari keputusan presiden karena dia yang akan menandatangani. Kalau memang sepakat maka ya otomatis kita ikut serta saja.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan tidak setuju bahwa pemerintah mengabaikan demokrasi. Ia berpendapat bahwa keputusan yang diambil pasti melalui berbagai pertimbangan dan sudut pandang. Menurutnya, meskipun pemerintah memiliki kepentingan, hal tersebut tidak serta merta berarti prinsip demokrasi diabaikan:

“Kayaknya gak. Kalau diabaikan, bahasa diabaikan kayaknya gak mungkin ada yang baik. Cuma pastinya, kalau saya meyakini ketika pemerintah merevisi, pasti dia sudah ada berbagai pertimbangan, berbagai sudut pandang. Jadi tidak mungkin diabaikan. Pemerintah demokrasi, saya rasa kayak gak ada. Pasti ada kepentingan sendiri.” (Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap potensi kembalinya militerisme seperti Masa Orde Baru. Sebagian besar informan mengamini bahwa revisi Undang-Undang TNI berpotensi mengembalikan praktik militerisme ala Orde Baru, sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co. Namun, salah satu informan justru menganggap bahwa kembalinya model seperti itu dapat memberikan rasa aman, meskipun mengandung pendekatan yang keras.

Informan 1 menyatakan setuju dan menyebut bahwa persepsinya terhadap militerisme sudah terbentuk dari pengalaman langsung pada masa Orde Baru. Ia menyampaikan bahwa image militeristik Orde Baru masih melekat dalam benaknya, dan revisi UU TNI dikhawatirkan akan menghidupkan kembali praktik serupa:

“Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Saya sih bicara berdasarkan pengalaman saya, seperti itu menurut saya. Jadi ya, image-nya sampai sekarang yang melekat pada diri saya seperti itu. Saya percayanya seperti itu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga meyakini bahwa pengaruh Orde Baru akan kembali jika revisi UU ini diberlakukan. Ia bahkan menilai bahwa walaupun undang-undang tersebut tidak disahkan secara resmi, praktik pemerintahan yang mengarah pada model lama tetap bisa berjalan:

“Ya betul, bahwa Orde Baru yang sudah dijalankan oleh Pak Harto saat itu akan kembali lagi jika revisi undang-undang ini akan diteruskan. Namun kalau misalkan dicopot pun, tetap biasanya pemerintah akan menjalankan tanpa undang-undang tersebut disahkan.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3, meskipun mengakui kemungkinan kembalinya militerisme, tidak melihatnya sebagai ancaman, justru menyambutnya dengan positif. Ia memandang masa Orde Baru sebagai masa yang lebih aman dan tertib, meskipun pendekatan militer saat itu dikenal keras:

“Bisa jadi. Bisa jadi. Saya lebih suka yang kayak gitu. Karena contoh di zaman saya itu dulu, kita ke Pasar Senen, itu nggak dicopet, aman pokoknya ke Blok M. Tapi zaman sekarang copet di mana-mana. Karena dulu memang sudah ada tembakan-tembakan sniper-sniper kan. Saya sih berharap mendingan kayak gitu. Lebih aman negara.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pasal-pasal yang membuka peluang dwifungsi TNI. Mayoritas informan setuju bahwa pasal-pasal dalam revisi UU TNI yang memberikan peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI, sebagaimana terjadi di masa Orde Baru. Kekhawatiran ini muncul karena karakteristik struktural militer yang dianggap tidak berubah dan potensi perluasan peran militer dalam kehidupan sipil.

Informan 1 menyatakan setuju penuh bahwa revisi ini sangat mungkin membuka jalan kembalinya dwifungsi. Ia menyoroti karakter militer yang sangat hierarkis dan patuh terhadap atasan, yang menurutnya dapat menyebabkan keputusan sipil dipengaruhi oleh logika komando militer:

“Iya, menurut saya sih begitu. Karena dari dulu sampai sekarang karakter mereka sama menurut saya sih. Mereka karakternya seperti itu. Yang namanya tentara kan pasti tunduk sama atasan. Kalau atasannya bilang A, ya pasti ikut gitu. Dan itu karakternya sampai sekarang seperti itu. Jadi menurut saya sih ada kemungkinan besar kejadian yang dulu bisa jadi aja terjadi lagi sekarang.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga setuju, dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang memberi ruang bagi TNI aktif menduduki jabatan sipil, khususnya di 14

kementerian yang disebutkan dalam revisi, berpotensi membawa Indonesia kembali ke praktik dwifungsi ABRI:

“Kalau dilihat dari 14 kementerian yang diakui oleh negara, yang mana saya lihat sebagian besar memang potensi untuk tentara ini bisa seperti zaman dulu, yaitu dwifungsi ABRI. Bisa jadi akan kembali lagi.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 dengan singkat menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan bahwa revisi ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi:

“Setuju. Maksudnya, saya si tipengnya setuju.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum akibat Revisi UU TNI. Para informan memberikan pandangan beragam terhadap kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang TNI dapat membuat institusi TNI lebih kebal terhadap hukum atau sulit dikontrol secara hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Tempo.co. Beberapa menyatakan kekhawatiran atas perluasan kekuasaan TNI, sementara yang lain memandangnya secara lebih moderat.

Informan 1 setuju dengan pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa jika prajurit aktif mulai menduduki jabatan-jabatan strategis di ranah sipil, maka akan muncul kecenderungan tidak adanya akuntabilitas, karena jabatan tersebut memberi perlindungan kekuasaan:

“Bisa jadi kalau mereka menuduki ya ini, mereka menuduki tempat-tempat sipil yang strategis, jadi tidak bisa disentuh karena kekuasaannya. Bisa jadi. Makanya menurut saya ini mendingan mereka kembali aja ke barak lah gitu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 melihat masalah ini dari sisi struktur hukum yang berbeda antara sipil dan militer. Ia menyatakan bahwa TNI memang memiliki

sistem hukum tersendiri (hukum militer), yang dapat menciptakan persepsi bahwa mereka lebih sulit disentuh hukum umum. Namun ia juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya masih bisa disesuaikan tergantung konteks:

“Kalau secara hukum, sementara di tentara pun mereka punya hukum sendiri yang namanya hukum militer. Jadi kemungkinan besar juga ada hukum-hukum yang bisa dijalankan secara militer, ada yang tidak. Jadi mungkin masyarakat beranggapan bahwa jika nanti jabatan di kementerian ataupun pemerintah diambil alih oleh tentara, mereka akan berpikir bahwa semuanya hukum harus disesuaikan dengan militer. Mungkin enggak juga, bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 tidak setuju bahwa revisi ini akan menjadikan TNI kebal hukum. Ia menilai bahwa dalam praktik, TNI justru lebih dihormati masyarakat dibandingkan lembaga lain seperti Polri. Menurutnya, persepsi “tidak bisa disentuh hukum” lebih banyak melekat pada lembaga lain:

“Sebenarnya bukan sulit disentuh. Kalau saya sebagai masyarakat, selama ini saya melihatnya... antara TNI dengan Polri itu memang berbeda. TNI itu memang jauh lebih masyarakat ketimbang Polri. Polri, tahu sendirilah, banyaklah pengalaman-pengalaman... Tapi kalau TNI memang... ya mungkin karena memang tupoksinya berbeda kali ya. Jadi menurut saya enggak sih kayaknya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pencabutan Revisi UU TNI. Para informan memberikan tanggapan yang beragam terhadap usulan pencabutan revisi UU TNI. Sebagian informan mendukung pencabutan demi menjaga batas antara sipil dan militer, sementara yang lain memilih untuk menguji implementasinya terlebih dahulu, atau bahkan menyatakan tidak setuju dengan pencabutan karena menilai revisi tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap demokrasi yang dinilai sudah kebablasan.

Informan 1 menyatakan setuju penuh dengan pencabutan revisi UU TNI. Ia menilai bahwa TNI dan Polri sebaiknya kembali fokus pada fungsi

utama mereka di bidang pertahanan dan keamanan, dan tidak perlu masuk ke ranah sipil:

“Iya, saya lebih setuju itu. Saya lebih setuju dicabut aja dan mereka, para TNI Polri itu, para tentara, kembali ke tempatnya masing-masing aja.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan posisi yang lebih netral dan kontekstual. Ia menilai bahwa perlu ada uji coba implementasi terlebih dahulu untuk melihat apakah revisi ini berdampak negatif atau justru positif. Jika terbukti merugikan masyarakat, maka ia lebih setuju pencabutan dilakukan. Namun, bila terbukti efektif dalam membantu stabilitas nasional, revisi sebaiknya tetap dijalankan:

“Setuju juga dibilang setuju atau tidak, saya rasa kembali kepada fakta di lapangan. Jika bisa diujicoba terlebih dahulu undang-undang tersebut seperti apa realisasinya, jika lebih banyak merugikan masyarakat saya lebih setuju itu dicabut. Tapi jika lebih banyak menguntungkannya... mereka bisa mengamankan negara ini lebih aman, itu ya mungkin lebih baik diteruskan.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 tidak setuju dengan pencabutan revisi. Ia menganggap bahwa demokrasi di Indonesia saat ini telah melampaui batas dan revisi UU TNI dapat menjadi alat pengendali yang justru dibutuhkan. Menurutnya, demokrasi tetap perlu ruang, namun dengan batas dan aturan:

“Tidak. Lanjutkan. Lanjutkan kalau saya mau. Saya tipe yang tadi saya bilang. Sebetulnya saya netral ya... Tapi saya merasakan dua pembangunan: Orde Baru dan masa demokrasi. Demokrasi, menurut saya demokrasi di Indonesia itu... sudah kebablasan. Mungkin dengan adanya RUU ini, setidaknya demokrasi ini bisa lebih di... ada rulunya menurut saya gitu kan. Ada kendalinya... Jadi memang boleh demokrasi, tapi kalau bisa ada batasannya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan andangan terhadap tindakan kekerasan aparat terhadap mahasiswa dalam aksi Tolak Revisi UU TNI.

Seluruh informan mengakui perlunya pengamanan dalam demonstrasi, namun menekankan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat—terutama polisi—harus dihentikan, terlebih jika aksi mahasiswa berlangsung damai. Tanggapan mereka juga menunjukkan adanya pemahaman terhadap dinamika lapangan, termasuk kemungkinan adanya provokasi atau penyusupan dalam demonstrasi.

Informan 1 menyatakan setuju bahwa pengamanan demonstrasi adalah tugas polisi, bukan TNI. Namun, ia juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap tindakan aparat yang represif, meskipun memahami bahwa polisi adalah institusi yang paling relevan untuk menangani aksi mahasiswa:

“Walau bagaimanapun ketika ada mahasiswa misalnya melakukan demo, harus ada yang mengamankan. Kalau TNI rasanya tidak pas... ya siapa lagi? Nggak ada lagi kalau menurut saya kalau bukan polisi. Kalau TNI, kayaknya bukan ranahnya... Walaupun banyak hal yang, ‘ih kok begitu ya?’ dari kelakuan mereka yang kita lihat di media, banyak hal yang tidak setuju.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa polisi memang memiliki wewenang untuk menghentikan demo yang anarkis, namun penindakan kekerasan terhadap aksi damai adalah hal yang keliru dan harus ditolak. Ia mengingatkan bahwa media sering kali menggambarkan situasi yang tidak utuh:

“Kalau untuk menghentikan, mungkin memang sudah tugasnya polisi. Memang instruksi dari atasan bahwa bolehlah untuk demonstrasi tapi jangan anarkis. Nah, mungkin itu yang diputarbalikkan media... Tapi kalau misalkan dari para pendemo ini tidak melakukan hal apa-apa tapi mereka dihentikan dengan secara paksa, nah itu harus kita tolak.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 tidak setuju dengan kekerasan oleh polisi, namun juga menekankan bahwa demonstrasi yang baik dan tidak anarkis tidak akan memancing tindakan aparat. Ia melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab dua arah, antara demonstran dan aparat:

“Begini loh. Mahasiswa mendemo itu sah-sah aja. Kalau tindakan kekerasan yang dilakukan polisi, ya enggak setuju sih... Jadi kalau saya rasa gini, polisi maupun siapapun itu ketika melihat pendemo itu sudah anarkis, saya rasa pasti dia akan melindungi diri dan melindungi negara juga. Jadi tergantung dari si mahasiswa.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Tabel 4.15 Ringkasan Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI
Tempo.co

Deskripsi	Mujiyati (I-1)	Zamaludin (I-2)	Santi Rahayu (I-3)
Tanggapan terhadap Pernyataan Tempo.co bahwa Revisi UU TNI Menimbulkan Kekhawatiran Publik	setuju.	memberikan pandangan yang lebih skeptis	tidak setuju
Pandangan Terhadap Urgensi Pembahasan Revisi UU TNI	tidak setuju	Tidak setuju namun setuju	setuju
Pandangan terhadap Pembahasan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	setuju	setuju	setuju
Pandangan Terhadap Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Partisipasi Publik	setuju	setuju	tidak setuju
Pandangan Terhadap Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik	setuju	setuju	tidak setuju
Pandangan Terhadap Dugaan Pengabaian	setuju	tidak sepenuhnya setuju	tidak setuju

**Prinsip
Demokrasi oleh
Pemerintah
dalam Revisi
UU TNI**

**Pandangan
terhadap
Potensi
Kembalinya
Militerisme
seperti Masa
Orde Baru** setuju setuju setuju

**Pandangan
terhadap Pasal-
Pasal yang
Membuka
Peluang
Dwifungsi TNI** setuju setuju setuju

**Pandangan
Terhadap TNI
sebagai
Institusi yang
Sulit Disentuh
secara Hukum
akibat Revisi
UU TNI** setuju setuju tidak setuju

**Pandangan
Terhadap
Pencabutan
Revisi UU TNI** setuju menyatakan posisi tidak setuju
yang lebih netral dan
kontekstual.

**Pandangan
terhadap
Tindakan
Kekerasan
Aparat
terhadap
Mahasiswa
dalam Aksi
Tolak Revisi
UU TNI** setuju menyatakan bahwa tidak setuju dengan
polisi memang kekerasan oleh polisi,
memiliki wewenang serta menekankan
untuk menghentikan persoalan ini sebagai
demo yang anarkis, tanggung jawab dua
namun penindakan arah, antara demonstan
kekerasan terhadap dan aparat
aksi damai adalah
hal yang keliru dan
harus ditolak.

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa ketiga orang Informan memiliki pernyataan berbeda terkait RUU TNI menimbulkan kekhawatiran publik, Informan 1 sangat setuju dan melihat revisi sebagai ancaman jangka panjang bagi kehidupan sipil dan generasi mendatang. Informan 2 skeptis terhadap efektivitas kekhawatiran publik; menilai protes sering diabaikan. Informan 3 tidak merasa terganggu, melihat kekhawatiran sebagai isu kelompok yang kontra TNI. Terkait

RUU TNI memiliki urgensi atau tidak, informan 1 menganggap revisi sangat urgen, menyentuh semua aspek kehidupan sipil, informan 2 melihat urgensi bersyarat, bergantung pada isu pertahanan siber dan korupsi, informan 3 menyatakan mengakui urgensi tapi tidak memahami substansinya. Ketiga informan generasi Y ini setuju mengalihkan perhatian ke UU No. 31/1997, karena lebih relevan untuk kontrol, disiplin, dan akuntabilitas militer. Ketiga informan menjelaskan pandangan mereka RUU TNI dapat mengancam partisipasi publik, mereka menyatakan informan 1 dan 2 setuju penuh bahwa revisi UU TNI dapat mengancam partisipasi publik, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi, dan informan 3 tidak menyetujui hal tersebut, ia menilai bahwa hal itu tergantung pada sudut pandang individu. Kebebasan akademik akan terganggu karena RUU TNI 2 dari 3 informan yaitu informan 1 dan 2 setuju dan mereka menilai revisi UU TNI berpotensi menekan kebebasan berekspresi dan akademik, sedangkan informan menolak pandangan tersebut, menganggapnya sebagai ketakutan berlebihan.

Selanjutnya informan 1 menilai pemerintah mengabaikan demokrasi; keputusan kerap diambil tanpa aspirasi rakyat. Informan 2 netral; masih melihat proses berjalan meski dominasi eksekutif kuat. Informan 3 tidak setuju bahwa demokrasi diabaikan; yakin proses penuh pertimbangan. Informan 1 dan 2 menjelaskan bahwa menyatakan revisi membuka peluang kembalinya model militeristik Orde Baru, baik dari segi gaya kepemimpinan maupun dwifungsi ABRI. Satu informan yaitu informan 3 justru mendukung militerisme karena dirasa membawa ketertiban. Ketiga informan menyatakan setuju terkait RUU TNI akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti zaman orde baru. Informan 1 dan 2 menyampaikan kekhawatiran terhadap akuntabilitas hukum, terutama jika militer menduduki jabatan sipil strategis, sementara itu 1 informan yaitu informan 3 Menyatakan tidak setuju bahwa revisi ini akan menjadikan TNI kebal hukum, karena adanya kepercayaan besar masyarakat ke TNI. Terkait permasalahan pencabutan RUU TNI, Informan 1 mendukung penuh pencabutan. Informan 2 netral, menunggu hasil implementasi. Informan 3 menolak pencabutan; menilai demokrasi butuh kendali. Semua informan menolak kekerasan terhadap mahasiswa, tetapi memahami perlunya pengamanan. Ada pemahaman tentang kemungkinan provokasi, tapi tetap mendorong pengendalian aparat.

3. Pemaknaan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co oleh Generasi Z

a. Intensitas Pengguna Media Generasi Z

Pada sub bab ini, menjelaskan mengenai tanggapan informan terhadap intensitas penggunaan media. Ketiga informan menjelaskan portal berita yang sering digunakan. Dalam menanggapi pertanyaan mengenai portal berita yang sering digunakan, ketiga informan menunjukkan preferensi pada media yang dianggap kredibel dan mudah diakses, baik melalui situs resmi maupun media sosial.

Informan 1 menyatakan bahwa ia lebih sering mendapatkan informasi dari media sosial, namun secara khusus juga menyebut Tempo sebagai portal berita yang ia baca:

"Saya lebih suka baca di sosial media. Kemudian, kalau untuk portal berita yang saya baca, itu saya baca portal berita Tempo."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama informasi, namun kepercayaan terhadap Tempo juga tetap kuat sebagai rujukan.

Informan 2 menyebut Narasi TV sebagai portal berita yang sering ia akses. Meski tidak dijelaskan lebih lanjut, ini menunjukkan preferensi terhadap media yang cenderung mengusung jurnalisme independen dan progresif:

"Narasi paling."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyebut Tempo sebagai portal utama yang ia akses, dan menyebut adanya hubungan personal dengan orang dalam institusi tersebut sebagai faktor kepercayaan:

"Tempo. Karena kebetulan saya punya teman yang bekerja di Tempo."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan alasan memilih portal berita tertentu. Ketika ditanya mengapa mereka memilih menggunakan portal berita tertentu, para informan mengemukakan alasan yang berkaitan dengan kredibilitas, kedalaman informasi, dan sikap editorial media yang dianggap proporsional dan independen.

Informan 1 menjelaskan bahwa kredibilitas informasi menjadi alasan utama memilih Tempo sebagai portal berita yang diandalkan:

"Ya, menurut saya dari segi kredibilitas informasi, itu Tempo sejauh ini yang paling saya percaya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan terhadap akurasi dan integritas editorial Tempo, yang dinilai lebih dapat diandalkan dibandingkan media lainnya.

Informan 2 menilai bahwa Tempo dan Narasi TV menyajikan berita dengan faktualitas dan kedalaman analisis, serta memiliki jumlah pengikut yang besar yang memperkuat kesan profesionalisme mereka:

"Tempo menarik karena beberapa bilang bahwa beritanya tuh faktual ya, terus juga kalau Narasi juga kan followers-nya banyak dan kayaknya memang menggali beritanya tuh dalam berdasarkan kenyataan gitu, jadi yaudah saya suka itu."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Di sini terlihat bahwa pilihan terhadap media juga dipengaruhi oleh reputasi di kalangan publik dan persepsi kualitas liputan.

Informan 3 menilai media seperti Tempo lebih proporsional dan akurat, serta tidak terlalu berpihak kepada pemerintah, meskipun diakuinya bahwa semua media memiliki potensi kepentingan tertentu:

"Sejauh yang saya pahami, portal berita tersebut cukup... proporsional untuk menyajikan berita. Dan menurut saya lebih akurat. Tidak terlalu berpihak kepada pilihan pemerintah... sejauh ini menurut saya, mereka lebih proporsional."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan frekuensi akses terhadap portal berita. Terkait frekuensi dalam mengakses portal berita, ketiga informan mengungkapkan bahwa mereka secara rutin dan intensif mengikuti perkembangan isu melalui berbagai kanal, baik melalui situs berita maupun media sosial. Hal ini menunjukkan tingginya minat mereka terhadap informasi terkini, terutama terkait Revisi UU TNI.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia selalu memantau informasi, terutama untuk isu yang dianggap penting seperti Revisi UU TNI:

"Untuk hal ini saya menggunakan portal setiap saat untuk mendapatkan informasi. Tentunya saya selalu menunggu update-an berita terkait RUU TNI ini."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan aktif mencari informasi, dan menjadikan portal berita sebagai sumber utama dalam mengikuti isu kebijakan publik.

Informan 2 menyatakan bahwa ia membaca atau menonton berita setiap hari, baik melalui artikel, video, maupun konten visual di media sosial:

"Kayak setiap hari sih, karena pasti saya sempetin apa yang lagi update di hari ini... pasti ada aja yang ditonton, pasti ada aja yang dibaca. Entah itu dari Reels atau dari video, atau dari Carousel."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Ini menunjukkan bahwa konsumsi berita dilakukan secara konsisten dan fleksibel, melalui berbagai format konten digital yang mudah diakses.

Informan 3 menyampaikan bahwa ia sering terpapar berita melalui media sosial, di mana algoritma platform sudah menyesuaikan minat informatifnya:

"Sering ketika membuka medsos. Biasanya algoritmanya sudah ke arah ke portal berita tersebut."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kebiasaan digital memengaruhi pola konsumsi berita, di mana algoritma secara otomatis menyesuaikan konten yang tampil berdasarkan minat pengguna.

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan topik berita yang sering dikonsumsi. Dalam menjelaskan topik-topik berita yang sering dibaca, para informan mengungkapkan ketertarikan terhadap isu-isu aktual dan substantif, terutama yang berkaitan dengan kebijakan negara, regulasi publik, dan ketimpangan sosial. Isu revisi Undang-Undang TNI juga secara eksplisit disebut sebagai perhatian utama.

Informan 1 menyatakan bahwa ia secara khusus fokus pada aspek-aspek utama dari revisi UU TNI, menunjukkan minat yang terarah pada dinamika kebijakan publik dan pertahanan:

"Tentunya topik yang sering saya baca, ya itu terkait apa saja aspek utama terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Karena itu kan yang merupakan poin penting dalam isi dari revisi Undang-Undang TNI ini."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Hal ini memperlihatkan bahwa informan aktif mengikuti secara mendalam konten substansi undang-undang serta potensi dampaknya terhadap masyarakat sipil dan sistem pemerintahan.

Informan 2 memiliki ketertarikan pada topik yang beragam, mencakup isu regulasi pemerintah, kriminalitas, dan ketimpangan hukum:

"Beragam. Regulasi pemerintah, terus masalah isu-isu sosial, terus juga kriminal yang sedang terjadi... kasus-kasus yang timpang ya, maksudnya kayak udah dilaporin tapi lama diusutnya, kayak gitu-gitu saya juga suka."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan kepekaan terhadap isu keadilan dan akuntabilitas hukum, serta kesadaran terhadap fungsi kontrol media terhadap negara.

Informan 3 menyebutkan ketertarikan pada isu-isu yang sedang “dikulik”, seperti revisi UU TNI dan topik pendidikan, yang dianggap penting dan relevan secara sosial:

"Kalau yang terpilih akhirnya adalah ke ranah-ranah yang sering dikulik. Misalnya yang tentang revisi Undang-Undang TNI, itu yang saya akan baca. Kalau tentang pendidikan, itu yang akan saya baca."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan pilihan yang selektif namun kontekstual, di mana informan cenderung mengikuti topik yang mendapat perhatian publik dan berdampak luas.

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan tingkat partisipasi informan dalam mengikuti pemberitaan Revisi UU TNI. Ketika ditanya apakah mereka mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI, semua informan mengaku telah mengetahui dan mengikuti isu tersebut, meskipun dengan tingkat keterlibatan dan kedalaman yang bervariasi. Informan 1 secara tegas menyatakan bahwa ia aktif mengikuti perkembangan revisi UU TNI, terutama karena merasa hal itu penting untuk diketahui generasi muda:

"Ya tentunya saya sebagai usia muda, saya mengikuti terkait perkembangan pemberitaan revisi undang-undang TNI."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran generasional dan tanggung jawab warga negara dalam memahami isu yang menyangkut struktur negara dan relasi sipil-militer.

Informan 2 mengakui bahwa ia tidak secara intens mengikuti, namun tetap terpapar oleh isu tersebut melalui berbagai platform media sosial dan berita online:

"Mengikuti banget sih enggak ya. Cuma sempat tahu karena kan itu viral ya di mana-mana. Di sosial media, YouTube, di platform-platform berita juga. Itu sudah tersebar."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak mendalami, kesadaran informan tetap terbentuk melalui eksposur digital, terutama dari konten viral. Informan 3 menyampaikan bahwa ia mengikuti isu tersebut melalui dua kanal utama, yaitu media sosial dan televisi:

"Ya, saya mengikuti... tentang revisi Undang-Undang TNI melalui media sosial dan juga pemberitaan di televisi."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Ini menandakan bahwa informan menggabungkan sumber berita digital dan konvensional untuk membentuk pemahamannya terhadap isu publik yang sedang berkembang.

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan portal berita yang digunakan untuk mengikuti pemberitaan Revisi UU TNI. Dalam menanggapi pertanyaan mengenai sumber informasi seputar revisi Undang-Undang TNI, para informan menyebutkan berbagai portal berita daring dan media sosial yang menjadi rujukan utama. Pilihan mereka menunjukkan preferensi pada media arus utama yang dianggap kredibel, serta platform digital yang menyajikan konten secara visual dan menarik.

Informan 1 menyebutkan bahwa ia aktif mengikuti informasi dari beberapa portal berita besar, termasuk Kompas, Tempo, dan CNN, yang ia akses melalui media sosial:

"Kebetulan saya aktif di sosial media, saya aktif juga membaca berita-berita dari Kompas, Tempo, CNN."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Ini menunjukkan bahwa informan mengandalkan media mainstream nasional yang dikenal memiliki jurnalisme investigatif dan kredibilitas tinggi, khususnya untuk isu-isu kenegaraan seperti revisi UU TNI.

Informan 2 lebih sering mengakses informasi dari platform video dan media sosial, terutama kanal YouTube Najwa Shihab dan akun Instagram Narasi TV:

"Biasanya YouTube. Dari YouTube-nya Najwa Shihab. Atau Instagram ya. Narasi."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pilihan ini menegaskan bahwa figur jurnalis independen dan konten visual lebih efektif menjangkau generasi yang lebih muda, terutama dalam membahas isu-isu berat dengan pendekatan yang naratif dan komunikatif. Informan 3 menyampaikan bahwa ia mengikuti berita dari Narasi TV, Tempo, dan Kompas secara konsisten:

"Kalau saya lebih seringnya dari Narasi (TV), kemudian Tempo, sama Kompas. Biasanya itu yang saya gunakan sebagai portal berita."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Kombinasi dari media alternatif-progresif (Narasi) dan media konvensional (Tempo, Kompas) menunjukkan bahwa informan memadukan pendekatan analitis dengan informasi faktual dalam memahami isu.

Tabel 4.16 Ringkasan Intensitas Penggunaan media

Deskripsi	Andika (I-1)	Yeni (I-2)	Ajeng Utami (I-3)
Portal Berita yang Sering Digunakan	Tempo dan media sosial	menyebut Narasi	menyebut Tempo
Alasan Memilih Portal Berita Tertentu	kredibilitas informasi	faktualitas dan kedalaman analisis,	proporsional dan akurat, serta tidak terlalu berpihak kepada pemerintah
Frekuensi Akses terhadap Portal Berita	Setiap saat	setiap hari	Menyatakan sering membuka media sosial
Topik Berita yang Sering Dikonsumsi	menyatakan fokus pada aspek-aspek utama dari revisi UU TNI	topik yang beragam, mencakup isu regulasi pemerintah, kriminalitas, dan ketimpangan hukum	menyebutkan ketertarikan pada isu-isu yang sedang "dikulik", seperti revisi UU TNI dan topik pendidikan
Tingkat Partisipasi Informan dalam Mengikuti	aktif mengikuti perkembangan revisi UU TNI,	intens mengikuti	mengikuti isu tersebut

Pemberitaan
Revisi UU
TNI

Portal Berita yang Digunakan untuk Mengikuti Pemberitaan Revisi UU TNI Kompas, Tempo, dan CNN dan media sosial platform video dan media sosial, dan narasi Narasi TV, Tempo, dan Kompas

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa ketiga informan menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan informan lebih sering mengakses berita melalui media sosial, tetapi tetap mengandalkan portal berita arus utama (seperti Tempo, Kompas, CNN, dan Narasi TV) sebagai sumber informasi yang kredibel.

Fenomena ini sejalan dengan karakteristik Generasi Z yang disebut sebagai digital native atau penduduk asli dunia digital, karena mereka lahir dan tumbuh di era digital (Grail Research dalam Najah, 2022). Gaya hidup digital ini juga tercermin dari kebiasaan mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya dan bermain game online dibandingkan dengan aktivitas fisik di luar rumah (Zis, Effendi, & Roemdalam Najah, 2022), yang turut memengaruhi cara mereka mengakses dan mengonsumsi informasi. Kemudahan teknologi membuat Generasi Z terbiasa mendapat informasi secara cepat dan instan. Hal ini juga membentuk kebiasaan mereka untuk memverifikasi informasi dari media sosial dengan sumber berita yang lebih terpercaya. Kebiasaan dan karakteristik ini turut memengaruhi preferensi mereka dalam memilih portal berita yang diakses saat ditanya mengenai alasan pada saat wawancara informan generasi Z, ketiganya memiliki alasan utama dalam memilih portal berita adalah kredibilitas, kedalaman analisis, dan sikap editorial yang proporsional, mereka mengakses berita setiap hari, baik melalui artikel, video, Reels, maupun carousel Instagram.

Dalam wawancara yang dilakukan informan menerangkan topik yang diminati oleh informan 1, 2 dan 3 memiliki ketertarikan terhadap isu-isu aktual dan substansial, seperti revisi UU TNI, regulasi pemerintah, dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Ketertarikan terhadap isu-isu tersebut tercermin dalam respons mereka saat ditanya mengenai keterlibatan terhadap pemberitaan revisi

UU TNI. Terdapat pertanyaan dalam wawancara kepada informan, apakah informan mengikuti pemberitaan terkait RUU TNI?, semua informan menjawab semua informan menyatakan mengetahui dan mengikuti isu revisi UU TNI, meskipun tingkat keterlibatan berbeda-beda, dengan portal berita yang beragam dari media sosial, televisi, dan portal berita daring. Pemahaman mendalam ini memperlihatkan bahwa informan tidak hanya mengikuti isu secara pasif, tetapi juga menganalisis implikasi dari revisi tersebut.

b. Pemahaman Generasi Z tentang Revisi Undang-Undang TNI

Pada sub bab ini, menjelaskan mengenai tanggapan informan terhadap pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI. Selanjutnya ketiga informan menjelaskan informasi baru yang diperoleh terkait Revisi Undang-Undang TNI. Ketiga informan mengungkapkan bahwa setelah membaca pemberitaan terkait revisi UU TNI, mereka memperoleh berbagai informasi penting, baik mengenai isi revisi itu sendiri, proses pembahasannya, hingga dampak potensial terhadap demokrasi dan kontrol sipil.

Informan 1 menyampaikan bahwa informasi baru yang diperolehnya mencakup perluasan tugas militer ke ranah sipil, perpanjangan usia pensiun, dan kekhawatiran dari kelompok sipil terhadap potensi lemahnya kontrol masyarakat terhadap militer:

"Untuk informasi yang sudah saya baca, ada informasi yaitu berupa yang pertama, adanya rencana perluasan tugas TNI di luar dari pertahanan, termasuk penugasan di lembaga sipil. Kemudian ada perpanjangan usia bagi perwira tinggi TNI. Kemudian ada juga kekhawatiran dari sejumlah kalangan sipil maupun aktivis HAM, sehingga revisi ini berpotensi untuk melemahkan kontrol sipil terhadap militer."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan perhatian terhadap substansi kebijakan dan dampak strukturalnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Informan 2 lebih menyoroti proses penyusunan RUU yang dianggap tidak transparan dan dilakukan secara tertutup, serta kekhawatiran terhadap prinsip kedaulatan rakyat:

"Pertama, ini beritanya muncul seru banget. Karena di... rapatnya atau disusunnya itu secara tersembunyi di hotel yang mewah... Kemudian, kenapa ini jadi gitu? Karena memang ada kekhawatiran masyarakat bahwa RUU ini bisa mencintai demokrasi."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan mengaitkan proses pembentukan undang-undang dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan keterbukaan.

Informan 3 secara spesifik mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi kembalinya praktik dwifungsi TNI, yang menjadi ciri dominan rezim Orde Baru:

"Ya... yang saya koncern adalah tentang pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI. Kalau dulu namanya ABRI, di masa Orde Baru. Sekarang kita bilang TNI. Lebih ke arah itu sih."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran historis bahwa revisi UU TNI dapat membuka ruang bagi dominasi militer dalam ranah sipil, sebagaimana terjadi pada masa lalu.

Selanjutnya Ketiga informan menjelaskan pemahaman informan mengenai isu Revisi Undang-Undang TNI. Secara umum, para informan menunjukkan pemahaman yang cukup komprehensif terhadap substansi dan kontroversi revisi UU TNI. Mereka mampu menjelaskan poin-poin utama dalam isu ini, seperti perluasan peran militer, penambahan usia pensiun, serta implikasi terhadap demokrasi dan reformasi sektor keamanan.

Informan 1 memaparkan isu secara sistematis, menyoroti dua poin besar dalam revisi: perluasan peran militer ke ranah sipil dan perpanjangan usia pensiun, serta kekhawatiran masyarakat sipil terhadap transparansi proses dan potensi kemunduran demokrasi:

"Untuk isu revisi Undang-Undang TNI, mencuat karena adanya usulan untuk memperluas peran militer ini dalam kehidupan sipil.

Dan juga poinnya untuk memperpanjang usia pensiun prajurit... yang mana dapat mengancam prinsip demokrasi... Sementara masyarakat sipilnya itu menuntut evaluasi menyeluruh, dan yang paling penting transparansi dalam prosesnya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menekankan kurangnya urgensi dari pembahasan RUU tersebut dan mempertanyakan prioritas pemerintah, serta menyoroti kurangnya transparansi dan potensi pelanggaran prinsip demokrasi:

"RUU TNI ini tuh kenapa banyak yang kontra? Karena pertama, memicu kekisruhan... banyak pasal-pasal kontroversial... tidak ada urgensinya sebenarnya... dan kenapa juga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak transparansi aja sih?"

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 memfokuskan perhatiannya pada kekhawatiran utama yakni pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI/TNI, dan menambahkan dua poin lain: penambahan usia pensiun serta peran TNI dalam operasi militer:

"Kalau revisinya ini yang saya ikuti... saya lebih fokus ke pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI atau TNI... yang kedua tentang penambahan usia pensiun TNI, yang ketiga adalah kedudukan TNI dalam operasi militer."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan permasalahan yang muncul terkait Revisi Undang-Undang TNI. Para informan secara konsisten mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam revisi UU TNI yang dinilai berpotensi mengganggu tatanan demokrasi, melemahkan kontrol sipil, dan minim partisipasi publik. Permasalahan tersebut mencakup substansi isi revisi, mekanisme legislasi, serta prosedur yang tidak transparan.

Informan 1 menjelaskan dengan rinci permasalahan dari sisi substansi dan tata kelola, meliputi: Perluasan peran militer ke ranah sipil, Perpanjangan usia pensiun yang berisiko menumpuk jabatan, Kurangnya transparansi dan partisipasi publik, Potensi konflik kepentingan antara sipil dan militer

"Masalah yang muncul... perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan... perpanjangan usia pensiun... kurangnya partisipasi publik dan transparansi... potensi konflik kepentingan antara militer dan lembaga-lembaga sipil."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti lebih dalam pada aspek minimnya kontrol sipil dan potensi militerisasi ranah publik, yang dinilai dapat menimbulkan rasa takut dan membungkam aspirasi warga negara:

"Permasalahan yang muncul ya itu tadi nggak ada evaluasinya, kemudian juga jadi minimnya kontrol sipil... takutnya kita kena militarisasi segala macam. Nah itu yang dikhawatirkan sama masyarakat."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 fokus pada permasalahan proses pembahasan, terutama: Ketergesaan waktu, Kurangnya akses publik, Prosedur tertutup yang tidak transparan

"Terkait sama waktu yang terlalu cepat untuk direvisi... rapatnya di hotel, tertutup, tidak ada akses publik... lucu kan, ada efisiensi tapi tertutup."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pemahaman informan tentang pasal-pasal Revisi UU TNI. Informan memiliki pemahaman yang bervariasi terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengalami revisi. Meskipun tidak semua informan dapat menyebutkan pasal secara spesifik, mereka menunjukkan pemahaman terhadap substansi perubahan yang dianggap krusial.

Informan 1 mampu menyebutkan dengan cukup rinci beberapa pasal yang mengalami perubahan, di antaranya:

- a) Pasal 47: Mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, yang mengalami perluasan dari sebelumnya hanya di

Kementerian Pertahanan dan instansi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, kini menjangkau lebih banyak lembaga sipil.

- b) Pasal 53 dan Pasal 71: Mengatur batas usia pensiun prajurit TNI, yang mengalami perubahan dari 58 tahun menjadi 60 tahun bagi perwira tinggi.
- c) Penambahan juga disebut terkait tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang memperluas ruang lingkup keterlibatan TNI dalam urusan non-militer.

"Yang pertama ada Pasal 47... Kemudian ada Pasal 53 dan 71... Juga penambahan jenis tugas operasi militer selain perang."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa ia tidak dapat menjelaskan secara detail pasal-pasal tersebut:

"Saya nggak bisa detailin satu-satunya."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyebut beberapa substansi perubahan, seperti terkait keamanan siber dan usia pensiun, namun mengakui lupa mengenai nomor pasal:

"Untuk hal ini saya mengetahui pasal yang diubah membahas tentang cyber, terus penambahan usia pensiun, namun untuk pasal berapa ayat berapa saya sedikit lupa."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan sikap informan terhadap Revisi Undang-Undang TNI. Sikap ketiga informan terhadap revisi Undang-Undang TNI menunjukkan posisi yang kritis dan penuh kehati-hatian. Meskipun ada pengakuan terhadap potensi positif dari revisi, namun kekhawatiran akan kembali menguatnya peran militer dalam ranah sipil menjadi perhatian utama.

Informan 1 mengambil sikap netral-kritis, di mana ia tidak sepenuhnya menolak atau menyetujui, namun menekankan pentingnya pengawasan yang ketat:

“Saya tidak sepenuhnya setuju maupun menolak. Karena namanya undang-undang itu ada baik, ada sisi positif dan negatifnya... Namun revisi ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Kalau tidak ya bisa memperluas peran militer peran sipil kembali.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pasal-pasal tertentu, terutama yang memberi ruang kepada prajurit TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil:

“Beberapa pasal nggak setuju karena katanya RUU TNI ini itu memberikan kesempatan bahwa TNI bisa punya jabatan dua ya? Seperti ke sipil... bisa aja terjadi kesewenang-wenangan dalam pelimpahan tugas.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 secara tegas menyatakan penolakannya terhadap pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI, yang dianggap sebagai bentuk kemunduran ke masa Orde Baru:

“Untuk pemberlakuan dwifungsi ABRI, saya tidak setuju, hahahaha. Karena akan kembali kepada Orde Baru. Itu yang saya pahami.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan sikap ideal masyarakat dan pemerintah terhadap Revisi Undang-Undang TNI. Ketiga informan menekankan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah harus memiliki peran aktif, terbuka, dan kritis dalam menyikapi isu revisi Undang-Undang TNI. Terdapat seruan kuat agar proses ini dijalankan secara transparan, inklusif, dan dengan melibatkan publik.

Informan 1 menegaskan pentingnya partisipasi kritis dari masyarakat serta keterbukaan dari pemerintah:

“Sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mempunyai sikap yang kritis dan juga aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber... Pemerintah juga harus bersikap transparan dan juga melibatkan partisipasi publik serta pakar dalam proses pembahasan undang-undang ini.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proses legislasi:

“Sebagai warga negara Indonesia tentunya apapun yang dirancang, dibuat apalagi ini Undang-Undang... kita tetap harus peduli dan kita harus cari tahu. Karena tujuannya adalah kalau kita tahu, kita enggak mudah dibohongi.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara Informan 3 menyampaikan kritik terhadap sikap pemerintah yang dianggap kurang terbuka, serta menyayangkan minimnya ruang partisipasi publik:

“Pemerintah bersikap cukup tertutup dan terburu-buru dalam membahas isu revisi Undang-Undang TNI... dari sisi masyarakat, yang terlihat adalah kita tidak diberikan akses untuk terlibat dalam revisi Undang-Undang TNI.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Tabel 4.17 Ringkasan Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

Deskripsi	Andika (I-1)	Yeni Aryanti (I-2)	Ajeng Utami (I-3)
Informasi Baru yang Diperoleh Terkait Revisi Undang-Undang TNI	menyampaikan bahwa informasi baru yang diperolehnya mencakup perluasan tugas militer ke ranah sipil, perpanjangan usia pensiun, dan kekhawatiran dari kelompok sipil	lebih menyoroti proses penyusunan RUU yang dianggap tidak transparan dan dilakukan secara tertutup, serta kekhawatiran terhadap prinsip kedaulatan rakyat	secara spesifik mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi kembalinya praktik dwifungsi TNI, yang menjadi ciri dominan rezim Orde Baru
Pemahaman Informan Mengenai Isu	Memiliki pemahaman yang baik	Memiliki pemahaman yang baik	Memiliki pemahaman yang baik

Revisi Undang-Undang TNI

Permasalahan yang Muncul Terkait Revisi Undang-Undang TNI

Dapat menjelaskan masalah yang ada

Dapat menjelaskan maslaah yang ada

Dapat menjelaskan masalah yang ada

Pemahaman Informan tentang Pasal-Pasal Revisi UU TNI

mampu menyebutkan dengan cukup rinci beberapa pasal yang mengalami perubahan

Tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan

Tidak menyebutkan hanya menjelaskan pasal yang direvisi

Sikap Informan terhadap Revisi Undang-Undang TNI

mengambil sikap netral-kritis

menunjukkan ketidaks etujuan

Tidak setuju

Sikap Ideal Masyarakat dan Pemerintah terhadap Revisi Undang-Undang TNI

menegaskan pentingnya partisipasi kritis dari masyarakat serta keterbukaan dari pemerintah

menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proses legislasi

menyampaikan kritik terhadap sikap pemerintah yang dianggap kurang terbuka, serta menyayangkan minimnya ruang partisipasi publik

Sumber. Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa Ketika ditanya mengenai informasi yang didapat setelah membaca berita RUU TNI seluruh informan Informan memahami bahwa revisi UU TNI mencakup perluasan peran militer di ranah sipil, perpanjangan usia pensiun, serta potensi melemahnya kontrol sipil. Ada juga kesadaran terhadap proses penyusunan yang tidak transparan dan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi militer, menunjukkan refleksi historis dan nilai demokratis yang kuat di kalangan informan. Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki literasi media yang cukup baik dalam menelaah isu-isu kebijakan publik. Kesadaran kritis mereka juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan paparan terhadap pemberitaan yang beragam.

ketiga informan dapat menjelaskan dan paham mengenai isu revisi UU TNI. Hal ini mencerminkan pola pikir realistis dan pragmatis yang dimiliki oleh Generasi Z, yang terbentuk karena mereka tumbuh di tengah ancaman terorisme

dan krisis ekonomi sejak dini (Stillman & Stillman dalam Nasution, 2019), sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dan kritis dalam memahami isu-isu sosial maupun politik yang berdampak pada masa depan mereka, Pemahaman ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mencakup aspek substansi dan prosedural dalam revisi UU tersebut. Para informan dapat menjelaskan permasalahan yang ada dari RUU TNI tersebut baik dari segi substansi maupun prosedur. Namun, kemampuan untuk mengidentifikasi secara spesifik pasal-pasal yang direvisi bervariasi di antara para informan. Ketika peneliti meminta untuk menyebutkan dan menjelaskan terkait pasal-pasal yang di revisi informan 1 mampu menyebutkan dengan cukup rinci beberapa pasal yang mengalami perubahan, informan 2 menyatakan tidak bisa menyebutkan dan menjelaskan, informan 3 menyebut beberapa substansi perubahan, seperti terkait keamanan siber dan usia pensiun, namun mengakui lupa mengenai nomor pasal. Meskipun demikian, ketiganya tetap menunjukkan sikap kritis terhadap revisi yang diajukan. Ketiga informan menunjukkan sikap kritis terhadap revisi UU TNI, dengan nuansa berbeda. Informan 1 menilai perlunya revisi tapi dengan kontrol kuat. Informan 2 tidak setuju pada pasal-pasal yang memberi ruang dominasi militer. Informan 3 secara tegas menolak pemberlakuan dwifungsi militer karena dianggap mengulang sejarah Orde Baru. Sikap kritis ini juga disertai dengan harapan akan proses legislasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Semua informan menyerukan transparansi dari pemerintah dalam menyusun undang-undang, keterlibatan publik dan pakar dalam proses pembahasan, peran aktif masyarakat untuk mencari tahu, memahami, dan mengawasi proses legislasi.

c. Pemahaman Generasi Z tentang TNI pada Era Orde Baru

Pada sub bab ini, menjelaskan mengenai tanggapan informan terhadap pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru. Ketiga informan menjelaskan pengalaman dan pemahaman informan terhadap Masa Orde Baru. Ketiga informan yang diwawancarai memiliki pengalaman tidak langsung atau minim terhadap masa Orde Baru, karena mereka lahir menjelang atau setelah masa tersebut berakhir. Meski demikian, mereka memiliki pemahaman konseptual mengenai masa itu, terutama berkaitan dengan dwifungsi ABRI dan militerisme.

Informan 1, lahir setelah masa Orde Baru berakhir, menyampaikan bahwa ia hanya mengetahui informasi terkait dwifungsi ABRI dari berbagai sumber:

“Kebetulan saya kelahiran 1999, jadi saya hanya mendengar informasi terkait dwifungsi ABRI.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan tidak mengalami masa tersebut secara langsung, namun ia mengetahui tentang kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya situasi seperti Orde Baru:

“Belum pernah sih. Tapi pernah dengar beritanya pernah ada, terus kan sekarang ada lagi, jadi banyak yang khawatir kan nanti takutnya kembali lagi ke zaman itu gitu.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara Informan 3 menyatakan bahwa meskipun masih kecil saat itu, ia merasakan atmosfer Orde Baru dan memahami konteks sejarahnya karena latar belakang pendidikan:

“Oh, saya merasa itu tapi saya masih kecil, saya merasa tentang bagaimana dwifungsi ABRI, kemudian saya berasal dari latar belakang sejarah, sehingga saya paham bagaimana jalan pemerintahan dari waktu lama sampai sekarang.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan informan terhadap militerisme pada Masa Orde Baru. Ketiga informan memberikan penilaian yang beragam terkait militerisme pada masa Orde Baru, sebagian berdasarkan pemahaman literatur dan cerita, bukan pengalaman langsung. Secara umum, mereka menggambarkan dominasi militer dalam ranah pemerintahan, politik, dan kehidupan sipil.

Informan 1 menjelaskan bahwa meskipun tidak mengalami langsung masa Orde Baru, ia memahami bahwa militer saat itu tidak hanya berperan

dalam sektor keamanan, melainkan juga dalam kebijakan dan pemerintahan:

“Menurut saya, militerisme di masa Orde Baru itu terlihat dari dominasi militer dalam pemerintahan. Meski saya nggak ngalamin langsung, tapi dari cerita dan bacaan, militer waktu itu bukan cuma urusan keamanan, tapi juga punya peran besar di politik dan kebijakan negara.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 secara jujur mengakui keterbatasan pemahamannya karena tidak mengalami masa tersebut secara langsung:

“Saya kurang paham untuk hal ini karena saya tidak mengalaminya.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 memberikan penjelasan yang lebih reflektif dengan menyoroti dua sisi dari militerisme—yaitu stabilitas dan keamanan di satu sisi, serta represi terhadap kebebasan sipil di sisi lain:

“Militerisme zaman Orde Baru di era sekarang dapat dilihat dari banyak sisi, ada sisi positif dalam artinya kondisi negara cenderung lebih kondusif karena keamanan dan kontrol pemerintah dalam berbagai hal membuat semua hal bisa diawasin, tapi menjadi sisi negatif dalam hal kebebasan berpendapat dan demokrasi karena kontrol dan pengawasan tersebut memasuki ranah akademis dan sipil yang juga berdampak pada kebebasan menyuarakan aspirasi, pendapat serta pandangan politik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan informan terhadap dwifungsi ABRI/TNI pada Masa Orde Baru. Ketiga informan memberikan penjelasan dan refleksi mereka terhadap konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, baik dari perspektif historis maupun berdasarkan pemahaman literasi dan wacana publik.

Informan 1 menggambarkan dwifungsi ABRI sebagai doktrin militer yang memberikan kewenangan ganda kepada TNI, yaitu di sektor pertahanan dan dalam pengelolaan pemerintahan:

“Ya, menurut berita atau informasi yang saya baca terkait dwifungsi ABRI, dwifungsi ABRI itu merupakan suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia, yang mana disebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas. Yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua itu, memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dengan adanya peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti keterlibatan militer di sektor sipil, khususnya dalam pengisian jabatan yang sejatinya dapat diisi oleh masyarakat sipil:

“Kalau dwifungsi itu kan ya dari militer bisa menjabat di instansi atau di fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa diisi oleh sipil, warga sipil. Kemudian TNI bisa masuk ke dalam situ, itu sih yang saya tahu. Namun saya tidak pernah merasakannya.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 memberikan analisis yang lebih dalam mengenai dampak dwifungsi ABRI terhadap kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru. Ia melihat adanya kontrol kuat militer yang membatasi ruang kebebasan sipil:

“Kalau dalam masa Orde Baru, pelaksanaan militerismenya atau dwifungsi TNI/ABRI itu yang pasti, jadi setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan proses penyampaian pendapat dan lain-lain itu tidak bisa disatukan secara baik karena ada kontrol kuat dari TNI atau pihak-pihak dari pemerintahan TNI. Sehingga yang namanya proses demokrasi tidak bisa berjalan. Walaupun ada sisi positifnya yang saya rasakan adalah cenderung lebih aman dari sisi keamanan, tapi dari sisi politik kita tidak punya kebebasan untuk berdemokrasi dengan pendapat dan lain-lain. Di eranya reformasi, kita bisa menyampaikan pendapat hanya memang dalam proses keamanan yang lebih kendur sih.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan refleksi informan terhadap pengalaman atau pemahaman tentang Masa Orde Baru. Ketiga informan

mengakui bahwa mereka tidak mengalami secara langsung masa Orde Baru, karena sebagian besar dari mereka lahir atau masih sangat kecil saat masa itu berlangsung. Namun, mereka menyampaikan pemahaman tentang kondisi sosial-politik era tersebut berdasarkan cerita, pengalaman orang sekitar, dan proses pembelajaran.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia tidak mengalami langsung masa tersebut, tetapi mengenal citra Orde Baru sebagai masa dengan kontrol ketat dari pemerintah dan minimnya kebebasan berekspresi:

“Saya sendiri... hmm, sebenarnya tidak mengalami langsung masa Orde Baru, karena saya lahir di tahun-tahun setelah masa itu ya... kalau sependengaran saya ya masa Orde Baru itu katanya ee.... kuat banget kontrol pemerintahnya, lalu banyak orang nggak berani bicara sembarangan ya..., apalagi soal politik.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga mengaku tidak memiliki pengalaman pribadi dengan masa tersebut, namun mendengar banyak cerita dari lingkungan sekitarnya yang menggambarkan kekuasaan yang keras dan terbatasnya ruang untuk berbeda pendapat:

“Kalau soal Orde Baru, saya nggak punya pengalaman langsung ya. Sering dengar cerita dari tetangga, dari ibu, dari mana-mana. Banyak yang bilang masa Orde Baru itu keras, dan kalau beda pendapat bisa bahaya.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan bahwa pada masa berakhirnya Orde Baru ia masih sangat kecil, sehingga tidak memiliki ingatan langsung. Namun, dari pendidikan yang ia ikuti, ia mendapatkan gambaran bahwa masa tersebut minim ruang kritik:

“Jadi waktu Orde Baru berakhir saya masih balita, ya nggak ingat apa-apa. Tapi waktu kuliah pendidikan dulu, katanya zaman itu susah buat protes. Misalnya guru pun, kalau mau mengkritik kebijakan ya harus hati-hati. Pemerintah sangat mendominasi.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Tabel 4.18 Ringkasan Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

Deskripsi	Andika (I-1)	Yeni Aryanti (I-2)	Ajeng Utami (I-3)
Pengalaman dan Pemahaman Informan terhadap Masa Orde Baru	Tidak mengalami hanya mendengar	menyatakan tidak mengalami masa tersebut	Tidak mengalami namun mendengar dan belajar
Pandangan Informan terhadap Militerisme pada Masa Orde Baru	memahami bahwa militer saat itu tidak hanya berperan dalam sektor keamanan, melainkan juga dalam kebijakan dan pemerintahan	mengakui keterbatasan pemahamannya karena tidak mengalami masa tersebut secara langsung	memberikan penjelasan yang lebih reflektif dengan menyoroti dua sisi dari militerisme
Pandangan Informan terhadap Dwifungsi ABRI/TNI pada Masa Orde Baru	menggambarkan dwifungsi ABRI sebagai doktrin militer yang memberikan kewenangan ganda kepada TNI	menyoroti keterlibatan militer di sektor sipil,	memberikan analisis yang lebih dalam mengenai dampak dwifungsi ABRI terhadap kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru
Refleksi Informan terhadap Pengalaman atau Pemahaman tentang Masa Orde Baru	menjelaskan bahwa ia tidak mengalami langsung masa tersebut, tetapi mengenal citra Orde Baru sebagai masa dengan kontrol ketat dari pemerintah dan minimnya kebebasan berekspresi	mengaku tidak memiliki pengalaman pribadi dengan masa tersebut, namun mendengar banyak cerita dari lingkungan sekitarnya yang menggambarkan kekuasaan yang keras dan terbatasnya ruang untuk berbeda pendapat	menyatakan bahwa pada masa berakhirnya Orde Baru ia masih sangat kecil, sehingga tidak memiliki ingatan langsung. Namun, dari pendidikan yang ia ikuti, ia mendapatkan gambaran bahwa masa tersebut minim ruang kritik

Sumber. Olahan Peneliti

Bedasarkan tabel 4.18 menjelaskan bahwa ketiga informan lahir setelah atau menjelang berakhirnya Orde Baru, sehingga tidak memiliki pengalaman langsung terhadap rezim tersebut. Meski demikian informan 3 memperoleh pemahaman melalui pendidikan formal, informan 1 memperoleh bacaan dan sumber berita, dan informan 2 serta Cerita dari keluarga dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara para informan mengidentifikasi dominasi militer dalam kehidupan pemerintahan dan sipil sebagai ciri khas militerisme era Orde

Baru. Informan 1 menekankan dominasi militer dalam kebijakan negara. Informan 2 menyadari bahwa militer masuk ke sektor yang semestinya sipil. Informan 3 memberi analisis dua sisi: stabilitas negara versus represi politik dan kebebasan sipil. Ketika ditanya bagaimana dwifungsi TNI pada masa orde baru Semua informan memahami dwifungsi ABRI sebagai praktik di mana militer menjalankan dua peran: pertahanan dan pemerintahan sipil. Informan 1 menyebut dwifungsi sebagai doktrin militer yang memungkinkan TNI mengatur negara. Informan 2 menyoroti bahwa jabatan sipil bisa ditempati militer, sehingga menggeser peran masyarakat sipil. Informan 3 melihat dampak konkret dari dwifungsi ini dalam bentuk minimnya demokrasi dan represi terhadap kritik.

d. Posisi Pemaknaan Generasi Z Tabel

Pada sub bab ini, menjelaskan mengenai tanggapan informan terhadap pemahaman pemaknaan pembungkaman pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co. Ketiga informan menjelaskan pandangan informan terhadap Revisi UU TNI sebagai sumber kekhawatiran publik. Ketiga informan sepakat bahwa pembahasan revisi UU TNI menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama karena prosesnya yang dinilai kurang transparan, serta potensi kembalinya militer ke ranah sipil yang dianggap mengancam prinsip-prinsip reformasi dan demokrasi.

Informan 1 menyatakan secara tegas bahwa revisi tersebut menjadi sumber kekhawatiran karena mengandung potensi kembalinya militer dalam kehidupan sipil dan minimnya pelibatan masyarakat:

“Menurut saya setuju, karena revisi ini mengunculkan potensi kembalinya militer ke ranah sipil dan kurang melibatkan publik dalam prosesnya sehingga menyebabkan kekhawatiran ke arah reformasi dari sektor keamanan.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti aspek proses yang tertutup dan tidak transparan, yang menurutnya justru menjadi alasan utama mengapa publik merasa cemas dan mempertanyakan:

“Iya karena yang tadi di awal saya bilang, kenapa pembahasannya itu tidak secara transparansi? Kenapa harus viral dulu di sosial media? Dan kenapa itu pun harus menyalahkan satu pihak? Kayak aktivisnya kenapa yang nggak sopan meraksa ke dalam hotel, ke dalam ruangan? Padahal memang caranya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah kita. Kayak transparansi bahwa masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyoroti bahwa kekhawatiran publik tidak hanya soal cara dan waktu pembahasan, tetapi juga terkait dengan substansi revisi yang dianggap tidak berpihak pada kebebasan publik:

“Iya.... pasti banget jadi sumber kekhawatiran. Lebih ke cara waktu. Kemudian, esensi dari revisinya juga tidak berpihak pada kebebasan ranah sipil atau publik.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan informan terhadap urgensi pembahasan Revisi UU TNI. Mayoritas informan menyatakan tidak melihat urgensi dalam pembahasan revisi UU TNI. Menurut mereka, banyak persoalan lain yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan DPR.

Informan 1 menyatakan bahwa revisi ini cenderung lebih mencerminkan kepentingan elit politik dibanding kebutuhan publik secara luas:

"Menurut saya setuju karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang menjelaskan mengapa revisi UU TNI ini dibuat secara terbuka oleh pemerintah karena revisi ini juga lebih terkesan kepada agenda elit ketimbang respondera.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 mengkritisi pilihan pemerintah yang justru memprioritaskan pembahasan RUU TNI di tengah banyaknya permasalahan sosial yang lebih mendesak:

“Setuju. Saya tadi bilang kan bahwa Indonesia tuh banyak banget masalahnya dari segi ekonomi, pendidikan, pemerataan kesejahteraan. Kemudian juga kesejahteraan guru, sarana dan prasarana sekolah. Kenapa harus bahas tentang RUU TNI ini? Banyak hal yang bisa dibahas secara urgent.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 pun menyampaikan hal serupa, menilai bahwa banyak isu yang lebih relevan dan mendesak untuk segera ditangani dibandingkan revisi terhadap UU TNI:

“Sepanjang yang saya pahami, ee... tidak memiliki urgensi. Sangat-sangat tidak memiliki urgensi karena ada bahasan yang lebih penting. Seperti pengambilan aset koruptor, kemudian tentang hukuman untuk koruptor, kemudian tentang hak kulayat dari masyarakat adat terpencil. Menurut saya itu harusnya bisa diproses lebih dulu daripada Undang-Undang TNI.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan Pandangan Informan terhadap Pembahasan UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Sebagian besar informan menyatakan persetujuannya terhadap usulan agar pemerintah membahas ulang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dinilai tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum modern.

Informan 1 menekankan bahwa Undang-Undang ini sudah tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel:

“Saya setuju karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer perlu dibahas ulang karena dia sudah tidak relevan dengan prinsip peradilan yang independen dan akuntabel. Karena yang kita ketahui bahwa peradilan militer ini sifatnya tertutup, tidak transparan terhadap sipil.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan sikap setuju, meskipun tanpa penjelasan panjang:

“Hm.. setuju saja.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 menyampaikan pandangan yang lebih kritis dan mendalam. Ia menghubungkan perlunya revisi UU Peradilan Militer dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh TNI di masa lalu yang belum dituntaskan:

“Jelas pasti iya, karena banyak kasus-kasus pelanggaran TNI yang belum selesai, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan juga di Masa Orde Baru sampai sekarang juga belum diselesaikan. [...] Harusnya itu menjadi fokus dari pemerintah dalam Undang-Undang Revisi TNI, bukan dwifungsi TNI.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan informan: Revisi UU TNI dan ancaman terhadap partisipasi public. Ketiga informan yang diwawancarai sepakat menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik, sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Tempo.co.

Informan 1 menyampaikan bahwa proses revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, sehingga partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi HAM menjadi terbatas:

“Menurut saya setuju, karena dalam proses revisi terkesan dilakukan secara tutup dan tidak transparan. Keterlibatan masyarakat sipil, kemudian akademisi dan organisasi HAM menyebabkan itu minimnya ruang diskusi publik.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga dengan tegas menyatakan persetujuannya:

“Apakah saya setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik? Setuju. Setuju aja.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 memperkuat argumen tersebut dengan menyoroti bahwa tidak ada ruang yang cukup bagi publik untuk memahami dan memberikan masukan terhadap isi revisi:

“Iya, setuju. Karena, sekali lagi, tidak ada ruang untuk publik diberikan waktu untuk menginterpretasikan atau memberikan masukan terhadap revisi UU TNI ini.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan informan: Revisi UU TNI dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI mengancam kebebasan akademik, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menggarisbawahi bahwa kehadiran TNI dalam lingkungan sipil, termasuk kampus, dapat menimbulkan rasa represi. Ia juga menyampaikan bahwa kritik terhadap militer bisa dianggap sebagai ancaman, yang tentu menghambat kebebasan berpikir dan berekspresi di ruang akademik:

“Dalam hal ini saya setuju karena dalam beberapa konteks kehadiran TNI di lingkungan kampus yang sudah banyak beredar informasinya atau dalam diskursus sipil bisa menimbulkan efek represi apalagi ketika kritik terhadap militer dianggap sebagai ancaman.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan kesetujuannya secara langsung meskipun tanpa alasan terperinci:

“Setuju. No reason.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menekankan bahwa pemberlakuan kembali dwifungsi TNI akan berdampak langsung pada ruang-ruang kebebasan berekspresi, termasuk demonstrasi mahasiswa, yang sering kali merupakan bentuk kritik akademik:

“Iya, benar, setuju. Karena kalau sudah tadi yang saya anggapkan di awal ketika ngomongin pembelakuan dari dwifungsi TNI... ruang publik seperti demonstrasi nanti akan dihadapi dengan cara refresif... Ini mengancam demokrasi dan akademik.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap dugaan pengabaian prinsip demokrasi oleh pemerintah dalam Revisi UU TNI. Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi UU TNI, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menekankan bahwa minimnya transparansi serta tidak dilibatkannya publik dalam proses revisi merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama keterbukaan dan partisipasi:

“Setuju. Dalam hal ini terkait minima transparansi dan konsultasi terhadap publik itu yang menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan kemudian partisipasi dalam demokrasi, prosedur itu belum dijalankan secara maksimal.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa pembahasan yang terkesan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan suara publik menjadi alasan utama mengapa revisi ini dianggap mencederai demokrasi:

“Iya. Meskipun, ternyata kan saya baru tau juga kalau misalnya undang-undang ini ternyata udah diisahin gitu. Meskipun ini kontroversial, viral, dan mengandung kekisruhan, dan udah tau banyak masyarakat yang kontral. Tapi ternyata tidak jadi pertimbangan untuk diundang dulu. Rasanya kok, kenapa sih mau buru-buru banget disahin? Ada apa? Gitu.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 mengaitkan pengabaian prinsip demokrasi dengan ketimpangan perlakuan hukum antara sipil dan militer. Ia menyoroti bahwa pelanggaran oleh TNI cenderung sulit diungkap dan tidak diproses secara setara:

“Jelas. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di TNI itu sangat-sangat sulit untuk diungkap, sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan. Dan walaupun sampai di pengadilan, yang saya pahami, waktu itu putusannya itu kalau nggak salah hanya misalnya sebatas pecatan tidak hormat. Dan itu berlakunya sangat berbalik arah dengan ketika sipil yang melakukan penindasan pelanggarannya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap potensi kembalinya militerisme seperti Masa Orde Baru. Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan militerisme seperti pada masa Orde Baru, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menyatakan bahwa revisi ini membuka peluang kembalinya praktik militerisme, khususnya melalui keterlibatan TNI dalam jabatan sipil. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan:

“Saya cenderung setuju, karena ini pengawasannya harus dikawal dengan ketat karena memang beberapa pasal itu berpotensi menghidupkan kembali militerisme, terutama dalam keterlibatan militer dalam menuduki jabatan-jabatan sipil yang mengingatkan kita pada praktik dwifungsi pada Orde Baru.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menilai bahwa meskipun belum terjadi, kemungkinan kembalinya militerisme tetap terbuka, mengingat adanya sejumlah pasal kontroversial dalam revisi tersebut:

“Kemungkinan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena ada beberapa pasal kontroversial yang diduga dapat mengancam hal itu. Bisa menimbulkan militerisasi.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 secara tegas menyatakan kesetujuannya dan mengaitkannya dengan latar belakang kepemimpinan nasional yang berasal dari militer.

Menurutnya, hal ini bisa mendorong kembalinya nuansa Orde Baru melalui pemberian kewenangan besar kepada TNI di ranah sipil:

“Setuju banget hehehe. Tapi, ini juga kan bisa dikaitkan dengan pimpinan kita yang latar belakangnya di militer. Jadi, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tujuannya adalah mengembalikan hawa-hawa atau ee.. suhu-suhu di masa Orde Baru dengan revisi UU TNI ini yang memberikan jabatan-jabatan penting terhadap untuk menjadi aktif di ranah-ranah publik atau sipil.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pasal-pasal yang membuka peluang dwifungsi TNI. Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa pasal-pasal dalam revisi UU TNI yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menyebut bahwa kekhawatiran publik dan pengamat militer berakar pada potensi melemahnya supremasi sipil serta pelanggaran prinsip netralitas militer:

“Ya, menurut saya setuju, karena ini kekhawatiran utama dari publik dan pengamat militer. Kehadiran prajurit aktif ini yang menuduki jabatan sipil itu dikhawatirkan dapat melemahkan supremasi sipil dan melanggar prinsip netralisme militer.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti kejelasan bunyi pasal dalam revisi yang secara eksplisit memberi ruang bagi TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi nonmiliter:

“Iya. Setuju karena memang udah jelas ada di pasal. Bahwa TNI bisa masuk ke fungsi-fungsi lain.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menekankan bahwa seharusnya TNI hanya fokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. Menurutnya, keterlibatan TNI aktif dalam jabatan sipil dapat mengembalikan kondisi serupa dengan era Orde Baru:

“Setuju. Karena seharusnya kan TNI ranahnya adalah ee... keamanan kesatuan NKRI, jadi seharusnya cukupnya tugasnya di situ saja. Tidak lagi mengambil ranah-ranah sipil yang bisa diambil oleh sipil juga... Dengan adanya revisi undang-undang TNI, adanya penempatan TNI-TNI aktif di ruang-ruang publik bisa jadi akan menyusahkan atau membalikkan itu ke masa Orde Baru.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan Ketiga informan menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menyampaikan bahwa revisi ini tidak memperkuat mekanisme akuntabilitas dan justru membuka ruang bagi militer untuk beroperasi di luar kendali sipil dan hukum:

“Untuk berita yang beredar, saya setuju karena sejauh ini tidak ada penguatan mekanisme akuntabilitas dalam revisi ini kemudian ada kekhawatiran bahwa militer semakin beredar di luar kontrol sipil dan hukum.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti kekhawatiran terhadap penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, yang menurutnya dapat menciptakan konflik kepentingan dan menghambat penegakan hukum terhadap anggota TNI:

“Iya. Karena ada dwifungsi fungsi yang bisa dijabat oleh TNI. Salah satunya kan kejaksaan agung ya, nanti gimana dong kalau misalkan TNI-nya melakukan kesalahan. Sanksinya, kontrolnya, di mana kalau misalkan TNI-nya bisa masuk di jabatan itu.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 mengaitkan sulitnya menyentuh TNI secara hukum dengan proses revisi yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik:

“Iya, jelas. Karena tadi tidak melibatkan masyarakat dalam proses revisinya, kemudian dilakukan secara terburu-buru dan tertutup.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap pencabutan Revisi UU TNI. Ketiga informan menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI sebaiknya dicabut, sebagaimana disorot oleh Tempo.co, terutama jika revisi tersebut membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Informan 1 menyampaikan bahwa pencabutan perlu dilakukan jika muatan revisi terbukti bertentangan dengan reformasi sektor keamanan. Namun ia juga membuka kemungkinan revisi tetap dilanjutkan jika sesuai dengan prinsip demokratis dan dilakukan secara transparan:

“Setuju, namun jika muatannya berpotensi membahayakan demokrasi ataupun supremasi sipil itu lebih baik dicabut dan dilakukan evaluasi menyeluruh... Jika revisi dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas TNI dalam kerangka hukum yang demokratis, maka revisi tersebut tetap dapat dilanjutkan... dengan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap publik.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti isu ketimpangan kesempatan kerja dan menyarankan agar posisi sipil tetap diprioritaskan bagi warga sipil, bukan prajurit aktif. Oleh karena itu, ia mendukung pencabutan revisi:

“Hm.... Ini kan baru RUU ya? Udah disahkan? Udah disahkan. Setuju. Karena peluang ibaratnya double job. Kenapa peluang itu nggak dikasih ke warga sipil dulu sih? TNI fokus kepada pengamanan rakyat... Jadi ada beberapa pasal yang memang harusnya disesuaikan lagi dengan kondisi negara kita.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 mengaitkan persetujuannya dengan kekhawatiran akan kembalinya praktik dwifungsi ala Orde Baru dan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi:

“Setuju kalau revisinya dicabut dan diberikan akses oleh publik untuk ikut mengawasi atau memberikan masukan... Karena harapannya tidak kembali ke zaman Orde Baru dengan adanya dwifungsi ABRI.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Selanjutnya ketiga informan menjelaskan pandangan terhadap tindakan kekerasan aparat terhadap mahasiswa dalam aksi Tolak Revisi UU TNI. Ketiga informan menyatakan setuju bahwa pemerintah, melalui aparat seperti kepolisian, harus menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI, sebagaimana disampaikan oleh Tempo.co. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

Informan 1 menegaskan bahwa tindakan represif aparat justru mencederai citra demokrasi dan bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat:

“Dalam hal ini saya setuju karena kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi, namun represifitas aparat hanya akan memburuk citra pemerintah dalam menutup ruang demokrasi.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyampaikan secara tegas bahwa kekerasan terhadap mahasiswa dan aktivis adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan menyerukan cara-cara musyawarah sebagai pendekatan yang lebih etis dan konstitusional:

“Kalau kekerasan itu kan di mana-mana, kita tidak setuju ya. Kita sepakat bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat... Apalagi kalau misalkan ada intimidasi kepada mahasiswa, teman-teman aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyoroti pentingnya fungsi kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan menolak kekerasan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi:

“Kalau polisi melakukan kekerasan, saya tidak setuju. Karena itu berarti melanggar prinsip demokrasi dalam penyampaian pendapat. Harapannya pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya sebagai pengayom masyarakat.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Tabel 4.19 Ringkasan Pemaknaan Pembungkaman Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Deskripsi	Andika (I-1)	Yeni Aryanti (I-2)	Ajeng Utami (I-3)
Pandangan Informan terhadap Revisi UU TNI sebagai Sumber Kekhawatiran Publik	setuju	setuju	setuju
Pandangan Informan terhadap Urgensi Pembahasan Revisi UU TNI	setuju	setuju	tidak setuju
Pandangan Informan terhadap Pembahasan UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	setuju	setuju	setuju
Pandangan Informan: Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Partisipasi Publik	setuju	setuju	setuju
Pandangan Informan: Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik	setuju	setuju	setuju
Pandangan Terhadap	setuju	setuju	setuju

**Dugaan
Pengabaian
Prinsip
Demokrasi
oleh
Pemerintah
dalam Revisi
UU TNI**

**Pandangan
terhadap
Potensi
Kembalinya
Militerisme
seperti Masa
Orde Baru**

setuju

setuju

setuju

**Pandangan
terhadap
Pasal-Pasal
yang
Membuka
Peluang
Dwifungsi
TNI**

setuju

setuju

setuju

**Pandangan
Terhadap
TNI sebagai
Institusi yang
Sulit
Disentuh
secara
Hukum
akibat Revisi
UU TNI**

setuju

setuju

setuju

**Pandangan
Terhadap
Pencabutan
Revisi UU
TNI**

setuju

setuju

setuju

**Pandangan
terhadap
Tindakan
Kekerasan
Aparat
terhadap
Mahasiswa
dalam Aksi
Tolak Revisi
UU TNI**

setuju

setuju

setuju

Sumber. Olahan Peneliti

Bedasarkan tabel 4.19 menjelaskan bahwa ketiga informan sepakat bahwa revisi UU TNI menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat. Alasan utamanya, yakni proses pembahasan yang tidak transparan, potensi militerisasi ranah sipil, dan ancaman terhadap reformasi sektor keamanan. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah RUU TN memiliki urgensi, Seluruh informan menilai tidak ada kebutuhan mendesak untuk merevisi UU TNI. Revisi dianggap sebagai agenda elite dan mengabaikan persoalan rakyat, seperti kesejahteraan, korupsi, dan pendidikan, dan seluruh informan juga mendukung pembahasan UU 31 tahun 1997.

Melalui wawancara kepada informan, ketiganya menyatakan bahwa RUU TNI membatasi partisipasi publik. Selanjutnya informan menyatakan bahwa revisi dapat menyempitkan ruang kritik di lingkungan kampus dan akademik. Dan mereka setuju bahwa proses legislasi tidak transparan, terburu-buru, dan tidak memperhatikan aspirasi publik. Ketiga informan juga sepakat RUU TNI dapat mengembalikan militerisme dan dwifungsi seperti zaman orde baru, dengan adanya pasal yang dapat membuka peluang akan hal itu. Ketiga informan juga sepakat bahwa dengan adanya RUU TNI akan membuat TNI sebagai institusi yang sulit di sentuh hukum Ketiga informan mendukung pencabutan UU jika isi revisi terbukti membahayakan demokrasi dan supremasi sipil. Namun Informan 1 memberi nuansa kompromi, menyatakan revisi masih bisa dilanjutkan jika dilakukan secara demokratis dan transparan. Semua informan menyatakan bahwa kekerasan terhadap mahasiswa adalah pelanggaran demokrasi. Mereka menekankan bahwa demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi

4.3 Perbandingan Posisi Pemaknaan Generasi X, Generasi Y, dan Generasi Z

Tabel 4.20 Ringkasan Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

Generasi	Informan	Kategori			
		Posisi Pemaknaan	Penggunaan Media	Pemahaman tentang RUU TNI	Pemahaman Orde baru
X	1	Oposisi	Lebih banyak menggunakan portal berita	Tidak dapat menyebutkan pasal, dan memiliki	Mengalami masa orde baru, dan menyatakan

				pemahaman substansial	orde baru aman dan tertib
	2	Dominan	Lebih banyak menggunakan media sosial Facebook	Tidak dapat menjelaskan pasal-pasal dan memiliki pemahaman yang kurang lengkap	Mengalami masa orde baru dan menyetakan orde baru menyeramkan
	3	Negosiasi	Lebih menggunakan media berita televisi	Tidak dapat menjelaskan pasal-pasal dan memiliki pemahaman yang cukup mengetahui	Mengalami masa orde baru dan menyatakan ored baru mencekam dan kurangnya kesejahteraan
Y	1	Dominan	Lebih banyak menggunakan portal berita website dan televisi	Tidak hafal dengan pasal – pasal dan memiliki pemmahaman inti dari RUU TNI	Merasakan orde baru dan menyatakan kondisitertib dan aman
	2	Oposisi	Lebih banyak menggunakan portal berita website	Dapat menyebutkan pasal pasal yang direvisi dan memiliki pemahaman isu yang cukup rinci	Merasakan orde baru dan menyatakan adanya keterbatasan hukum
	3	Oposisi	Lebih banyak menggunakan portal berita website	Dapat menyebutkan namun tidak menjelaskan pasl yang direvisi dan memiliki pemahaman yang cukup	Merasakan orde baru dan menyatakan kondisi tertib dan aman
Z	1	Dominan	Lebih banyak emnggunakan media sosial dan portal berita website	Dapat menyebutkan dan menjelaskan pasal revisi dan memiliki pemahaman yang cukup detail	Tidak merasakan orde baru, hanya mendengar, menyatakan minim kebebasan berekspresi
	2	Dominan	Lebih banyak menggunakan media sosial, Youtube dan Instagram	Tidak dapat menyebutkan pasal yang direvisi dan memiliki pemahaman yang minim	Tidak merasakan orde baru dan namun mengmbarkan kekuasaan yang kerasan dan terbatasanya ruang
	3	Dominan	Lebih banyak emnggunakan	Hanya menjelaksn	berpendapat Lebih banyak emnggunakan

portal website	berita	pasal yang di revisi, dan memiliki pemahaman yang baik terkait RUU TNI	portal website	berita
-------------------	--------	---	-------------------	--------

Sumber. Olahan Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana informan dari tiga generasi, yakni Generasi X, Generasi Y, dan Generasi Z, memaknai pembingkai media daring Tempo.co terkait isu Revisi Undang-Undang TNI. Generasi X merupakan individu yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980, atau berusia 45–60 tahun pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2020). Generasi ini merasakan era 1970-an yang penuh gejolak dan 1980-an yang penuh ketidakpastian, yang terjadi selama masa kanak-kanak dan remaja mereka (Alamsyah et al., 2023). Di Indonesia, Generasi X tumbuh di tengah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang ditandai oleh peristiwa G30S/PKI dan penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto. Masa transisi yang dialami sejak kecil ini berpengaruh besar terhadap karakter dan cara berpikir mereka di masa dewasa. Putra (2016) menyebutkan bahwa Generasi X, yang sering disebut sebagai “Gen Xers”, tumbuh dalam masa pergeseran dari era industri ke era informasi, yang sarat dengan ketidakpastian politik dan ekonomi. Perubahan zaman ini kemudian mempengaruhi pola hidup mereka, termasuk dalam hal penerimaan terhadap teknologi. Lebih lanjut, Mudrikah (2020) menjelaskan bahwa Generasi X merupakan generasi yang lahir di awal perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan personal computer (PC), sehingga mereka menjadi generasi yang pertama kali mengenal dan menyesuaikan diri dengan teknologi digital. Karakteristik adaptif inilah yang kemudian dijelaskan oleh Reza et al. (2024), yang mengutip Anggraeni (2015) dan Bily Ahmad (2022), bahwa Generasi X dikenal mandiri, cerdas, dan kreatif, serta cenderung tidak bergantung kepada orang lain. Mereka mampu beradaptasi dan belajar secara mandiri dari lingkungan sekitar, sebagai hasil dari pengalaman hidup di masa transisi sosial, politik, dan teknologi tersebut. Pengalaman ini juga membentuk sikap mereka yang lebih kritis terhadap isu-isu kebijakan dan pemerintahan. Selain itu, mereka cenderung menilai situasi berdasarkan pengalaman nyata, bukan sekadar opini di media.

Generasi Y Generasi Milenial, atau yang dikenal sebagai Generasi Y, adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1981 hingga 1999 (Nasution, 2019). Generasi ini dikenal sebagai kelompok yang menghargai perbedaan, lebih menyukai kerja sama dibandingkan menerima perintah, serta memiliki pendekatan yang pragmatis dalam menyelesaikan masalah. Istilah “milenial” digunakan karena mereka memasuki usia dewasa pada awal abad ke-21. Pada masa ini pula, Generasi Y mengalami transisi teknologi yang signifikan. Mereka disebut sebagai “imigran digital” karena tumbuh bersamaan dengan pesatnya perkembangan internet dan teknologi komunikasi, meskipun tidak lahir secara langsung di era digital seperti Generasi Z. Transisi tersebut turut membentuk karakteristik sosial dan budaya mereka. Menurut Nasution (2019), Generasi Y memiliki beberapa ciri khas utama, di antaranya adalah karakter individu yang sangat beragam, tergantung pada lingkungan tempat tumbuh serta latar belakang sosial dan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka cenderung memiliki gaya komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, Generasi Y juga dikenal sangat aktif di media sosial dan gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Keterbukaan terhadap teknologi ini sejalan dengan pandangan mereka yang progresif, terutama dalam merespons isu-isu politik dan ekonomi. Mereka juga dinilai lebih responsif terhadap perubahan lingkungan sosial di sekitar, sehingga menjadikan mereka kelompok yang adaptif dan dinamis dalam menghadapi tantangan zaman. Hal ini membuat mereka cenderung cepat tanggap terhadap isu-isu aktual yang berkembang di media. Pola konsumsi informasi mereka pun lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh tren serta rekomendasi digital.

Generasi Z adalah kelompok yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Mereka sering disebut sebagai generasi digital karena sejak lahir sudah dikelilingi oleh teknologi seperti komputer, ponsel, internet, dan perangkat game (Najah, 2022). Menurut Grail Research dalam Najah (2022), mereka adalah digital native, generasi pertama yang benar-benar tumbuh di era digital. Akibatnya, mereka lebih sering berada di dalam rumah, menjelajahi dunia maya, dan bermain game online daripada bermain di luar (Zis, Effendi, & Roemdalam dalam Najah, 2022). Stillman & Stillman dalam Nasution (2019) mengidentifikasi tujuh karakter utama

Generasi Z yang membentuk cara pandang dan perilaku mereka. Pertama, figital, yaitu hidup di dunia yang mengaburkan batas antara ruang fisik dan digital—mereka melihat keduanya sebagai satu kesatuan. Kedua, hiper-kustomisasi, di mana mereka sangat menekankan keunikan identitas dan ingin dikenali sesuai preferensi personal. Ketiga, mereka bersifat realistis karena tumbuh dalam ketidakpastian global, seperti terorisme dan krisis ekonomi, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, Generasi Z mengalami FOMO (Fear of Missing Out), yakni ketakutan tertinggal dari tren atau perubahan, yang mendorong mereka untuk terus mengikuti perkembangan terkini. Kelima, mereka adalah weconomist, terbiasa hidup dalam sistem ekonomi berbagi seperti Uber dan Airbnb. Keenam, semangat DIY (Do It Yourself) juga melekat kuat, berkat akses informasi dari YouTube dan pola asuh orang tua yang mendorong kemandirian. Terakhir, mereka terpacu untuk berprestasi karena hidup dalam lingkungan yang kompetitif dan menuntut keunggulan. Karakter-karakter ini membentuk cara mereka dalam mengakses informasi dan menyikapi isu sosial maupun politik. Mereka cenderung cepat, praktis, dan selektif dalam memilih konten yang dianggap relevan dan bermanfaat.

Tiga generasi tersebut akan memaknai pembingkaihan pemberitaan RUU TNI di Tempo.co. Mengacu pada teori dekoding Stuart Hall, posisi pemaknaan terbagi menjadi dominant-hegemonic (dominasi), negosiasi, dan oposisi. Dalam konteks penelitian ini, posisi dominan berarti informan menyetujui dan sejalan dengan sudut pandang atau pembingkaihan yang dilakukan oleh Tempo.co. Posisi pemaknaan dominan sendiri adalah ketika audiens menerima makna utama yang disampaikan dalam pesan, persis seperti yang dimaksudkan oleh pembuatnya (Stuart Hall dalam Sullivan, 2020). Selain posisi pemaknaan dominan terdapat posisi pemaknaan negosiasi menurut Stuart Hall dalam Sullivan (2020) posisi ini muncul ketika seseorang menerima sebagian isi pesan media, tapi juga menolaknya atau menafsirkannya sesuai dengan nilai dan pengalaman hidup yang dimilikinya, terakhir posisi pemaknaan menurut Stuart Hall Oppositional Reading adalah ketika audiens menolak makna dominan yang disampaikan oleh pembuat pesan dan menafsirkannya secara kritis atau bertentangan. Meskipun mereka

memahami maksud dari pesan tersebut, mereka memilih untuk tidak menerimanya mentah-mentah dan justru menentanginya.

1. Posisi Dominan

Posisi ini terdapat lima informan, satu informan dari generasi X, satu dari generasi Y dan tiga dari generasi Z. posisi dominan berarti informan sepakat dengan cara Tempo.co membingkai revisi UU TNI, Tempo merupakan sebuah media daring atau media online yang merupakan berbagai bentuk media yang hanya bisa diakses melalui jaringan internet. Media ini mencakup beragam format seperti teks, gambar, video, hingga audio. Selain sebagai sumber informasi, media online juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dilakukan secara digital atau daring (Pamuji, 2019). Dengan karakteristik tersebut, Tempo.co mampu menjangkau audiens secara luas dan cepat. Hal ini turut memperkuat pengaruh *framing* yang dibangun melalui platform digital tersebut.

Dalam posisi ini sebanyak lima informan berada dalam posisi dominan, Mereka memperlihatkan keselarasan pemikiran dengan Tempo.co yang membingkai revisi UU TNI secara kritis, khususnya terhadap perluasan peran militer dalam ruang sipil. Hal ini menunjukkan bahwa *framing* yang dilakukan Tempo.co berhasil memengaruhi cara pandang informan terhadap isu, Menurut Lecheler & De Vreese (2019), Entman menekankan bahwa *framing* memainkan peran penting dalam ranah politik dan komunikasi kekuasaan. Proses ini melibatkan interaksi antara pejabat pemerintah dan jurnalis yang saling berupaya memengaruhi satu sama lain, sekaligus memengaruhi masyarakat. Dengan kata lain, *framing* tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk opini dan mengarahkan cara berpikir publik. sebagaimana dijelaskan oleh D'Angelo (2017), bahwa media membentuk makna publik melalui penonjolan aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan, sambil mengabaikan aspek lainnya. Kesamaan pandangan para informan dengan *framing* Tempo.co menunjukkan keberhasilan media dalam membentuk persepsi melalui narasi yang kuat. Ini juga menandakan

adanya kepercayaan terhadap media sebagai sumber informasi yang kredibel dan berpihak pada nilai demokrasi.

Dalam hal ini, Tempo menonjolkan ancaman terhadap demokrasi dan potensi kembalinya dwifungsi TNI sebagai inti narasi mereka. Isu yang ditampilkan oleh tempo merupakan sebagai ancaman atau masalah, dengan hal tersebut yang ditampilkan membuat orang lebih mudah percaya Menurut Lindgren et al. (2022), masyarakat cenderung lebih mempercayai informasi yang disampaikan dengan pendekatan negatif (*negative framing*) dibandingkan informasi yang disajikan dalam bentuk positif. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyampaian pesan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan audiens terhadap informasi tersebut. Dengan kata lain, penyajian isu secara kritis dan tegas mampu membangun persepsi serius di benak pembaca. Strategi ini membuat pesan media terasa lebih relevan dan mendesak untuk diperhatikan.

Informan pada posisi ini memiliki keterpaparan tinggi terhadap media baik media arus utama seperti Tempo.co dan media sosial seperti Instagram, dan YouTube. Informan pada posisi ini juga memiliki tingkat pemahaman isu yang cukup baik hingga rinci, yakni mereka mampu menyebutkan pasal-pasal revisi serta mengkritisi implikasi politis dan hukum dari revisi tersebut, melalui wawancara yang dilakukan informan berasal dari kelas pendidikan starat 1 hal ini sejalan dengan stuart hall yang meyakini bahwa latar belakang pendidikan dapat menyebabkan seorang memaknaan sesuatu (Sullivan, 2020). Selain itu, informan tidak memiliki keterlibatan langsung dengan Orde Baru. Namun, mereka mengetahui Orde Baru melalui narasi sejarah yang cenderung menekankan represi dan keterbatasan kebebasan sipil, pengalaman pribadi juga dapat menentukan posisi pemaknaan dari seorang informan, pengalaman pribadi dan identitas emosional audiens sangat memengaruhi pemaknaan (Sullivan, 2020).

Kelima informan yang berprofesi wakil kepala sekolah, ibu rumah tangga, karyawan swasta, guru Bahasa Indonesia, dan pedagang menunjukkan posisi pemaknaan dominan terhadap pemberitaan revisi UU TNI yang dibingkai oleh Tempo.co. informan yang berprofesi sebagai guru

dan wakil kepala sekolah setuju dengan kahwatir bahawa RUU TNI dapat mengancam kebebasan akademik seperti yang dinarasikan oleh Tempo.co.

Dari Tingkat Pendidikan, pengalaman, pekerjaan dan paparan media yang dimana informan posisi dominan memiliki Pendidikan strata 1 dan belum pernah melaksanakan secara langsung orde baru, dapat menjadikan posisi pemaknana dominan. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk melihat isu dengan perspektif yang lebih rasional dan terinformasi. Mereka cenderung menerima pembingkai media yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan transparansi.

2. Posisi Negosiasi

Satu informan dari Generasi X berada pada posisi negosiasi. Informan ini memahami kritik yang disampaikan Tempo.co dalam pemberitaan tentang revisi UU TNI, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan cara media tersebut membingkai isu, pembingkai atau *framing* media. Ia mendukung pentingnya pengawasan terhadap militer agar tidak terlalu masuk ke ranah sipil, tetapi di sisi lain tetap melihat militer sebagai lembaga yang dulu dianggap memberikan rasa aman. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengalamannya hidup di masa Orde Baru, saat militer punya peran besar dalam kehidupan Masyarakat. Satu informan juga memiliki pengalaman terkait latar belakang pada masa orde baru dimana informan pernah menjadi aktivis 98. Pengalaman masa lalu ini menjadi dasar dalam membentuk cara pandang nya terhadap isu saat ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Ien Ang dalam Sullivan (2020) yang menyebut bahwa pengalaman pribadi dan perasaan seseorang bisa memengaruhi bagaimana mereka memahami isi media.

Selain itu, latar belakang sosial dan pendidikan juga ikut berperan. Menurut David Morley dalam Sullivan (2020), kelas sosial dan tingkat pendidikan bisa memengaruhi apakah seseorang cenderung setuju, menegosiasikan, atau menolak isi media. Satu informan dari generasi X yang berada dalam posisi negosiasi, memiliki latar belakang Pendidikan sarjana strata 2, informan ini memiliki Pendidikan lebih tinggi yang dapat menjadi faktor informan dalam memaknai isu RUU TNI. Selain itu

paparan media juga ikut berpengaruh dalam factor informan memaknai. Informan 1 dari generasi X ini mengalami paparan informasi yang cukup rendah dimana dia hanya menonton berita melalui stasiun televisi pada KompasTV, hal ini bisa disebabkan karena pekerjaan dari seorang informan, informan generasi X pada posisi pemaknaan ini memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan swasta.

Informan ini mengalami masa orde baru, memiliki latar belakang Pendidikan strata 2 dengan paparan media yang minim dan pekerjaan sebagai karyawan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa posisi negosiasinya terbentuk dari gabungan antara pengalaman masa lalu, latar belakang pendidikan, paparan media dan pekerjaan.

3. Posisi Oposisi

Tiga informan berada dalam posisi oposisi, posisi pemaknaan oposisi di tempati oleh satu informan dari generasi X dan 2 Informan dari generasi Y. Oposisi berarti informan tidak sejalan atau tidak sepakat dengan pembingkaiannya Tempo.co terhadap isu revisi UU TNI, posisi oposisi atau tidak sepakat bisa dikarenakan sikap publik yang telah terbentuk dan mengkristal terhadap isu-isu tersebut, sehingga mereka cenderung resisten terhadap narasi baru, sekalipun berasal dari media besar (Berk, 2025). Sehingga *framing* yang dilakukan oleh media tidak efektif. Informan dalam posisi ini menilai sikap kritis Tempo.co sebagai bentuk ketidakpercayaan yang berlebihan terhadap militer, dan lebih mendukung narasi keamanan daripada narasi demokratisasi. Mereka tidak sejalan dengan pembingkaiannya Tempo.co, dan justru menilai revisi UU TNI sebagai sesuatu yang perlu dan sah untuk menjaga ketertiban nasional. Hal ini sejalan dengan Lindgren et al. (2022) menjelaskan bahwa respons seseorang terhadap *framing* juga dipengaruhi oleh opini awalnya terhadap suatu isu. Jika cara penyajian media bertentangan dengan pandangan pribadi, maka efek *framing* cenderung melemah. Meskipun demikian, orang tetap menunjukkan respons yang lebih kuat terhadap *framing* negatif, meskipun pengaruhnya tidak sebesar ketika isi berita sejalan dengan pandangan mereka. Dengan kata lain, posisi awal audiens menjadi faktor

penting dalam menentukan efektivitas pesan media. Dalam kasus ini, narasi kritis yang dibingkai media tidak cukup kuat untuk mengubah sikap yang sudah terbentuk sebelumnya.

Informan pada posisi ini memiliki pemahaman mengenai isi revisi yang rendah atau setengah-setengah. Bahkan, mereka sering kali tidak dapat menyebutkan atau menjelaskan pasal-pasal secara konkret. Informan juga mengakses media terbatas, seperti Facebook atau portal berita. Selain itu, pengalaman positif terhadap masa Orde Baru, yang dikenang sebagai masa yang aman, tertib, dan stabil. Faktor tersebut yang menjadikan informan berada dalam posisi pemaknaan oposisi, dimana pemahaman isi revisi yang rendah dikarenakan kebutuhan mereka berbeda, sejalan dengan studi Janice Radway tentang pembaca novel roman dalam Sullivan (2020) Motivasi psikologis dan kebutuhan emosional turut memengaruhi cara seseorang menafsirkan teks media. Media sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menegaskan identitas diri, atau menjadi pelarian dan kompensasi atas pengalaman hidup yang dirasa kurang memuaskan di dunia nyata. Posisi ini juga dikaitkan dengan pengalaman dari informan seperti kutipan Studi Ien Ang tentang serial TV Dallas dalam Sullivan (2020) Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dan identitas emosional audiens memiliki peran besar dalam membentuk cara mereka memaknai suatu pesan media. Setiap individu cenderung menafsirkan informasi berdasarkan latar belakang, perasaan, dan pengalaman hidup yang mereka miliki. Dengan demikian, pemaknaan terhadap isu revisi UU TNI tidak hanya ditentukan oleh informasi yang tersedia, tetapi juga oleh persepsi subjektif dan afeksi personal yang dimiliki masing-masing informan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa resepsi media bersifat kompleks dan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-psikologis audiensnya.

Informan yang berada pada posisi oposisi tidak sejalan dengan pemaknaan pembungkaman yang diinginkan oleh Tempo.co. Dua dari tiga informan dalam posisi ini memiliki latar belakang keluarga yang berkaitan dengan institusi militer. Informan pertama dari Generasi X, misalnya,

berasal dari keluarga tentara dan memiliki latar pendidikan strata satu di bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Hal ini membentuk pendapat yang cukup kuat mengenai isu militer sebelum ia terpapar pemberitaan Tempo.co. Selain itu, profesinya sebagai ibu rumah tangga membuatnya merasa tidak terlalu terancam oleh isu-isu pekerjaan yang dikaitkan dengan revisi UU TNI. Hal serupa juga terjadi pada informan kedua dari Generasi Y yang juga berasal dari keluarga tentara. Latar belakang tersebut turut memperkuat pandangannya terhadap isu militer sebelum membaca berita dari Tempo.co. Ditambah lagi, profesinya sebagai karyawan yang sibuk membuatnya memiliki waktu terbatas untuk mengakses informasi, sehingga kecenderungan menolak narasi media menjadi lebih kuat dan membentuk pemaknaan yang berada di posisi oposisi. Sedangkan satu informan 3 dari generasi Y hanya merasakan keamanan yang terjadi pada masa orde baru dan pekerjaan sebagai seorang mahasiswa membuat informan ini memiliki pandangan yang berbeda

Informan yang berada pada posisi oposisi memaknai pemberitaan berdasarkan pengalaman pribadi serta latar belakang pendidikan dan keluarga. Paparan terhadap media lain juga memengaruhi cara mereka memaknai isi pemberitaan. Selain itu, konteks pekerjaan turut membentuk pandangan mereka terhadap pembingkai berita oleh Tempo.co